

PROBLEMA KEMASYARAKATAN

Buku Perkuliahan Program S-1
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Ampel Surabaya

Dr. Abd. Syakur, M.Ag

Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and
Islamic Development Bank (IDB)



PROBLEM KEMASYARAKATAN

Buku Perkuliahan Program S-1
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:
Dr. Abd. Syakur, M.Ag

Supported by:
Government of Indonesia (Gol) and Islamic Development Bank (IDB)



PROBLEMA KEMASYARAKATAN

Penulis:
Dr. Abd. Syakur, M.Ag

Editor:
Hj. Muzaiyana, M.Fil.J

Cet. 1- Surabaya: UIN SA Press,
November 2014

vi + 130 hlm : 17 x 24 cm

ISBN : 978-602-1072-36-3

Cover :
Amir

Diterbitkan :
UIN Sunan Ampel Pressi
Anggota IKAPI
Gedung SAC.Lt.2 UIN Sunan Ampel
Jl. A. Yani No. 117 Surabaya
☎(031) 8410298-ext. 138
Email : sunanampelpress@yahoo.co.id

Dicetak :
CV. Cahaya Intan XII
Komplek ruko GRAHA ANGGREK MAS REGENCY No. A-01
Jl. Raya Pagerwojo-SIDOARJO
☎(031) 8070 603
Email : cahayaintanxil@yahoo.com

Copyright © 2014, UIN Sunan Ampel Press (UIN SA Press)
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

KATA PENGANTAR REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* telah menyelenggarakan *Workshop on Writing Textbooks for Specialization Courses* dan *Workshop on Writing Textbooks for vocational Courses* bagi dosen UIN Sunan Ampel, sehingga masing-masing dosen dapat mewujudkan karya ilmiah yang dibutuhkan oleh para mahasiswa-mahasiswinya.

Buku perkuliahan yang berjudul 'Problema Kemasyarakatan' ini merupakan salah satu diantara buku-buku yang disusun oleh para dosen pengampu mata kuliah program S-1 program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor

Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag.

NIP. 195709051988031002

PRAKATA

Penulis, dalam kesempatan ini, mengucapkan syukur *Alhamdulillah* atas selesainya penyusunan buku ini; Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpahkan atas Nabi Muhammad Saw. yang telah memberi teladan bagi segenap umatnya.

Selanjutnya, perlu diketahui, bahwa buku ini merupakan ramuan dari beberapa materi kuliah dengan berbagai hasil diskusi di kelas selama sekitar sepuluh (10) tahun penulis mengampu matakuliah problema kemasyarakatan dan patologi sosial. Ketika UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan IDB dalam program pengembangan buku ajar, maka penulis mengajukan permohonan bantuan penulisan buku ini, dan akhirnya diterima. Dengan demikian, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih pada IDB yang telah memberikan bantuan pendanaan, terutama untuk penyediaan buku-buku referensi; juga pihak UIN Sunan Ampel yang memfasilitasi penulisan ini, semoga semuanya menjadi amal bai yang sangat bermanfaat.

Buku ini berisi materi pokok mata kuliah problematika sosial-kemasyarakatan yang disusun berdasarkan kurikulum dan silabi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya di lingkungan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI).

Matakuliah tersebut diberikan untuk mahasiswa-wi jurusan BKI dalam berbagai minat studi, yaitu; bimbingan konseling keluarga, bimbingan konseling keagamaan, dan bimbingan karir, sebagai bekal bagi mereka untuk dapat memahami kondisi sosial yang patologis yang menjadi topik dalam mengkaji masalah sosial kemasyarakatan, terutama terkait dengan upaya melakukan *treatment* dan pemecahannya.

Dalam jurusan BKI, matakuliah problema kemasyarakatan dan patologi sosial menyajikan seperangkat konsep, rumus, teori, serta analisis tentang masalah sosial-kemasyarakatan, penyimpangan dan berbagai penyakit sosial yang tentu saja sebagai bekal bagi mahasiswa-wi untuk dapat menemukan akar persoalan dari problematika sosial tersebut, sehingga mampu mereka tangani melalui studi ilmiah-akademik sesuai dengan kompetensi dan kemampuan akademik mereka.

Adapun topik-topik dasar materi buku daras ini adalah meliputi; pengertian problematika sosial, sejarah masalah sosial hingga kelahiran (ilmu) patologi sosial, tentang perubahan sosial (*social changes*), tentang masalah sosial (*social problems*), teori-teori masalah sosial, pengertian disorganisasi sosial, teori-teori disorganisasi sosial, pengertian penyimpangan, teori-teori penyimpangan, jenis-jenis penyimpangan sosial/*sociopathologies*, gejala atau fenomena patologi sosial seperti

perjudian, korupsi, kriminalitas, pelacuran, gangguan mental dan gangguan jiwa, kenakalan remaja), serta relasi antara dakwah dan fenomena patologi sosial.

Penulis menyadari kemungkinan terdapatnya kekurangan dalam buku ini, sehingga saran konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini untuk selanjutnya.

Akhirnya, semoga buku ini menjadi amal baik penulis di sisi Allah Swt. dan bermanfaat bagi semua pembacanya, Amiin.

Surabaya, Desember 2013

Penulis

Dr. Abd. Syukur, M.Ag

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Tulisan Arab-Indonesia dalam penulisan Buku Perkuliahan di Lingkungan UIN Sunan Ampel adalah sebagai berikut.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	`	ط	t
2.	ب	b	ظ	z
3.	ت	t	ع	'
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	j	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	d	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ن	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	ه	h
13	ش	sh	ء	'
14	ص	ṣ	ي	y
15	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (madd) dengan cara menuliskan tanda coretan di atas ā, ī, dan ū (ا, ي, dan و). Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "au" seperti layyinah, lawwamah. Untuk kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai sifat (modifier) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedang yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

PENDAHULU

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Prakata	iv
Pedoman Transliterasi	vi
Daftar Isi	vii
Satuan Acara Perkuliahan	viii

ISI PAKET

Paket 1 Konsep dasar Problema Kemasyarakatan	1
Paket 2 Konsep Masyarakat Ideal Dan Masyarakat Non-Ideal	12
Paket 3 Perubahan Social (<i>Social Change</i>) Dan Masalah Sosial	20
Paket 4 Konsep Disorganisasi Sosial	36
Paket 5 Konsep deviasi / penyimpangan social	46
Paket 6 Teori-teori Patologi Sosial	56
Paket 7 Gejala-gejala/ Kasus-kasus Patologi sosial	68
Paket 8 Gejala Patologi Sosial: Korupsi	87
Paket 9 Dakwah Islam dalam Menangani Kasus-kasus Patologi Sosial	100

PENUTUP

Evaluasi dan Penilaian Perkuliahan	112
Daftar Pustaka	115
Profil Penulis	119

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

A. Identitas Matakuliah

Nama Matakuliah : Problema Kemasyarakatan
Dosen : Dr. Abd. Syakur, M.Ag
Bobot : 2 SKS
Jur/Prodi : BKI
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel
Surabaya

B. Standar Kompetensi :

Matakuliah ini dirancang untuk memberikan kompetensi kepada mahasiswa-wi Bimbingan Konseling Islam (BKI) agar memahami konsep masyarakat yang problematik/sakit (masyarakat patologis), faktor-faktor timbulnya problem sosial, serta menguasai teori-teori untuk mengidentifikasi gejala-gejala patologi sosial tersebut untuk dapat melakukan *treatment*.

C. Urgensi Matakuliah :

Matakuliah ini menjadi signifikan bagi mahasiswa-wi BKI (calon konselor) sebagai bekal dalam memahami dan mengidentifikasi masalah-masalah sosial Kemasyarakatan serta penyakit sosial-kemasyarakatan sehingga dapat menetapkan langkah-langkah *treatment* dan cara-cara konseling secara tepat.

D. Uraian Kegiatan Belajar-Mengajar

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi
Menjelaskan konsep dasar Patologi Sosial	Mahasiswa-wi mampu: -Menjelaskan pengertian Problema Kemasyarakatan dan Patologi Sosial	-Pengertian Problema Kemasyarakatan dan Patologi Sosial
	Menjelaskan obyek studi Problema Kemasyarakatan dan Patologi Sosial	-Obyek studi Problema Kemasyarakatan dan Patologi Sosial

	<ul style="list-style-type: none"> -Menjelaskan sifat studi dan metode studi Problema Kemasyarakatan -Menerangkan fase-fase munculnya disiplin Problematika Kemasyarakatan dan Patologi Sosial -Menjelaskan manfaat dan tujuan studi Problema Kemasyarakatan dan Patologi Sosial bagi mahasiswa-mahasiswi jurusan BKI 	<ul style="list-style-type: none"> -Sifat kajian/ studi dan metode studi PATOS -Sejarah munculnya PATOS -Manfaat studi dan tujuan mempelajari Problema Kemasyarakatan dan Patologi Sosial bagi Mahasiswa-mahasiswi BKI
Menjelaskan dan mengkomparasikan masyarakat ideal/ <i>ideal society</i> dan <i>non-ideal society</i>	<p>Mahasiswa-wi mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menjelaskan konsep masyarakat ideal -Menjelaskan unsur-unsur masyarakat ideal -Menjelaskan kualifikasi dan kriteria masyarakat ideal -Menerangkan--berdasar konsep masyarakat ideal-- tentang masyarakat non ideal/ masyarakat yang sakit/ patologis. 	<ul style="list-style-type: none"> -Konsep dan pengertian masyarakat ideal -Unsur-unsur atau komponen-komponen masyarakat ideal - kualifikasi masyarakat ideal -Terminologi masyarakat ideal -Konsep masyarakat non ideal/ patologis. -komparasi antara masyarakat ideal dan non-ideal
Menjelaskan proses sosial timbulnya gejala penyakit sosial	<p>Mahasiswa-wi mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -menjelaskan pengertian perubahan sosial (<i>social change</i>) -Menjelaskan faktor-faktor dan pola-pola perubahan sosial -Menjelaskan dampak sosiologis perubahan sosial -Menjelaskan pengertian masalah sosial (<i>social problems</i>) sebagai dampak 	<ul style="list-style-type: none"> -Pengertian perubahan sosial(<i>social change</i>) -faktor-faktor dan pola-pola perubahan sosial -dampak sosiologis dari perubahan sosial -pengertian masalah sosial (<i>social problems</i>) -sifat dan ciri-ciri masalah sosial, serta ruang lingkup masalah

	<p>negatif dari perubahan sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menerangkan ruang lingkup dan bentuk-bentuk masalah sosial 	<p>sosial</p>
<p>Menjelaskan kondisi dan gejala sosial yang sakit secara organik</p>	<p>Mahasiswa-wi mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menjelaskan pengertian disorganisasi sosial -Menjelaskan faktor-faktor timbulnya disorganisasi sosial -Menerangkan pola-pola dan menggambarkan bentuk-bentuk skematik disorganisasi sosial -Menjelaskan gejala-gejala pengiring disorganisasi sosial 	<ul style="list-style-type: none"> -Konsep disorganisasi sosial -Faktor-faktor penyebab timbulnya disorganisasi sosial -Gambaran skematik dan pola-pola disorganisasi sosial -Gejala-gejala yang mengiringi disorganisasi sosial
<p>Menjelaskan konsep deviasi (penyimpangan) sosial</p>	<p>Mahasiswa-wi mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menjelaskan arti Penyimpangan sosial -Menyebutkan sinonim deviasi (deviasi-deferensiasi) <i>adjustment-maladjustment</i> -Menjelaskan faktor-faktor penyimpangan -Menerangkan bentuk-bentuk/ jenis-jenis penyimpangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep deviasi -Termonologi deviasi (deviasi-deferensiasi) <i>adjustment-maladjustment</i> -Faktor-faktor penyimpangan -Bentuk-bentuk/ jenis-jenis penyimpangan
<p>Menjelaskan dan menerapkan teori-teori patologi sosial sebagai pendekatan dalam upaya melakukan <i>treatment</i> patologi sosial</p>	<p>Mahasiswa-wi mampu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Menjelaskan teori partisipasi sosial -Menjelaskan teori interaksi sosial -Menjelaskan teori tingkah laku sosial menyimpang (<i>behavior sociopathic</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> -Teori partisipasi sosial -Teori interaksi sosial -Teori tingkah laku sosial menyimpang (<i>behavior sociopathic</i>)
<p>Menjelaskan gejala-gejala/</p>	<p>Mahasiswa-wi mampu menjelaskan:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Juvenile delinquency</i> 2. Prostitusi dan

<p>kasus2 PATOS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Juvenile delinquency</i> 2. Prostitusi dan penyimpangan seksual 3. pelecehan dan kekerasan seksual. 4. Kejahatan narkoba 5. Korupsi 6. inseminasi 7. Pornografi 8. radikalisme 9. Trafikking 10. Sadism 11. Kebosanan hidup (eks veteran). 12. Dll. 	<p>penyimpangan seksual</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. pelecehan dan kekerasan seksual. 4. Kejahatan narkoba 5. Korupsi 6. inseminasi 7. Pornografi 8. radikalisme 9. Trafikking 10. Sadism 11. Kebosanan hidup (eks veteran).
-------------------------	--	--

Paket 1

KONSEP DASAR PROBLEMA KEMASYARAKATAN

Pendahuluan

Dengan paket ini, perkuliahan difokuskan pada pemahaman tentang dasar-dasar konseptual mengenai problema sosial-kemasyarakatan. Oleh sebab itu, point-point yang dibahas adalah meliputi pengertian problema sosial, dinamika sosial, dan masalah sosial, serta kaitan antara dakwah dan ilmu tentang problema sosial.

Paket 1 ini akan menjadi *entrypoint* bagi paket-paket selanjutnya yang lebih fokus lagi pada pemahaman teori-teori dan langkah-langkah menangani berbagai problema sosial dan gejala-gejala patologi sosial. Oleh sebab itu, yang paling dasar dalam paket ini adalah bahwa mahasiswa harus memahami definisi problema sosial dan patologi sosial, obyek studi, dan metode pengkajiannya agar dapat mengembangkan disiplin ilmu problema sosial ini melalui berbagai aktifitas survei dan penelitian ilmiah. Dalam konteks ini, mahasiswa diberi tugas untuk membaca literatur tentang definisi problema sosial dan patologi sosial, termasuk mendalami materi yang tersaji dalam paket satu (1) ini, dan juga melakukan *brainstorming* terkait dengan pemahaman realitas sosial-kemasyarakatan berkenaan dengan konsep problema sosial tersebut agar pemahaman dan wawasan mahasiswa dapat lebih konkret lagi dan empirik-sosiologis.

Mata kuliah ini, sebagaimana materi yang dibahas dalam sesi paket 1 ini, adalah bersifat empirik-obyektif yang menuntut pemahaman mengenai realitas sosial dari mahasiswa sehingga penugasan-penugasan kepada mereka, agar aktif mengamati kehidupan sosial-kemasyaratan di sekitarnya dalam bentuk survei-survei, tidak dapat ditiadakan. Oleh karena itu, dalam proses perkuliahan, dibutuhkan peralatan-peralatan dan sarana memadai seperti LCD dan Laptop yang menyediakan point-point seputar topik kajian, serta penampilan-penampilan gambar dalam slide untuk memudahkan pemahaman mahasiswa agar dapat lebih konkret lagi. Selain itu, perlu disediakan juga kertas plano dan spidol sebagai media pembelajaran untuk menuangkan hasil-

hasil diskusi ataupun *brainstorming* mahasiswa untuk selanjutnya dipresentasikan ke depan kelas.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP)

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu mendeskripsikan konsep dasar problema sosial-kemasyarakatan dan patologi sosial

Indikator

Setelah perkuliahan berakhir diharapkan mahasiswa-wi dapat:

1. Menjelaskan pengertian problema sosial dan patologi sosial
2. Menjelaskan obyek studi dan sifat studi problema sosial
3. Menerangkan kaitan antara dakwah dan ilmu problema sosial

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian problema sosial dan patologi sosial
2. Sifat studi, obyek studi, serta metode studi problema sosial
3. Kaitan antara dakwah dengan ilmu tentang problema sosial

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (15menit)

1. *Brainstorming*, tukar wawasan, serta mengamati slide tentang terma masalah sosial dengan tayangan gambar-gambar tentang realitas sosial.
2. Penjelasan urgensi masalah sosial

Kegiatan inti (70 menit)

1. Mengelompokkan mahasiswa-wi menjadi empat (4) group.
2. Masing-masing group mendiskusikan tema dan sub tema tentang, yaitu:
Group ke 1 tentang pengertian masalah sosial
Group ke 2 tentang pengertian patologi sosial
Group ke 3 tentang obyek studi, sifat studi, dan metode studi masalah sosial
Group ke 4 tentang konsep relasi dakwah dan sosial-kemasyarakatan.
3. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok ke depan kelas.

4. Setiap selesai presentasi satu kelompok diadakan diskusi dan Tanya-jawab.
5. Pemantapan dan penguatan hasil diskusi oleh dosen pengampu.
6. Pemberian kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk mengklarifikasi hasil diskusi atau menanyakan hal yang belum dibahas dalam diskusi.

Kegiatan Penutup (10menit)

1. Penyimpulan hasil perkuliahan
2. Memberikan semangat belajar lebih lanjut dan mendalami materi
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa/wi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5menit)

1. Memberikan tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) tentang masalah sosial dan patologi sosial

Tujuan

Agar mahasiswa-wi dapat membuat susunan pemahaman yang sistematis tentang masalah sosial melalui kreatifitas pengungkapan ide, dan dari ide-ide yang parsial dari beberapa mahasiswa-wi tersebut terkonstruksi konsep yang utuh dan menjadi definisi yang adekuat tentang masalah sosial dalam suatu *mindmapping*.

Bahan dan Alat

Kertas plano, Spidol berwarna, dan Solasi penempel.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing lima (5) menit!
7. Berikan tanggapan dan klarifikasi terhadap presentasi yang selesai

dilakukan!

Uraian Materi

KONSEP DASAR PROBLEMA KEMASYARAKATAN

Pengertian dan Terminologi Problema Kemasyarakatan

Masyarakat—dalam istilah ilmiahnya disebut dengan *society* ataupun *community*—menjadi obyek studi yang sangat penting dalam ilmu dakwah, karena ia merupakan arena interaksi manusia, dan di tengah masyarakatlah manusia menjadi eksis. Demikian juga agama dimana tidak akan dapat aktual seandainya tidak ada masyarakat. Dakwah Islam adalah bertujuan agar; Pertama, tercipta manusia-manusia yang baik secara pribadi; dan kedua, tercipta pergaulan kehidupan antara pribadi yang baik, rukun, dan harmonis. Atas dasar inilah, ilmu mengenai kemasyarakatan menjadi penting untuk dikaji. Namun, kajian penting dalam perkuliahan problema sosial ini difokuskan pada masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta penyakit-penyakit yang mengancamnya, dan bahkan yang berpotensi mematikan masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, yang menjadi *subject matter* dalam perkuliahan problema sosial ini adalah tentang penyeakit-penyakit kemasyarakatan yang secara intens ditelaah secara anatomik dalam disiplin keilmuan patologi sosial.

Secara etimologis, patologi (*pathology*), terdiri dari kata *Pathos* yang berarti penyakit, dan *logos* yang berarti pembicaraan serius tentang sesuatu yang pada akhirnya membuahkan ilmu.¹ Dengan demikian, patologi berarti pembicaraan serius dan ilmiah tentang suatu penyakit. Kata patologi memang mengandung konsep fisio-biologis yang secara lebih awal dan popular dipakai dalam disiplin medikal-kedokteran, misalnya, kajian tentang fungsi-fungsi organ tubuh yang mengalami gangguan dikarenakan adanya disfungsi jaringan kelenjar dalam tubuh, dan sejenisnya. Jadi, dengan demikian, kajian tentang suatu jenis penyakit tertentu yang mengganggu fungsi - fungsi organ tubuh itu dalam cabang ilmu kedokteran disebut *patologi*. Namun demikian, terma tersebut selanjutnya meluas

¹ Poespoprodjo, *Logika scientifica; pengantar dialektika ilmu*, (Bandung: Pustaka Grafika, 1999), 27.

pemakaiannya dalam disiplin ilmu yang lain seperti sosiologi dan psikologi.

Selanjutnya, kata ‘**sosial**’ dapat diartikan dengan masyarakat (*society*) yang secara terminologis berarti organisasi manusia yang menjalin pergaulan hidup bersama untuk dapat saling memenuhi kebutuhan bersama secara harmonis.² Dengan demikian, patologi sosial berarti pembicaraan atau studi ilmiah tentang penyakit masyarakat, yaitu hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan dan ketentraman masyarakat, bahkan dapat menyalakan eksistensi masyarakat tersebut.

Secara terminologis, terdapat banyak pengertian tentang **patologi sosial** sebagaimana dinyatakan oleh para ahli. Namun dari redaksi yang bervariasi tersebut tetap memiliki esensi konseptual yang sama. Vembriarto, misalnya, mengemukakan dua pengertian; *Pertama*. Patologi sosial adalah sebuah disiplin ilmu yang membicarakan tentang disorganisasi sosial dan penyimpangan sosial (*social maladjustment*) yang meliputi sebab-sebab terjadinya kondisi dimana anggota masyarakat tidak mampu menyesuaikan diri di tengah lingkungannya, tentang extensi, dan usaha-usaha perbaikan atau *treatment* yang dapat mengurangi gangguan sosial tersebut, seperti kemiskinan, pengangguran, problem manula (manusia lanjut usia), *feble-mindedness*, *insanity*, perceraian keluarga, kejahatan dan kenakalan remaja, prostitusi, dan lain-lain. *Kedua*, bahwa patologi sosial adalah kondisi sosial atau masyarakat yang sakit, atau kondisi masyarakat yang abnormal.³ Dengan makna kedua ini, maka ungkapan “masyarakat patologis” dapat dipahami sebagai masyarakat yang sakit atau abnormal. Pengertian pertama memiliki konotasi bahwa patologi sosial merupakan suatu disiplin ilmu independent yang memiliki obyek studi tentang disintegrasi sosial, *social disorder*, dan *social maladjustment*. Terkait dengan pengertian pertama ini, maka Sapari Imam Asy’ari menjelaskan, bahwa lapangan studi patologi sosial adalah problema kemasyarakatan yang timbul sebagai hasil interaksi manusia yang tidak mencapai taraf kesempurnaan, sehingga menimbulkan

² Hassan Shadilly, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 47.

³ St. Vembriarto, *Pathology Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan PARAMITA Yogyakarta, 1984), 1

rusaknya nilai-nilai sosial yang disebabkan adanya tingkah laku sosial yang menyimpang / salah.⁴

Sedangkan pengertian yang kedua memberi konotasi bahwa patologi sosial merupakan kualitas sosial yang tidak stabil, disharmonis, dan mengalami gangguan yang berakibat pada resahnya anggota masyarakat dan tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Pengertian kedua ini tampaknya seirama dengan pendapat Gillin and Gillin, bahwa patologi sosial merupakan bentuk *maladjustment* yang serius di antara berbagai unsur dalam keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa, sehingga kondisinya membahayakan kelangsungan hidup suatu kelompok sosial, atau secara serius menghambat pemuasan kebutuhan-kebutuhan asasi anggota-anggota kelompok masyarakat itu yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka.⁵

Dua aras pengertian seperti di atas tampaknya dipergunakan secara bersamaan oleh para ahli dan mendapat landasan logika pemakaiannya secara kuat. Dengan demikian, dapat dimengerti, bahwa patologi sosial dalam konteks tertentu dapat dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu tentang kondisi sosial yang tidak normal dan disintegratif. Sedangkan dalam konteks yang lain juga dapat berarti sebuah kondisi masyarakat yang problematis tersebut, atau kualitas sosial yang tidak ideal atau tidak diinginkan yang mencerminkan kecemasan serius dari warganya.

Konsep Dinamika Sosial: dari Problema Sosial hingga Patologi Sosial

Secara defacto, masyarakat telah eksis seiring dengan kehidupan manusia itu sendiri, dan manusia dikenal sebagai makhluk yang berinstink sosial, artinya, selalu ingin mewujudkan kehidupan bersama dalam sebuah organisasi hidup. Para filosof kuno dari Yunani tidak melewatkan perhatiannya terhadap masyarakat, sehingga dalam karya-karya filsafatnya banyak dijumpai term-term mengenai realitas masyarakat ini. Di era

⁴ Sapari Imam Asy'ari, *Patologi Sosial*, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional Surabaya- Indonesia), 11.

⁵ Earl Rubington, Martin S. Weinberg, *The Studi of Sosial Problems*,(New York: Oxford University Press),

moderenlah yang dirintis sejak zaman pencerahan/ *renaissance* subject matter masyarakat ini mendapat perhatian serius sehingga lahir sebuah disiplin sosiologi.

Dalam disiplin sosiologi digambarkan bahwa masyarakat adalah dinamis karena masyarakat itu mencerminkan ide, cita-cita, dan harapan manusia dalam hidupnya. Dinamisitas masyarakat mencerminkan sebuah normalitas masyarakat itu sendiri. Namun demikian, dalam konteks dinamika tersebut masyarakat menampakkan diri sebagai sebuah entitas yang berkembang karena factor-faktor internal berupa ideal-ideal anggota masyarakat untuk meningkatkan perikehidupannya, dan juga karena factor eksternal berupa tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Di era modern misalnya dimana ilmu pengetahuan berkembang pesat yang membuahkan teknologi maka kebutuhan manusia semakin bervariasi yang semuanya menuntut pola-pola kehidupan baru yang lebih baik, sementara aspek-aspek sosial yang lain belum siap, misalnya, maka dapat dipastikan akan melahirkan problematika yang juga selalu berkembang. Oleh sebab itu, maka dinamika sosial yang merupakan sebuah konsep tentang perubahan cara-cara berinteraksi, berkomunikasi, serta pola-pola kehidupan manusia dalam kelompoknya adalah tidak dapat dihindari. Atas dasar ini pula maka dinamika sosial berdampak negatif melahirkan problem-problem sosial, disamping juga berdampak positif yaitu terwujudkan pola-pola kehidupan interaksional yang lebih baik lagi.

Sebagaimana dijelaskan oleh kartini Kartono, bahwa dua abad sebelum abad ke 19 dan 20, patologi sosial belum lahir sebagai sebuah disiplin ilmu, karena belum memiliki sebuah *style* spesifik dalam melakukan studi. Pada saat itu, para sosiolog yang *concern* dalam bidang penyimpangan sosial, misalnya; kejahatan, kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, kecanduan obat bius, perjudian dan lain-lain masih memandangnya dsngan spektrum normatif sebagai penyakit masyarakat yang harus diberantas dan dibasmi, serta

dienyahkan dari muka bumi.⁶ Induk patologi sosial adalah disiplin sosiologi yang kemudian melakukan telaah terhadap penyakit sosial itu dengan bantuan psikologi, terutama kriminologi, hukum dan etika.

Selanjutnya, memasuki abad ke 19 dan 20, para pemerhati penyakit masyarakat seperti di atas menyepakati pemakaian istilah ilmiah dengan terma *sociopathology* atau patologi sosial. Dengan demikian, maka lambat laun ilmu tersebut semakin membentuk dirinya sebagai sebuah disiplin yang mencoba membatasi ruang lingkup kajian, menemukan pola kajian, membangun teori, serta menetapkan teknik analisisnya sendiri. Dengan latar belakang pertumbuhan seperti itu, maka patologi sosial menampilkan diri sebagai disiplin ilmu yang longgar dari sisi penyebutannya, sehingga dari sisi kualitas sosial, patologi sosial dapat juga disebut dengan disorganisasi sosial, disintegrasi sosial, masyarakat yang abnormal dan lain-lain yang pada intinya adalah merupakan esensi dari istilah patologi sosial itu sendiri.

Oleh karena ilmu ini lahir dari sosiologi, maka tentu saja pola studi yang dipakainya pun identik dengan sosiologi. Demikian juga obyek yang ditelaah adalah merupakan wilayah obyek material studi sosiologi, yaitu tentang organisasi sosial, sistem dan struktur sosial, tetapi dari aspek-aspek negatifnya.

Dalam menuju kesempurnaannya, menurut Vembriarto, disiplin ilmu ini berkembang dengan menapaki tiga fase; yaitu fase masalah sosial, fase disorganisasi sosial, dan fase sistematis.⁷

Pada fase pertama, patologi sosial memiliki *concern* pada persoalan sosial yang meliputi; masalah pengangguran, masalah pelacuran, masalah kejahatan, masalah kemiskinan, masalah pertumbuhan penduduk dan sejenisnya.⁸ Selanjutnya, pada fase kedua, tampaknya muncul koreksi pada fase pertama karena hanya menekankan pada segi akibatnya saja, tanpa

⁶ Kartini kartono, *patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Garafindo, Persada, 2001),1

⁷ St. Vembriarto, *Patologi Sosial*, (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan PARAMITA, 1984), 4-6.

⁸ Dalam suatu kajian yang berbeda, patologi Sosial dijadikan sebagai sebuah spectrum dari persoalan sosial atau Sosial problems, bukan sebagai disiplin independent sebagaimana yang dilakukan Earl Rubington dalam bukunya *Sosial Problems* di atas. Pola sejenis juga dilakukan oleh Soetomo dalam bukunya, *Masalah Sosial dan Pembangunan*

menilik pada faktor-faktor penyebabnya, ataupun akibat yang ditimbulkan lagi, sehingga muncul upaya untuk mengarahkan telaah pada segi disorganisasi sosial. Dengan demikian, ada perluasan wacana yang menjadi wilayah pengkajian patologi sosial ini dimana semula hanya pada event-event parsial sebagaimana pada masalah sosial di atas yang lebih mengedepankan perspektif normatif dalam melihat fenomena sosial. Sedangkan pada tahap disorganisasi sosial ini, patologi sosial lebih luas lagi di dalam melihat fenomena, tidak hanya pada segi sebabnya saja, tetapi melihat juga akibat sosial dari fenomena di atas. Namun demikian, fase kedua inipun, masih memiliki keterbatasan, karena di dalam melihat fenomena sosial masih menggunakan perspektif normatif sebagai tolok ukurnya.

Fase ketiga, fase sistematis, yaitu merupakan penyempurnaan dari fase kesatu dan kedua. Pada fase ini, patologi sosial menjadi sebuah disiplin ilmu yang sudah memiliki kerangka metodologi yang sistematis, memiliki bermacam-macam teori yang dapat menjadi landasan analisis terhadap bidang kaji patologi sosial. Diantara sebagian teori tersebut adalah teori partisipasi sosial, teori interaksi sosial, dan teori tingkah laku sosial menyimpang (*sociopathic behavior*)⁹

Kedudukan Ilmu Problema Sosial dan Patologi Sosial dalam Ilmu Dakwah

Secara etimologis, **kata** dakwah berasal dari kata bahasa Arab, **da'wah**, yang merupakan bentuk isim **masdar** yang dapat dibentuk menjadi kata **kerja yad'ū** yang terbiasa dimaknai dengan “memanggil untuk mengajak”. Di dalam al Qur'an, kata ini dipergunakan sebagai bentuk perintah agar manusia yang beriman mengajak manusia lain untuk mau menerima kebenaran ajaran agama Allah dengan metode yang terbaik.¹⁰ Selanjutnya, perintah ini pada akhirnya dilaksanakan oleh Rasul Muhammad, para sahabat dan para ulama dengan mengembangkan berbagai metode dan pendekatan yang ilmiah, sehingga dapat menjadi sebuah disiplin ilmu

⁹ Vembriarto, *Pathology Sosial*, hal 4.

¹⁰ Periksa surat Yunus: 25, dan Fushshilat:33.

keislaman tersendiri.

Adapun secara terminologis, **Dakwah** berkedudukan sebagai sebuah disiplin ilmu dengan pengertian yang beragam, di antaranya adalah;

1. Dalam buku *hidāyat al mursyadtn*, Syaikh Ali Mahfudz mengartikan **dakwah** dengan *hatstsu al nas 'ala al khair wa al huda, wa al amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar liyafuza bi sa'adat al 'ajil wa ajil*. Artinya; dakwah adalah menyeru manusia untuk berbuat baik dan berperilaku lurus dengan menganjurkan melakukan hal-hal yang bagus dan mencegah perbuatan tercela agar manusia mencapai kebahagiaan jangka pendek dan jangka jauh (di akhirat).
2. Menurut Abu Bakar Atjeh, **dakwah** yaitu perintah mengadakan seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup di sepanjang jalan ajaran Allah SWT. yang benar dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik.
3. Thoha Yahya Umar mengartikan **dakwah** sebagai upaya mengajak manusia dengan cara bijaksana menuju jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
4. Arifin M.Ed mendefinisikan dakwah dengan “kegiatan mengajak, baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan serta pengamalan terhadap ajakan agama sebagai *messege* yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur- unsur paksaan.¹¹

Definisi-definisi yang bervariasi di atas memiliki makna prinsipil yang sama yaitu; *Pertama*, bahwa yang menjadi obyek dan sekaligus subyek dakwah adalah manusia. *Kedua*, dakwah dilakukan secara sadar, bertujuan mengajak manusia agar menerima kebenaran ilahi atas dasar kesadaran pula. *Ketiga*, dakwah dilakukan dengan metode yang bijaksana dan pendekatan yang

¹¹ *Totok Sumantoro, Psikologi Dakwah: dengan aspek-aspek kejiwaan yang qur 'ani (Jakarta: Penerbit Amzah, 2001), 18.*

manusiawi. Jadi, dakwah bertujuan menciptakan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan tersebut akan terwujud, jika dan, ketika manusia berada dalam perilaku yang benar dan jalan yang lurus.

Sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri, ilmu dakwah mengalami perkembangan paradigmatik seiring dengan perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu yang menggunakan seperangkat ilmu bantu dan skill, dakwah aktual juga sebagai sebuah seni yang membutuhkan keterampilan metodologis. Oleh karena itu, bidang garap, pola praktikum, dan tujuan dakwah pun berkembang pula.

Di era kontemporer seperti sekarang ini, seiring dengan isu keterbelakangan, kemiskinan dan sejenisnya, yang menjadi faktor ketimpangan sosial, *trend* dakwah mengarah pada paradigma pemberdayaan sosial. Seiring dengan ini maka dakwah transformatif menjadi sebuah pilihan utama dakwah. Corak dakwah yang demikian bertujuan menciptakan pencerahan kemanusiaan, membebaskan mereka dari keterpurukan, serta membuat kehidupan manusia menjadi adil dan harmonis. Tujuan seperti itu memang menjadi utama sebagai perintah dakwah itu sendiri sebagaimana frasa ayat *litukhrija an nas min al zulumat ila al nur*. Artinya:”.....agar engkau, Muhammad (dalam menerima risalam Islam itu) bertugas mengeluarkan manusia dari kegelapan hidup menuju kecerahan kehidupan”.

Demikian juga seiring dengan spesifikasi profesi dakwah, sebagaimana dalam konteks penyembuhan manusia-manusia yang berpribadi bermasalah yang dapat menjadi penyakit sosial bagi masyarakatnya, maka aksi dakwah mengambil concern pada pemberian bantuan dan petunjuk agar seseorang berpribadi normal dan sehat sehingga melahirkan disiplin ilmu bimbingan dan konseling dan hal ini menunjukkan adanya pembedangan ilmu dakwah yang semakin rinci. Dakwah di bidang bimbingan dan konseling ini pada akhirnya mendorong dimunculkannya jurusan bimbingan dan konseling Islam di lingkungan fakultas Dakwah.

Tegasnya, dalam konteks berdakwah, ilmu tentang problema dan patologi sosial berkedudukan sebagai ilmu bantu dalam menganalisis

persoalan-persoalan sosial-kemasyarakatan. Disiplin ini membantu seorang pendakwah dapat memahami dan menemukan problem-problem sosial yang menjadi penyebab dari ketidakharmonisan hidup manusia, sehingga untuk selanjutnya, dapatlah dirancang suatu *treatment* dan pemecahannya yang tepat.

Ilmu problema dan patologi sosial itu juga sangat urgen dipergunakan sebagai pendekatan dalam memahami kelainan-kelainan/penyimpangan sosial kemasyarakatan baik yang disebabkan oleh individu/persona sosial maupun faktor-faktor sosial yang membahayakan dan mengancam kehidupan sosial. Dalam kaitan ini, maka jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI) yang jelas-jelas memberikan kompetensi kepada mahasiswa-mahasiswi dalam bidang konseling individu dan sosial sangat tepat menyediakan matakuliah problema dan patologi sosial ini sebagai ilmu dasar yang harus dikuasai.

Dengan alur pemikiran seperti itu, dapat diketahui bahwa ilmu problema dan patologi sosial berfungsi sebagai alat bantu bagi mahasiswa fakultas dakwah pada umumnya, dan bagi mahasiswa-wi BKI pada khususnya, sebagai alat bantu untuk memahami persoalan sosial dengan berbagai teori dan pendekatan ilmiahnya. Kemudian dari penemuan persoalan-persoalan seperti itu pada akhirnya dapat disusun teknik dan pendekatan-pendekatan yang relevan dalam upaya *men-treatment-nya* (menanganinya secara ilmiah-profesional).

Latihan

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

1. Jelaskan apa yang Saudara ketahui tentang masalah sosial?
2. Jelaskan berdasar beberapa pendapat para ahli tentang pengertian patologi sosial!
3. Bagaimana penjelasan Saudara bahwa masalah sosial berakibat terhadap patologi sosial?
4. Bagaimana definisi yang tepat tentang dakwah Islamiyah?

5. Saudara dimohon menjelaskan sekilas tentang unsure-unsur dakwah, dan metode-metodenya!
6. Apa hubungan ilmu tentang problema sosial dan patologi sosial dengan dakwah Islamiyah, terutama terkait dengan jurusan BKI?

Paket 2

Perubahan Sosial (*Social Changes*)

Pendahuluan

Pada paket ini, perkuliahan diarahkan pada pembahasan mengenai konsep perubahan sosial, dan hal-hal terkait dengan dampak atau pengaruhnya. Ini dimaksudkan agar mahasiswa-wi memahami bahwa sosial atau masyarakat itu mengalami sebuah proses dan dinamika, sehingga memberikan kesadaran bahwa masyarakat itu pada intinya mengalami kemiripan dengan kehidupan. Artinya, sebagaimana masyarakat itu merupakan entitas yang hidup tentu membutuhkan perawatan dan usaha-usaha memenuhi kebutuhannya, serta mempertahankan eksistensinya agar tidak lenyap dan bahkan menjadi berkebang. Karena itu, penting bagi mahasiswa-wi untuk memahaminya. Materi paket ini sangat penting karena menjadi entrypoint bagi pemahaman tentang materi paket-paket berikutnya.

Dalam paket ini, konsep-konsep yang dikaji meliputi; perubahan sosial (*social changes*), ruang lingkup perubahan sosial, faktor-faktor perubahan sosial, pola-pola atau bentuk-bentuk perubahan sosial. Konsep-konsep tersebut diharapkan memberikan wawasan bagi mahasiswa-wi agar dapat memahami karakteristik sosial dan dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Dalam proses perkuliahan, dosen memberikan tayangan slide mengenai perubahan sosial dan efek-efeknya, terutama di masyarakat urban untuk memberikan kesan kongkret mengenai sosial dalam tataran empirinya sehingga mahasiswa dapat mudah bersentuhan dengan masyarakat secara nyata.

Mengingat tujuan perkuliahan paket ini adalah untuk mengajak mahasiswa-wi lebih dekat dengan masyarakat setelah memahami secara konseptual, maka media pembelajaran sangat penting adanya, yaitu beruda LCD dan Laptop, papan tulis dan juga layar slideshow, spidol, dan kertas plano beserta solasi untuk menampilkan hasil *brainstorming* dan *mindmapping*.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi dasar

Mahasiswa-mahasiswa mendeskripsikan perubahan sosial

Indikator

Setelah perkuliahan berakhir diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. Menjelaskan makna perubahan sosial.
2. Menjelaskan lingkup dan faktor-faktor perubahan sosial.
3. Menerangkan proses perubahan sosial dan teori-teorinya.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Makna Perubahan Sosial
2. Lingkup dan Faktor-faktor perubahan Sosial
3. Proses Perubahan Sosial dan Teori-teorinya

Kegiatan perkuliahan

Kegiatan awal (15menit)

1. *Brainstorming*, tukar wawasan, serta mengamati slide tentang tema masalah sosial dengan tayangan gambar-gambar tentang realitas sosial.
2. Penjelasan perubahan sosial

Kegiatan inti (70 menit)

1. Mengelompokkan mahasiswa-wi menjadi empat (4) group.
2. Masing-masing group mendiskusikan tema dan sub tema tentang, yaitu:
Group ke 1 tentang perubahan sosial dan ruang lingkupnya.
Group ke 2 tentang faktor-faktor perubahan sosial
Group ke 3 tentang pola-pola atau bentuk-bentuk perubahan sosial
Group ke 4 tentang teori-teori perubahan sosial.
3. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok ke depan kelas.
4. Setiap selesai presentasi satu kelompok diadakan diskusi dan tanya-jawab.
5. Pemantapan dan penguatan hasil diskusi oleh dosen pengampu.
6. Pemberian kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk mengklarifikasi hasil diskusi atau menanyakan hal yang belum dibahas dalam diskusi.

Kegiatan Penutup (10menit)

1. Penyimpulan hasil perkuliahan
2. Memberikan semangat belajar lebih lanjut dan mendalami materi

3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa/wi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5menit)

1. Memberikan tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) tentang perubahan sosial, faktor-faktor, dan efek-efeknya.

Tujuan

Agar mahasiswa-wi dapat mendeskripsikan pemahaman yang sistematis tentang perubahan sosial, faktor-faktor, pola-pola, dan efek-efeknya melalui kreatifitas pengungkapan ide, dan dari ide-ide yang parsial dari beberapa mahasiswa-wi tersebut terkonstruksi konsep yang utuh dan menjadi definisi yang adekuat tentang perubahan sosial dalam suatu *mindmapping*.

Bahan dan Alat

Kertas plano, Spidol berwarna, dan Solasi penempel.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing lima (5) menit!
7. Berikan tanggapan dan klarifikasi terhadap presentasi yang selesai dilakukan!

Uraian Materi

Perubahan Sosial (*Social Changes*)

Makna Perubahan Sosial

Kehidupan masyarakat, tidak dapat terlepas dari gerak dan dinamika

kehidupan, karena hal itu sudah menjadi watak dasar sosial itu sendiri. Gerak tersebut dapat mengarah maju dan dapat pula mundur ke belakang yang disebut dengan terma **perubahan sosial** atau *sosial changes*. Perubahan tersebut terjadi disebabkan oleh faktor sosial, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri / internal, maupun dari luar sistem sosial tersebut/ eksternal. Faktor-faktor perubahan itu sangat bervariasi sehingga intensitas dan pola perubahannya pun sangat bervariasi pula, da yang cepat dan ada pula yang lambat. Dengan demikian dapatlah dimaklumi, bahwa perubahan sosial merupakan sesuatu yang natural dalam kehidupan sosial, dan tidak dapat dipungkiri adanya. Hanya saja, manusia akan berbeda-beda dalam menyikapi perubahan itu.

Pandangan klasik seperti yang diwakili kaum agamawan, Lao-tse, Kong-hucu, Kristen klasik dan pertengahan, dan lain-lain menyikapi, bahwa perubahan merupakan suatu fenomena kemerosotan dan pengotoran. Dikatakan, bahwa kehidupan periode permulaan adalah merupakan gambaran kehidupan keemasan, era ideal dan sulit diraih kembali pada zaman akhir. Ketika terdapat perubahan di sana-sini yang mengalihkan dari kemurnian ajaran dan nilai yang tinggi jtu maka berarti kondisi buruk dan kemerosotanlah yang terjadi. Oleh karena ini, maka perubahan sosial ditangkap oleh mereka, khususnya oleh Lao-tse dan Kong-hucu, sebagai sebuah kemunduran.¹² Pemahaman seperti itu pada umumnya ada pada masyarakat yang masih sederhana, dan sikap konservatif yang masih sangat kuat. Di kalangan kaum muslim juga terdapat perbedaan sikap tentang perubahasn kehidupan ini. Menurut kalangan romantisme, bahwa kehidupan sekarang ini sudah jauh menyimpang dari idealisme Islam awal, periode emas Rasulullah Muhammad saw. Kelompok yang menyatakan pandangan seperti perubahan itu misalnya adalah kelompok salaf, jamaah tabligh dan lain-lain. Kelompok tersebut mendakwahkan keistimewaan zaman awal Islam dan mengajak kaum muslimin untuk memegang sunnah Rasul. Embrio ideologi

¹² Hasan Shadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 1993), 231

salafiyah seperti itu menyebar dalam berbagai komunitas muslim dan memasuki berbagai arena pemikiran yang meliputi politik, sosial, hukum dan lain-lain. Di antara indikator ideologi salafiyah itu adalah munculnya berbagai kelompok aliran Islam yang berupaya menutup gerak reformasi pemahaman keagamaan, baik dalam bidang hukum, sosio-kultural dan teologi dengan menggemakan konsep ijtihad telah tertutup.

Pandangan modern, baik yang berakar dari pandangan keagamaan maupun sekuler, menegaskan, bahwa pembaharuan sosial itu sungguh merupakan keharusan, sebab hal itu menjadi sarana mencapai kemajuan yang berarti bertambahnya kebahagiaan hidup, kemerdekaan berpikir dan terlepasnya umat manusia dari ketakutan, kegelapan dan kemiskinan. Pandangan ini berasumsi, bahwa kemajuan itu terkait dengan penemuan baru yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan hidup manusia.¹³

Dari kalangan agamawan juga terdapat aliran yang sangat respektif terhadap perubahan. Aliran tersebut muncul dalam berbagai bentuk gerakan ijtihad dan reformasi pemahaman / tafsir keagamaan yang bertujuan agar agama bukan menjadi sebuah falsafah hidup yang beku dan bertentangan dengan kemajuan-kemajuan peradaban yang positif. Sebaliknya, pembaharuan pemahaman mampu memberi inspirasi kebahagiaan dan kemaslahatan yang semakin nyata yang memang itulah tujuan datangnya agama itu sendiri. Kelompok ini membuang sikap konservatif yang menghalangi terwujudnya kemajuan-kemajuan kehidupan.

Dari uraian di atas, menjadi jelas, bahwa perubahan sosial merupakan proses wajar dan akan berlangsung terus menerus.¹⁴ Menurut Shadilly, tersebut disebabkan karena manusia memiliki nafsu membangun, yakni dorongan untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik lagi.¹⁵ Para pakar sosiologi bervariasi dalam mendefinisikan perubahan sosial tersebut. Samuel Koenig berpendapat, bahwa perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi

¹³ Ibid

¹⁴ Muhammad Basrowi, dan Soenyono, *Memahami Sosiologi*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2004), 193.

¹⁵ Shadilly, *Sosiologi ...*, hal. 232

dalam pola kehidupan manusia.¹⁶

Bruce J. Cohen mengatakan bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan struktur sosial dan perubahan pada organisasi sosial. Pendapat lain seperti Roucek dan Warren, mengatakan bahwa perubahan sosial itu juga terjadi pada aspek proses sosial dan struktur masyarakat.¹⁷

Maclver (1973: 272) melengkapi, bahwa perubahan sosial terdapat juga dalam bidang hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial (*equilibrium*)¹⁸

Definisi-definisi di atas pada prinsipnya adalah sama bahwa perubahan sosial merupakan proses variasi pola kehidupan masyarakat menuju cara-cara baru dan modifikasi-modifikasi yang meliputi aspek struktur sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial. Dengan demikian, ruang lingkup perubahan sosial itu meliputi segi-segi budaya, baik materiil maupun immaterial. Oleh karena itu, dalam melihat perubahan sosial, tidak dapat terpisahkan dengan perubahan budaya, karena tidak ada masyarakat yang tanpa budaya. Sesungguhnya, sistem dan proses sosial dalam ranah nilai-nilai dan pola relasi sosial, serta sikap pergaulan dalam masyarakat itu merupakan sebuah segi dari budaya itu sendiri.

Lingkup dan Faktor-faktor Perubahan Sosial

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui pula, bahwa lingkup perubahan sosial itu mencakup pula segi perubahan budaya. Sebagai contoh, yaitu perubahan dari segi kelembagaan sosial--dalam hal ini pendidikan--bahwa persoalan kelembagaan pendidikan itu pada dasarnya sangat kompleks. Ada yang baru dalam tataran perubahan norma dan nilai-nilai, dan belum mencapai tataran perilaku sebagai hasil belajar. Dengan demikian, menjadi jelas, bahwa perubahan sosial itu memiliki ranah yang luas.

Perubahan sosial itu terjadi karena anggota masyarakat pada suatu saat

¹⁶ Samuel Koenig, *Man and Society, The Basic Teaching of Sociology*, (New York ; Barnes and Noble Inc., 1975), 197

¹⁷ Periksa, Abdul Syani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 208.

¹⁸ Robert M. McIven, Charles page, *Society ; An Introductory Analysis*, (New York: Rinehart and Company, 1975), 186

merasa tidak puas terhadap realitas kehidupan yang melingkupinya. Norma-norma masyarakat, lembaga-lembaga sosial, dan sistem kehidupan yang lama dirasa telah tidak tepat lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia saat ini.¹⁹

Menurut Selo Soemarjan, perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari dalam sistem kehidupan masyarakat itu sendiri, misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat dengan memahami teknologi yang canggih yang berakibat pada berubahnya cara hidup, pertumbuhan jumlah penduduk yang positif yang pada umumnya disebabkan urbanisasi, sehingga menyebabkan berubahnya lembaga-lembaga sosial dan struktur sosial, konflik atau pertentangan yang terjadi baik menyangkut persoalan norma, politik, etika, agama, dan lain-lain. Pertentangan sosial itu akan memacu warga masyarakat untuk mencari jalan keluar mengatasi situasi agar lebih baik lagi dengan mewujudkan perubahan-perubahan cara hidup yang baru.²⁰

Adapun faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar sistem kehidupan masyarakat yang meliputi (1) Pengaruh kebudayaan masyarakat luar dan (2) Invasi musuh atau peperangan. Pengaruh dari kebudayaan asing terjadi karena adanya interaksi langsung maupun tak langsung, satu arah maupun dua arah (dialogis) dengan kebudayaan lain sehingga mendorong kebudayaan setempat memiliki unsur-unsur baru yang menyebabkan munculnya cara hidup yang baru pula. Sedangkan peperangan yang terjadi antara satu komunitas dengan yang lainnya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa hancurnya sarana kehidupan dan infrastruktur yang relatif sudah berjalan lancar, sehingga menyebabkan merosotnya pola kehidupan yang sudah baik untuk selanjutnya akan diciptakan pola-pola baru yang lebih baik lagi.²¹

Proses Perubahan Sosial dan Teori-teorinya

Perubahan sosial itu pada umumnya mengikuti tiga tahapan, yaitu:

- 1) Pertama, adalah terjadinya invensi, yaitu proses dimana ide-ide baru

¹⁹ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), 103.

²⁰ Robby I. Chandra, *Konflik dalam Hidup Sehari-hari*, (Yogyakarta; Kanisius, 1992), 111.

²¹ *Ibid.*, 112.

diciptakan dan dikembangkan.

- 2) Kedua, yaitu tahapan difusi, yakni proses penyebaran atau proses pengkomunikasian ide-ide ke dalam sistem sosial).
- 3) Ketiga, yaitu tahap konsekuensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi.²²

Dari aspek sifat perubahan, terdapat dua bentuk perubahan sosial, yaitu perubahan secara evolusif dan perubahan yang revolusif. Dari dua corak perubahan itu muncul beberapa teori masing-masing. Basrowi, dalam bukunya, “memahami sosiologi”, mengutip Bohannon yang menegaskan, bahwa perubahan evolusi adalah perubahan yang lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat.²³ Perubahan ini berjalan secara alami, tanpa adanya perencanaan dan rekayasa sebelumnya. Hal ini disebabkan masyarakat yang secara spontan menginginkan penyesuaian-penyediaan cara hidupnya sesuai dengan kondisi dan situasi baru yang muncul sebagai bentuk pertumbuhan sosial.

Terdapat tiga macam teori perubahan evolusi, yaitu teori unilinear, *unilinear theory of evolution*, teori universal, *universal theory of evolution*, dan teori multilane, *multilined theory of evolution*.

Tokoh teori unilinier di antaranya adalah August Comte dan Herbert Spencer. Dalam pandangan teori ini, bahwasannya perubahan kehidupan masyarakat manusia itu berjalan secara bertahap, mulai dari hal yang kecil sederhana sampai pada bentuk yang kompleks yang pada akhirnya mencapai kesempurnaan kondisi sosial tersebut. Teori ini senada dengan teori siklus, *cyclical theory*, yang ditawarkan oleh Vilfredo, bahwa masyarakat manusia dan kebudayaannya berkembang dengan menapaki tahapan-tahapan yang berpola melingkar, teratur dan berulang. Kemudian, tokoh teori evolusi universal ini di antaranya juga adalah Herbert Spencer. Menurutnya, perkembangan sosial itu tidak harus mengikuti pola yang teratur dan tetap, baik linear maupun siklus. Tetapi, menurut teori ini, perkembangan

²² Rogers dan Shoemaker, dalam Muhammad Basrowi, *Memahami Sosiologi ...*, hal. 203

²³ Muhammad Basrowi dan Soenyono, *Memahami Sosiologi*, hal. 204

masyarakat, walaupun lambat, dapat bersifat radikal dan menyeluruh. Misalnya, adalah dapat berubah dari pola yang homogen menjadi masyarakat yang heterogen.

Adapun teori multilined menegaskan bahwa perkembangan masyarakat dapat diamati dengan teratur dengan memperhatikan bidang-bidang kehidupan sosial tertentu. Dengan demikian tahap-tahap perkembangannya dapat dilihat dengan cermat, misalnya, tentang aspek perkembangan ekonomi yang dipengaruhi oleh sistem pencaharian masyarakat; bidang politik yang dipengaruhi oleh pandangan tertentu, dan lain-lain.

Bentuk perubahan sosial yang kedua adalah perubahan yang bersifat revolusif. Artinya adalah perubahan yang berlangsung secara cepat seakan tidak ada kehendak yang matang sebelumnya. Dari perspektif sosiologis, dapat dikatakan, bahwa perubahan revolusi yaitu perubahan yang menyangkut unsur-unsur kehidupan sosial yang meliputi lembaga-lembaga dan struktur sosial yang berlangsung secara cepat. Perubahan macam ini dapat didahului dengan rencana sebelumnya, atau dapat juga tanpa adanya rencana sama sekali, lalu kemudian muncul ketegangan-ketegangan dan konflik yang serius dalam tubuh masyarakat yang sulit diselesaikan sehingga menjelma menjadi sebuah tindakan sosial berupa revolusi yang merupakan perubahan besar.

Karakteristik dari perubahan revolusi adalah; adanya proses yang cepat, artinya, bahwa peristiwa revolusi itu menampak sebagai sebuah emergensi yang terkait dengan kecepatan waktu, walaupun proses selanjutnya tetap membutuhkan waktu untuk menstabilkan kondisi; perubahan yang ada menyangkut sendi-sendi kehidupan sosial yang prinsip. Artinya, bahwa perubahan tersebut menyangkut nilai-nilai pokok kemasyarakatan, misalnya, di Inggris terjadi perubahan tata relasi sosial antara majikan dan buruh.

Dalam merespons perubahan itu, baik individu maupun masyarakat, secara kelembagaan, memiliki pola dan arah penyesuaian atau *adjustment* yang berbeda. Masyarakat, secara kelembagaan, berusaha membentuk sistem dan struktur kelembagaan yang sesuai dengan situasi kontemporer yang telah berubah itu, baik dengan menambah unsur-unsur baru maupun mengurangi

yang tidak relevan lagi. Sedangkan individu, maka lebih menuju pada upaya untuk menyesuaikan diri, *adjustment*, pada sistem, norma, dan institusi sosial yang sudah berubah itu untuk mencapai keharmonisan psikologis dan sosiologis.

Latihan

1. Apa yang saudara ketahui tentang perubahan sosial?
2. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial!
3. Jelaskan pola-pola atau bentuk-bentuk perubahan sosial!
4. Jelaskan macam-macam teori perubahan sosial dan tokoh-tokohnya!

Paket 3

TEORI-TEORI DALAM MEMAHAMI MASALAH SOSIAL

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket ini difokuskan pada upaya memberikan pendalaman wawasan mengenai cara-cara memahami masalah sosial bagi mahasiswa-wi. Sebab, masalah atau problema sosial itu bukan merupakan sesuatu yang sudah tertakdirkan oleh alam, tetapi sebagai dampak dari berbagai faktor sosial-budaya, seperti mindset berpikir masyarakat, unsure-unsur kelembagaan sosial beserta fungsi-fungsinya, dan lain-lain. Oleh sebab itu, pemahaman tentang konsep-konsep teoritik tentang masalah sosial, pendekatan terhadap masalah sosial, serta perspektif ilmu yang membantu pemahaman masalah sosial menjadi penting ditekankan. Tentu saja, bahwa materi paket ini sangat membantu pada pemahaman terhadap materi-materi berikutnya terutama tentang disorganisasi sosial.

Sebelum perkuliahan dilangsungkan maka dosen memberikan pancingan materi yang tertulis dalam powerpoint yang akan ditampilkan dalam slide agar mejadi dasar pemahaman untuk melakukan pendalaman selanjutnya. Mahasiswa diharuskan memahami slide dan berkesempatan berdiskusi dengan teman-temannya di kelas untuk memperoleh gambaran yang lebih segar mengenai realitas masalah sosial beserta kemungkinan-kemungkinan teori yang dapat dikembangkan untuk meahaminya lebih lanjut.

Oleh sebab itu, dalam dalam pembelajaran paket ini, media pembelajaran menjadi sangat penting disediakan, yaitu meliputi LCD, Laptop, spidol, dan kertas plano beserta solasi perekatnya untuk menampilkan hasil diskusi.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswa mampu mendeskripsikan teori-teori masalah sosial

Indikator

Setelah perkuliahan berakhir diharapkan mahasiswa-wi dapat:

1. Menjelaskan konsep *Social Body* (memahami tubuh sosial).
2. Menjelaskan konsep masalah sosial dari perspektif anatomi sosial.

3. Menerangkan teori dan perspektif tentang Masalah Sosial.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Konsep *Social Body* (memahami tubuh sosial)
2. Konsep masalah sosial dari perspektif anatomi sosial
3. Teori dan Perspektif tentang Masalah Sosial

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (15menit)

1. *Brainstorming*, tukar wawasan tentang konsep *social body*, serta mengamati slide tentang masalah sosial dengan tayangan gambar-gambar tentang masalah sosial.
2. Komentar dari mahasiswa-mahasiswi atas masalah sosial yang ditayangkan.

Kegiatan inti (70 menit)

1. Mengelompokkan mahasiswa-wi menjadi tiga (3) group.
2. Masing-masing group mendiskusikan tema dan sub tema tentang, yaitu:
Group ke 1 tentang konsep *Social Body*.
Group ke 2 tentang konsep masalah sosial dari perspektif anatomi sosial.
Group ke 3 tentang teori dan perspektif tentang Masalah Sosial
3. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok ke depan kelas.
4. Setiap selesai presentasi satu kelompok diadakan dsikusi dan Tanya-jawab.
5. Pemantapan dan penguatan hasil diskusi oleh dosen pengampu.
6. Pemberian kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk mengklarifikasi hasil diskusi atau menanyakan hal yang belum terbahas dalam diskusi.

Kegiatan Penutup (10menit)

1. Penyimpulan hasil perkuliahan
2. Memberikan semangat belajar lebih lanjut dan mendalami materi
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa/wi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5menit)

1. Memberikan tugas latihan
3. Mempersiapkan perkuliahan berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) tentang *social body* dan masalah sosial dari perspektif anatomi social dan teori dan perspektif masalah sosial.

Tujuan

Agar mahasiswa-wi dapat membuat susunan pemahaman yang sistematis tentang *social body*, masalah sosial, dan teori-teori serta perspektifnya melalui kreatifitas pengungkapan ide, dan dari ide-ide yang parsial dari beberapa mahasiswa-wi tersebut terkonstruksi konsep yang utuh dan menjadi definisi yang adekuat tentang masalah sosial dalam suatu *mindmapping*.

Bahan dan Alat

Kertas plano, Spidol berwarna, dan Solasi penempel.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing lima (5) menit!
7. Berikan tanggapan dan klarifikasi terhadap presentasi yang selesai dilakukan!

Uraian Materi

BODI SOSIAL DAN TEORI-TEORI MASALAH SOSIAL

Masyarakat sebagai sebuah *socio-organism* (konsep *Social Body*)

Sebagai sebuah entitas, masalah sosial merupakan kondisi yang melekat pada tubuh masyarakat dan merupakan efek dari dinamika sosial itu sendiri. Setiap masyarakat selalu memiliki masalahnya sendiri-sendiri yang bervariasi. Tidak ada satu masyarakat pun, baik tradisional maupun modern, yang terbebas dari masalahnya baik besar maupun kecil.

Para ahli patologi/masalah sosial, tampaknya, berusaha mendefinisikan

masalah sosial dengan redaksi dan penekanan yang berbeda-beda. Hal demikian menunjukkan betapa kompleksnya masalah sosial itu. Kartini Kartono merumuskan dua proposisi tentang pengertian masalah sosial; *Pertama*, masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat dimana adat istiadat tersebut memang sengaja diperuntukkan bagi masyarakat agar terjalin kesejahteraan hidup bersama yang stabil-harmonis. *Kedua*, masalah sosial yaitu kondisi sosial yang oleh sebagian besar warga masyarakat dianggap sebagai terganggu dan tidak dikehendaki secara bersama serta merugikan kehidupan masyarakat.²⁴

Pandangan Kartini tentang masalah sosial, sebagaimana definisi di atas, tampaknya terfokus pada kondisi dan atau situasi sosial dimana warga masyarakat mengalami kendala untuk mencapai dan memperoleh kebutuhan-kebutuhannya secara normal, dan kendala itu disebabkan oleh faktor perilaku individu dan atau sekelompok warga masyarakat. Dengan demikian, tolok ukur dari masalah sosial tersebut adalah nilai dan norma sosial dalam kesatuan struktur sosial.

Menurut St. Vembriarto, bahwa masalah sosial merupakan fase awal dari patologi sosial, yakni, keadaan masyarakat yang sakit dikarenakan dinamika sosial yang tidak stabil. Menurutnya, masalah sosial adalah suatu kondisi atau proses dalam masyarakat yang jika dilihat dari suatu segi adalah tidak dikehendaki dan tidak diinginkan oleh warga masyarakat.²⁵ Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dipahami, bahwa masalah sosial itu muncul ketika individu sukar mendapatkan kebutuhannya baik dari aspek fisik-materiil maupun psiko-sosiologis. Oleh karena itu, menurutnya, untuk mencapai kondisi ideal dan harmonis maka dibutuhkan adanya perubahan kontinyu yang seimbang dan stabil. Dalam persoalan itu, Sapari Imam Asy'ari, dalam bukunya patologi sosial, tampaknya mensinyalir bahwa kondisi ideal masyarakat yang juga dapat disebut normal adalah jika masing-masing warga dapat mencapai kebutuhan yang diinginkan. Masalah sosial dalam konteks demikian tidak akan

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, 2

²⁵St. Vembriarto, *Pathology Sosial*, hal. 8

dapat dihindarkan karena masing-masing orang memiliki kebutuhannya masing-masing yang harus diperolehnya, dan peluang untuk mencapai kebutuhan itulah yang menjadi sumber dan faktor dari masalah sosial.²⁶

Earl Rubington dan Martin S. Weinberg mengutip pandangan sosiolog bahwa masalah sosial atau *social problems* adalah *an alleged situation that is incompatible with the value of significant number of people who agree that action is needed to alter the situation.*²⁷ Artinya, masalah sosial, yaitu sebuah kondisi tercela yang bertentangan dengan nilai utama warga masyarakat dimana menginginkan adanya tindakan untuk mengubah situasi tersebut.

Menurut pendapat di atas bahwa yang menjadi tolok ukur dari suatu kondisi yang disebut sebagai problem sosial adalah penilaian warga masyarakat dan kadar penerimaan mereka pada suatu kondisi atau tingkah laku tertentu di tengah kehidupan.

Teori dan Perspektif tentang Masalah Sosial

Dalam konteks pembangunan masyarakat, masalah sosial penting untuk dikaji, karena ia dapat menjadi sebuah penghambat yang mengganggu segala upaya pembangunan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mencermati masalah sosial dengan berbagai perspektif. Dalam pandangan sosiologi terdapat tiga teori untuk melihat masyarakat, yaitu; teori fungsional-struktural, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik. Teori-teori tersebut dapat dipergunakan untuk melihat bagaimana masalah sosial itu terjadi dan apa faktor-faktornya?

1) Teori Struktural-Fungsional

Teori ini dikembangkan dengan paradigma fakta sosial yang menegaskan bahwa sosiologi tidak dapat mendudukan dunia ide sebagai pokok persoalan studi. Teori-teori yang dihasilkan dari belakang meja harus dapat diuji dan dibuktikan dengan realitas yang ada, yakni dengan melakukan

²⁶ Sapari Imam Asy'ari, *Patologi Sosial*, (Surabaya. Penerbit Usaha Nasional, tt), 28.

²⁷ Earl Rubington s. Weinberg, *The Study of Social Problems*, (New York: Oxford University Press, 1981), 4

penelitian empirik.

Dalam paradigma fakta sosial ini, yang dinyatakan sebagai fakta sosial adalah struktur dan pranata sosial dimana berada dalam suatu sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen yang saling menyatu dalam keseimbangan. Elemen- elemen itu dapat berjaln sistematis karena memiliki fungsi-fungsinya sendiri sehingga masing-masing adalah fungsional terhadap yang lainnya. Kalau tidak, maka struktur tersebut tidak akan terjadi, dan kalaupun ada maka akan hilang sendiri.

August Comte, berdasarkan teori ini, menegaskan bahwa, masyarakat memiliki kesamaan dengan organisme hidup. Ia, disamping memiliki sifat statika, juga memiliki karakter dinamika. Oleh karena itu, sebenarnya, studi sosiologi pada pokoknya adalah studi terhadap segi statika yang disebut struktur sosial dan fungsi-fungsi dari elemen sosial yang menyebabkan terciptanya dinamika yang harmonis bagi sebuah sistem dinamika kehidupan sosial.²⁸ Herbert Spencer, lebih lanjut, menegaskan, bahwasannya terdapat sisi persamaan dan perbedaan antara sistem hidup organisme biologis dan sistem kehidupan/keberlangsungan sosial, *sosial sustainability*. Persamaannya ialah bahwa keduanya memiliki dinamika pertumbuhan karena elemen-elemen yang ada, tiap-tiap bagian/elemen yang ada memiliki fungsi masing-masing dan tujuan tertentu, masing-masing perubahan dan pertumbuhan elemen akan mempengaruhi elemen yang lainnya.²⁹ Namun demikian, terdapat sisi perbedaan, bahwa kalau sistem organisme biologis dapat dipelajari dan dilihat dengan jelas pengaruh dan hubungan elemen- elemennya, sedangkan sistem sosial tidak dapat dilihat dan diukur secara kuantitatif.³⁰ Akibat dari perbedaan itu adalah jelas, bahwa struktur sosial menjadi sesuatu yang sangat rumit dan bersifat kualitatif, berbeda dengan struktur biologis pada sebuah organisme.

Dalam konteks demikian, maka masalah sosial itu timbul ketika

²⁸ Turner. Jonathan H, *The Structure of Sociological Theory*, (Chicago: the Dorsey Press, 1986),

²⁹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), 24.

³⁰ Ibid. Perlu dipahami di sini, bahwa analogi antara struktur sosial dengan struktur organisme seperti itu memunculkan satu istilah *human body* sebagai diartikan dengan organisme biologis dan *human society* yang berarti susunan tubuh masyarakat.

individu, sebagai elemen dan sistem sosial, tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem kehidupan sosial yang ada. Kondisi demikian identik dengan tubuh-fisik organisme yang sakit karena terdapat elemen yang gagal menjalankan fungsinya yang akan mengganggu elemen-elemen yang lain.

Teori ini melihat masalah sosial sebagai sebuah gangguan organisme sehingga istilah yang dipergunakan adalah patologi sosial. Patologi sosial menganggap, bahwa elemen-elemen masyarakat yang tidak dapat beradaptasi merupakan suatu penyakit, *pathos*, yang harus diobati dan disembuhkan agar dapat mengembalikan kondisi masyarakat menjadi sehat. Dengan demikian, patologi sosial yang lebih menampakkan corak *medical approach* itu menjadi sebuah perspektif terhadap masalah sosial.³¹

Disamping itu, teori struktural-fungsional melihat masalah sosial sebagai sebuah gejala disorganisasi atau disintegrasi, sehingga perspektif yang dipergunakan adalah disorganisasi sosial, *social disorganization*. Perspektif ini memiliki prinsip yang sama dengan perspektif patologi sosial dalam melihat masyarakat sebagai sebuah organisme/*human organism*. Perbedaannya adalah kalau patologi sosial melihat masyarakat yang bermasalah sebagai sebuah masyarakat yang sakit, sedangkan disorganisasi sosial melihatnya sebagai masyarakat yang tidak menyatu (*not integrated*) karena adanya fungsi-fungsi dari elemen sosial yang tidak menyatu secara harmonis.

Ketidakmenyatuan (disintegasi) unsur-unsur kelompok sosial itu dikarenakan tidak adanya ikatan kokoh dan efektif yang mampu menyatukan fungsi-fungsi sosial yang ada dalam kerangka menegakkan sistem sosial yang telah terjalin. Untuk memahami masalah sosial secara cermat dalam perspektif disorganisasi sosial diperlukan pemahaman tentang pengertian *social organization* sebagai pembanding dan standar memahami kondisi disorganisasi sosial tersebut. Langkah yang dapat dipergunakan dalam mengatasi masalah

³¹ Perspektif ini memang sempat menjadi bahan perdebatan para ahli ilmu sosial. Ada yang menyetujui istilah itu dipakai dengan tujuan memudahkan proses identifikasi untuk kepentingan diagnosis dan treatment lebih lanjut sebagaimana dunia medis. Namun, ada juga yang menolaknya karena terkesan memaksa untuk menyamakan kehidupan manusia dengan fisik biologis yang bersifat eksak. Sementara itu, masyarakat tidak sesederhana itu, dan istilah patologi itu akan mengarah pada persepsi yang a humanis, karena manusia dilihat sebagai sebuah penyakit dan sampah bagi sesamanya.

sosial menurut perspektif ini adalah membangun sistem sosial. Sistem sosial sendiri ditegakkan dengan mewujudkan proses sosial melalui penguatan nilai dan pemberlakuan norma-norma, *customery activity*,³² untuk mewujudkan bangunan sistem sosial yang teratur menjadi sebuah *social ordered*.

Teori struktural fungsional juga memunculkan perspektif lain terhadap masalah sosial yaitu perspektif perilaku menyimpang. Perspektif ini menyoroti elemen sosial yang disebut dengan pranata sosial.

Dalam perspektif paradigma fakta sosial, pranata sosial merupakan realitas sosial yang menentukan tegaknya bangunan atau sistem sosial itu sendiri. Pranata sosial tersebut ditegakkan oleh kelompok masyarakat dan mendapatkan kontrol yang ketat, misalnya, berbentuk norma aturan yang melarang dan atau mewajibkan perilaku tertentu dari warga masyarakat, dan bahkan ditegakkan pula sanksi bagi yang melanggar pranata tersebut.³³ Pranata sosial penting adanya dalam kerangka mewujudkan tata karma berinteraksi antar individu dan kelompok sosial. Oleh karena itu, anggota masyarakat harus mempelajari, memahami dan mengetahui aturan sosial yang ada, dan upaya demikian disebut dengan sosialisasi.³⁴ Di samping itu, norma, nilai dan aturan sosial tentu mengalami penambahan dan perkembangan seiring dengan situasi dan kondisi yang dinamik. Karena itu, transformasi nilai dan norma sosial itu tidak dapat dihindari. Maka itu pula, maka transfer norma sosial dari satu generasi ke generasi selanjutnya merupakan kelaziman sosial. Jadi, dalam kerangka sosialisasi dan pemahaman terhadap nilai dan norma sosial itulah maka individu berupaya untuk dapat menyesuaikan diri, *adjustment*, terhadap norma yang berlaku itu.

Dengan asumsi demikian, maka masalah sosial dalam perspektif perilaku menyimpang adalah terjadi karena terdapatnya penyimpangan perilaku dari berbagai aturan dan norma masyarakat yang berlaku. Jadi, penyimpangan perilaku itulah yang menjadi sumber dan masalah sosial.

Dalam melihat penyimpangan perilaku maka hal yang menjadi tolok ukur

³² Soetomo, *Masalah Sosial dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Jaya, 1995), 26

³³ Soerjono Soekamto, *Sosiologi Penyimpangan*, (Jakarta: Rajawali, 1998), 1

³⁴ Soetomo, *Masalah Sosial*, hal. 28

adalah pranata sosial. Pranata ini dapat berfungsi sebagai jalur yang harus dilalui oleh warga masyarakat dalam konteks interaksi antara mereka. Penyimpangan dari pranata itu memiliki dua bentuk, yaitu penyimpangan murni dan penyimpangan terselubung.³⁵ Penyimpangan murni adalah perilaku yang tidak mentaati aturan yang disepakati oleh pihak lain, sedangkan penyimpangan tersembunyi adalah perilaku yang menyimpang tetapi tidak ada kesepakatan pihak lain terhadap perbuatan tersebut dan tidak ada reaksi, seolah tidak ada masalah.

2) Teori Konflik

Teori ini tampaknya berseberangan dengan teori struktural-fungsional di atas, walaupun berada dalam spektrum paradigma sosiologi yang sama yaitu paradigma fakta sosial. Ada tiga poin perbedaan antara keduanya; *Pertama*, teori struktural-fungsional berasumsi, bahwa masyarakat itu berada dalam kondisi statis, stabil dan bergerak dalam koridor struktur sosial yang telah mapan. Sementara itu, teori konflik berasumsi bahwa masyarakat itu senantiasa berada dalam proses berubah ditandai dengan adanya pertentangan-pertentangan antar elemennya secara terus menerus.³⁶ *Kedua*, menurut teori struktural, masing-masing elemen masyarakat itu berperan mendukung tegaknya norma dan aturan sosial demi menginginkan stabilitas sosial, sementara, teori konflik berasumsi bahwa setiap elemen sosial itu berperan untuk menciptakan instabilitas dan disintegrasi. *Ketiga*, teori struktural-fungsional meyakini, bahwa warga masyarakat terikat secara informal dengan norma, aturan sosial, dan nilai hidup yang berlaku dalam satu bangunan masyarakat, sedangkan teori konflik membuat masyarakat cenderung membebaskan diri dari norma dan aturan yang ada, karena mereka memahami bahwa nilai, norma, dan aturan itu merupakan kepentingan dari pihak yang menduduki status sosial yang tinggi.³⁷

Perbedaan asumsi dasar tentang realitas sosial itu, tentu menyebabkan terjadinya perbedaan dalam melihat masalah sosial, *social problems*. Harus

³⁵ Soekamto, Sosiologi Penyimpangan, hal. 19

³⁶ Franz Magnis suseno, "Faktor-Faktor yang mendasari Terjadinya Konflik", dalam "Konflik Komunal di Indonesia saat Ini", (Jakarta; INIS dan Pusat Bahasa dan Budaya, 2003), 122

³⁷ George Ritzer, *Sociology Theory*, (New York: The McGraw-Hill, Inc., 1996, 54

dimaklumi, bahwa teori konflik melihat, bahwa yang menjadi fakta sosial yang harus dijadikan titik utama dan konsep sentral studi sosiologi adalah konsep **wewenang/kekuasaan** dan **posisi sosial**. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi sebab munculnya konflik dan pertentangan sosial.³⁸ Perbedaan wewenang merupakan tanda adanya variasi posisi dalam masyarakat dan sebagai implikasi dari distribusi itu, yaitu terwujudnya status dan strata sosial yang secara jelas membagi manusia selaku warga masyarakat berdasarkan posisi, sehingga ada person yang menduduki kelas bawah dan ada yang menduduki kelas atas. Dengan demikian, muncullah asumsi, bahwa masyarakat itu sebetulnya merupakan persekutuan yang terkoordinir secara paksa oleh penguasa dan pemegang kekuasaan sosial, sehingga didapatkan di dalamnya suatu pertentangan antar kelompok dalam strata dan posisi yang berhadapan dalam masyarakat.

Golongan pemegang kuasa tertinggi dan setingkatnya berkeinginan untuk menciptakan stabilitas sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku agar tetap menduduki wewenang dan kekuasaan dengan stabil. Kelompok ini lazim disebut dengan kelompok **status quo**, sedangkan kelompok bawah yang cenderung dikuasai cenderung menginginkan perubahan-perubahan, misalnya, menyangkut sistem dan struktur Sosial, terkait dengan pencapaian status dan posisi yang diinginkan. Kondisi demikianlah yang selanjutnya melembaga dan memanifes ke permukaan menjadi sebuah bentuk konflik.

Konflik merupakan bentuk disharmoni sosial dimana menjadi sebuah masalah bagi sebuah struktur sosial. Namun demikian, tidak selalu benar kalau konflik itu menimbulkan dampak yang negatif-disfungsional seperti perang dan pengrusakan (konflik fisik). Lewis A. Coser menjelaskan, bahwa sebenarnya konflik dapat bersifat fungsional-positif disamping negatifnya. Ia berdampak fungsional-positif ketika menyebabkan penguatan dan intimitas kelompok. Sebaliknya, akan berdampak negatif ketika bergerak melawan struktur dan

³⁸ W.F.G. Mastenbroke, penanganan Konflik dan pertumbuhan organisasi, terj. Pandam Guritno (Jakarta; UI Press, 1986), 211-212

menyerang nilai inti sosial.³⁹

Konflik dapat memberi sumbangan terhadap intergasi, begitu pula integrasi dapat berpotensi memunculkan konflik. Dalam kaitan ini, maka terdapat empat fungsi konflik, yaitu:

- (1) sebagai alat untuk memelihara solidaritas
- (2) membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain
- (3) mengaktifkan peranan individu yang semula terisolir.⁴⁰

Dari aspek elemen sosial, terdapat dua macam konflik, yaitu konflik nilai dan konflik institusional. Konflik nilai timbul karena adanya nilai yang rapuh, atau masuknya nilai baru yang belum dapat diterima oleh masyarakat sehingga memerlukan proses penerimaan dan penguatan lebih lanjut. Sedangkan konflik institusional yaitu disebabkan oleh keberadaan struktur yang longgar sehingga relasi dan distribusi kuasa belum dapat menciptakan ketentraman. Konflik ini terkembali pada bentuk atau tubuh sosial itu sendiri.

Menurut perspektif konflik nilai, bahwa pandangan patologi sosial tentang masalah sosial yang dikategorikan sebagai kondisi *sickness* dan *sosial expectation* adalah sangat subjektif sehingga sangat sulit untuk dijadikan referensi dalam upaya memahami masalah sosial. Untuk ini dapatlah ditegaskan, bahwa penyimpangan terhadap peraturan tidak selalu sama dengan kegagalan dari peraturan tersebut dalam mengendalikan kehidupan bermasyarakat.⁴¹ Dalam perspektif konflik nilai ini, masalah sosial terjadi ketika ada dua kelompok atau lebih dengan nilai berbeda yang dipergunakan menjadi saling bertemu dan berkompetisi. Namun begitu, masalah sosial tidak akan timbul apabila pihak yang kuat bersedia untuk berkorban untuk kepentingan yang lemah, artinya, terjadilah kompromi.

Perspektif konflik institusional melihat masalah sosial itu disebabkan oleh masyarakat sendiri ketika mereka melakukan aktivitas yang merugikan dan melanggar aturan norma yang menjadikan tegakkan bangunan sosial. Di sini terdapat dua pendapat; *Pertama*, yaitu berdasarkan pendekatan *the person blame*

³⁹ Lewis A. Coser, *The Function of Social Conflict* (New York The Free Press, 1956,

⁴⁰ Soetomo, *Masalah Sosial*, hal. 35.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 138.

approach. Pendekatan ini mencari sebab masalah sosial dari segi cacat yang ada pada individu, baik berupa pembawaan maupun disebabkan faktor sosiokultural. *Kedua*, yaitu pendekatan *social system blame approach*. Pendekatan ini mencari penyebab atau latar belakang masalah sosial dari segi cacat yang ada pada sistem, struktur, dan institusi sosial. Pendekatan kedua ini tampaknya lebih mendapat tekanan kuat dari studi masalah sosial dengan perspektif konflik institusional. Pemecahan masalah sosial dalam hal ini harus dikembalikan pada upaya membenahi struktur dan sistem yang ada, dan yang tanpa demikian maka *treatment* yang dilakukan hanya bersifat tambal sulam saja.

Penanganan masalah sosial akan efektif pula dengan mendorong terbentuknya masyarakat dengan struktur baru yang lebih memberikan jaminan atas pemerataan penguasaan power, *resources*, dan fungsi-fungsi sosial yang lebih adil.⁴² Dengan terbentuknya struktur yang baru ini diharapkan seseorang yang tadinya mengalami hambatan struktural dapat melakukan upaya pemenuhan berbagai kebutuhan dasarnya secara lebih memuaskan.

3) Teori Interaksionisme-simbolik

Dalam sosiologi, teori interaksionisme simbolik muncul dari paradigma definisi sosial. Konsep utama dalam teori ini adalah *social action*.⁴³ Disamping itu, konsep interpretasi dari suatu tindakan juga penting diketahui. Pada prinsipnya, asumsi dasar teori ini adalah bahwa manusia itu pada prinsipnya adalah makhluk yang aktif dan kreatif dalam tindakannya, bukan seperti anggapan teori strukturalis-fungsional yang menganggap tindakan manusia itu dikontrol dan dibatasi oleh norma dan nilai-nilai sosial secara ketat. Demikian pula, berbeda dengan asumsi dari paradigma perilaku sosial yang memandang tindakan/perilaku manusia senantiasa diarahkan oleh fungsi-fungsi power dan kekuasaan (*reinforcement behavior*). Manusia, dalam teori interaksionisme simbolik, menurut Blumer, memiliki kemampuan *self indication*, yakni

⁴²Ibid hal 190.

⁴³ Term *social action* ini muncul dari pikiran Weber dimana berarti "tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna dan arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan bagi tindakan orang lain dalam bingkai struktur dan atau sistem sosial". Periksa Ritzer. *Sociology Theory*, hal. 264

mengetahui sesuatu, menilainya, memberikan makna atasnya, serta memikirkan untuk bertindak berdasarkan makna yang dibuatnya itu.

Tegasnya, manusia dilihat sebagai aktor yang sadar dan reflektif atas tindakannya.⁴⁴ Dalam konteks kehidupan sosial, manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya, bukan sekedar reaksi **belaka** berdasarkan prinsip stimulus-respon seperti pandangan teori behaviorisme yang kaku. Tanggapan manusia tidak dibuat secara langsung, tetapi didasarkan pada makna yang diberikan pada tindakan orang lain tersebut.

Berdasarkan prinsip-prinsip teori interaksionisme-simbolik Maka dalam memandang masalah sosial muncul *dua perspektif, yaitu labeling* dan perspektif *sociopathic behavior*

(1) Perspektif *labeling*

Kalau perspektif lain, seperti structural fungsional, memandang masalah sosial semisal kemiskinan, kenakalan remaja, kejahatan, dan lain-lain dengan mempersolkan mengapa dan dalam kondisi seperti apa hal itu terjadi? Seakan-akan sudah memiliki dasar dan standar baku tentang wujud dari masalah sosial itu sehingga tampak bersifat obyektif. Maka perspektif *labeling* tidak demikian, bahwasanya masalah sosial, adalah subyektif adanya. Dengan demikian, perspektif ini cenderung mempertanyakan mengapa dan dalam kondisi bagaimana tindakan atau situasi tertentu itu didefinisikan sebagai masalah sosial dan penyimpangan.⁴⁵ Sebuah tindakan atau situasi disebut sebagai masalah sosial adalah bersifat relatif, tergantung dari interpretasi masyarakat, atau tergantung pada pemaknaan masyarakat terhadap tindakan itu. Sebagai contoh, perilaku homoseks, oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai penyimpangan dan menjadi sebuah masalah sosial, namun oleh masyarakat yang lain boleh jadi dianggap sebagai sesuatu yang wajar saja.

Yang menjadi persoalan pokoknya di sini adalah bagaimana masyarakat merespons tindakan itu, bukannya bagaimana kok mereka melakukan tindakan menyimpang seperti itu? Dalam kasus seperti itu dapat dimaklumi, bahwa

⁴⁴ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*.

⁴⁵ Joseph Julin and Willian Kornbluin, *Sosial Problems*.(New Jersey: Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, 1986), 14.

reaksi masyarakat adalah hasil dan interpretasi masyarakat terhadap tindakan atau situasi tersebut. Jadi, masalah sosial menurut perspektif *labeling* adalah suatu kondisi, dimana di dalamnya, tingkah laku atau situasi tertentu didefinisikan oleh masyarakat sebagai sebuah **masalah sosial**. Secara tegas, Parrillo mengatakan, bahwa perspektif *labeling* menggambarkan bagaimana seseorang dilabeli atau dinilai sebagai penyimpang atau sakit secara mental atau sosial? Tegasnya, bagaimana kok dia disebut sebagai *delinquent*? Dengan demikian, menjadi jelas, bahwa masalah sosial merupakan hasil negosiasi dari suatu proses panjang sampai masyarakat mendefinisikan tindakan dan situasi tertentu sebagai masalah sosial.

Dalam perspektif *labeling* dapat saja terjadi perbedaan interpretasi antara si aktor dan masyarakat terhadap sebuah tindakan tertentu. Hal itu disebabkan oleh karena perbedaan referensi dan juga perbedaan kerangka pengalaman masing-masing individu si aktor dan masyarakat. Sebagai contoh yang baik adalah keberadaan sekelompok atau individu yang mengalami kekaburan norma dan pranata dalam masyarakat, sementara itu, yang bersangkutan sudah pernah terlibat mengikuti proses panjang dalam berinteraksi dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian, maka terjadi saling mendefinisikan antara individu, aktor sendiri dan masyarakat. Aktor mungkin menganggap perilakunya wajar, sementara, masyarakat memaknainya sebagai tindakan menyimpang.

Selanjutnya, dalam proses berinteraksi, aktor yang dilabeli sebagai penyimpang atau *deviant* oleh masyarakat dapat mengambil pelajaran dari label tersebut dengan cara menyesuaikan diri dengan kondisi dirinya, *self identifying*. Dengan cara itu maka terjadi proses belajar dari seseorang untuk dapat menyesuaikan diri dengan harapan dan kemauan masyarakat melalui interaksi sosial terus menerus. Namun demikian, tidak semua masalah sosial dalam perspektif ini terjadi karena adanya perbedaan interpretasi tindakan antara individu dengan masyarakat, tetapi sebaliknya, masalah sosial dapat terjadi walaupun terdapat kesamaan interpretasi atas suatu tindakan antara individu dengan masyarakat tersebut. Hal ini terjadi jika label yang disepakati itu berlanjut pada sebuah upaya menetapkan identitas atau status diri yang

berkelanjutan dengan tindakan atas dasar identitas diri si aktor tersebut.

Persamaan interpretasi yang berujung pada sebuah penguatan atau pelembagaan penyimpangan itu memunculkan sebuah tradisi menyimpang yang telah melembaga, *deviant sub-culture*, dari pada kondisi tertentu, juga dapat fungsional terhadap kehidupan sosialnya. Kasus demikian dapat terilustrasikan dari kelompok prostitusi yang telah terlokalisasi dan hidup di tengah komunitas yang lebih luas lagi.

Upaya untuk memecahkan masalah sosial dengan perspektif *labeling* ini adalah dapat ditempuh melalui redefinisi dari tindakan atau situasi yang dianggap menyimpang dan menjadi masalah sosial. Perubahan definisi oleh aktor terhadap tindakan sosial tertentu akan mempengaruhi interpretasinya dan selanjutnya dapat mempengaruhi bagaimana ia memberi makna terhadap tindakannya. Perubahan interpretasi tersebut dapat mengakibatkan seseorang yang tadinya melakukan tindakan menyimpang menurut definisi masyarakat akan menghentikan tindakannya.

Dalam hal treatment seperti ini terdapat dua pandangan: *Pertama* adalah pandangan yang menganggap perlu adanya intervensi dari luar pada individu agar mendorong perubahan interpretasinya dengan memberikan input padanya sebagai referensi untuk melakukan interpretasi. *Kedua*, pandangan yang cenderung menyerahkannya pada proses kehidupan sosial secara alami. Dalam hal ini individu diharapkan mampu mendapatkan masukan-masukan dari hasil interaksinya dengan masyarakat untuk membenahi perilakunya sendiri.

(2) Prespektif *Behavior- Sociopathic*

Prespektif ini tampaknya identik dengan prespektif *labeling* di atas. Prespektif ini dibangun untuk melengkapi kekurangan teori structural-fungsional yang mendefinisikan sebuah perilaku menyimpang berdasarkan standart dari norma dan pranata sosial. Definisi tersebut kabur ketika masyarakat menjadi kompleks dan mengalami proses perubahan yang cepat, sehingga muncul beberapa nilai yang berbeda yang satu sama lain saling bertentangan. Dalam kondisi demikian, nilai dan norma sosial menjadi sulit untuk diimplementasikan, karena sifatnya yang relatif. Selain itu timbul

kekaburan, siapa yang berkompoten menetapkan ukuran normalitas sebuah tingkah laku, sebagaimana yang dilakukan dengan prespektif *labeling*. Oleh sebab itu, perilaku menyimpang haruslah dilihat secara relatif pula.

Lemert merumuskan beberapa asumsi tentang masalah sosial berdasarkan prespektif ini. yaitu bahwa:

- 1) Terdapat berbagai pola dan ciri khusus dan tingkah laku manusia, dan sejumlah penyimpangan dengan ciri-ciri tersebut dapat diidentifikasi dan digambarkan pada situasi khusus menurut waktu dan tempat.
- 2) Deviasi/penyimpangan tingkah laku itu merupakan fungsi dari konflik kebudayaan yang menempatkan diri melalui organisasi sosial.
- 3) Setiap deviasi akan mendapatkan reaksi masyarakat yang bergerak dari penilaian sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju.
- 4) Perilaku sosiopathik adalah deviasi yang menimbulkan akibat reaksi yang tidak setuju dari masyarakat.
- 5) Pribadi yang menyimpang adalah seseorang yang peranan, status, fungsi dan pemahaman tentang dirinya ditentukan oleh seberapa jauh dia menyimpang, tingkat visibilitas sosial, sikap dan penampilannya terhadap reaksi masyarakat dan oleh sifat reaksi masyarakat.
- 6) Ada pola-pola pembatasan dan pembebasan dalam partisipasi sosial deviant yang berhubungan langsung dengan status, peranan, dan pemahaman dirinya.
- 7) Penyimpangan-penyimpangan tersebut diindividuasikan berdasarkan kepekaannya terhadap reaksi masyarakat oleh karena: *Pertama*, pribadi bersifat dinamik. *Kedua*, ada penstrukturan dalam setiap kepribadian yang bekerja sebagai perangkat pembatas dimana reaksi sosial berpengaruh.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, menjadi jelas, bahwa identifikasi terhadap masalah sosial itu dilihat dari reaksi masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan adanya masalah sosial itu, walaupun sebetulnya reaksi itu merupakan hasil interpretasi terhadap suatu tindakan atau situasi. Dapat dikatakan bahwa terdapat kemungkinan di dalam masyarakat tertentu bahwa suatu tindakan itu dinilai sebagai masalah, sementara dalam masyarakat yang lain tidak. Perbedaan ini disebabkan oleh referensi yang dimiliki.

Disamping itu, reaksi masyarakat akan ditentukan pula oleh taraf visibilitas sosial. Visibilitas sosial adalah suatu kondisi tertentu yang menjelaskan sebuah tindakan penyimpangan. Ada suatu tindakan yang tidak mampu dilihat oleh masyarakat karena adanya upaya deviant untuk menutupinya. Sementara itu terdapat pula tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan secara terbuka. Dalam konteks itu interpretasi masyarakat menjadi tergantung dari tampak tidaknya sebuah tindakan, sehingga penyimpangan itu memiliki dua kategori yaitu *overt* dan *covert*.

Dari perspektif aktor penyimpangan terdapat dua pola penyimpangan, yaitu: penyimpangan **primer** dan penyimpangan **sekunder**. Penyimpangan primer adalah apabila sebuah tindakan deviasi dirasionalisasikan atau dipandang sebagai fungsi-fungsi dari peranan sosial yang dapat diterima. Ketika perilaku tersebut diulangi dan memiliki visibilitas sosial yang tinggi kemudian memperoleh reaksi masyarakat yang cukup kuat sehingga melalui proses identifikasi dijadikan sebagai bagian dari “aku” si aktor, maka kemungkinan besar akan terjadi sebuah kondisi bahwa integrasi peranan-peranan yang ada menjadi retak dan mengakibatkan reorganisasi berdasarkan peranan-peranan baru.

Dengan adanya organisasi yang terbentuk itu berlanjutlah tanggapan bahwa perilakunya itu menampakkan hal yang wajar atau juga muncul sebuah anggapan, bahwa penyimpangan yang terorganisir itu menjadi sebuah peranannya yang bersifat khusus. Dengan demikian, deviasi atau penyimpangan ini menjadi menguat dan melembaga, dan dikategorikan sebagai deviasi sekunder.

Dalam deviasi sekunder ini masyarakat memberikan label bahwa tindakan menyimpang tersebut sudah menjadi status sosial bagi pelaku, dan pelaku sudah menerima statusnya itu sebagai identitas dirinya. Bahkan lebih lanjut pelaku melembagakan status itu dengan tindakan-tindakan professional sehingga tindakan menyimpang itu sudah menjadi profesi dirinya. Sebagai contoh adalah munculnya sebutan-sebutan tentang seseorang yang menjadi PSK, pemabuk, penjudi dan lain-lain.

Upaya melakukan treatment terhadap perilaku menyimpang itu juga berbeda antara penyimpangan primer dan sekunder, terutama terkait dengan pengembalian fungsi-fungsinya yang telah melembaga dalam kasus deviasi sekunder.

Latihan

1. Apa yang Saudara ketahui tentang masalah sosial? Jelaskan!
2. Jelaskan konsep *social body*!
3. Jelaskan persamaan dan perbedaan teori structural-fungsional dengan teori konflik dalam melihat masalah sosial!
4. Jelaskan teori intraksionisme-simbolik dalam menjelaskan masalah sosial!
5. Dalam melihat masalah sosial, teori intraksionisme-simbolik menggunakan dua perspektif. Jelaskan kedua perspektif tersebut!

Paket 4

DISORGANISASI SOSIAL/*SOCIAL DISORGANITATION*

Pendahuluan

Perkuliahan dalam paket ini diarahkan untuk membahas mengenai konsep disorganisasi sosial. Oleh karenanya, pembahasan menitik pada masalah faktor-faktor penyebabnya, pola dan model-modelnya, serta teori dan pendekatan untuk memahami gejala disorganisasi sosial tersebut agar dapat diketahui ancaman treatment bagi mahasiswa BKI yang mengambil minat studi konseling sosial. Tampaknya tema paket ini menjadi dasar untuk memahami tema-tema berikutnya. Oleh sebab itu, pemahaman tentang masalah ini menjadi ungen.

Dalam paket ini, mahasiswa-wi akan dibawa secara lebih dalam ke arah pemahaman mengenai anatomi sosial dimana di dalamnya dikenalkan konsep *social body* yang tujuannya agar mereka memahami secara detail mengenai masyarakat yang dianalogikan dengan human body agar lebih mudah bagi mereka dalam menganalisa masyarakat ketika memang diperlukan analisa sebab akibat yang mengancam keutuhan strukturalnya. Oleh sebab itu, dalam perkuliahan paket ini penting ditampilkan slide mengenai realitas sosial yang disorganisasi sebagai sebuah contoh kongkrit agar mahasiswa- wi semakin lebih dekat dengan kehidupan sosialnya dan mampu menyelaminya secara anatomic untuk melihat gejala-gejala disorganisasi yang ada.

Atas dasar itu, penyediaan media pembelajaran tidak dapat dihindarkan, seperti LCD, Laptop, Papan tulis, dan juga kertas plano, spidol, serta solasi perekatnya agar dapat dilakukan diskusi ataupun *brainstorming* yang selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Teknik pembelajaran dengan media seperti ini akan membawa pengetahuan mahasiswa-wi lebih kongkret, empiris-sosiologis sebagaimana tuntutan sifat keilmuan matakuliah ini.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu mendeskripsikan konsep disorganisasi sosial dan teori-teorinya

Indikator

Setelah perkuliahan berakhir diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

4. Menjelaskan konsep disorganisasi sosial
5. Menjelaskan Faktor-faktor Penyebab Disorganisasi Sosial
6. Menganalisis Pola-pola Disorganisasi Sosial
7. Menjelaskan teori dan Pendekatan Disorganisasi Sosial

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian disorganisasi sosial
2. Faktor-faktor Penyebab Disorganisasi Sosial
3. Pola-pola Disorganisasi Sosial
4. Teori dan Pendekatan Disorganisasi Sosial

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (15menit)

1. *Brainstorming*, tukar wawasan tentang konsep disorganisasi sosial dan mengamati slide tentang realitas sosial yang disorganisasi.
2. Komentar dari mahasiswa-mahasiswi atas realitas sosial yang telah ditayangkan.

Kegiatan inti (70 menit)

1. Mengelompokkan mahasiswa-mahasiswi menjadi tiga (3) group.
2. Masing-masing group mendiskusikan tema dan sub tema tentang, yaitu:
Group ke 1 tentang konsep disorganisasi sosial dan faktor-faktornya.
Group ke 2 tentang pola-pola disorganisasi sosial.
Group ke 3 tentang teori dan pendekatan tentang disorganisasi Sosial
3. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok ke depan kelas.
4. Setiap selesai presentasi satu kelompok diadakan dsikusi dan Tanya-jawab.
5. Pemantapan dan penguatan hasil diskusi oleh dosen pengampu.
6. Pemberian kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk mengklarifikasi hasil diskusi atau menanyakan hal yang belum terbahas dalam diskusi.

Kegiatan Penutup (10menit)

1. Penyimpulan hasil perkuliahan
2. Memberikan semangat belajar lebih lanjut dan mendalami materi
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa/wi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5menit)

1. Memberikan tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) tentang disorganisasi sosial, faktor-faktor, pola-pola dan teori serta pendekatannya.

Tujuan

Agar mahasiswa-mahasiswi memiliki pemahaman yang sistematis tentang disorganisasi sosial, faktor-faktor, pola-pola dan teori serta pendekatannya melalui kreatifitas pengungkapan ide, dan dari ide-ide yang parsial dari beberapa mahasiswa-wi tersebut terkonstruksi konsep yang utuh dan menjadi definisi yang adekuat tentang disorganisasi sosial dalam suatu *mindmapping*.

Bahan dan Alat

Kertas plano, Spidol berwarna, dan Solasi penempel.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing lima (5) menit!
7. Berikan tanggapan dan klarifikasi terhadap presentasi yang selesai dilakukan!

Uraian Materi

DISORGANISASI SOSIAL/ *SOCIAL DISORGANIZATION*

Pengertian Disorganisasi Sosial

Secara leksikal, kata 'disorganisasi' adalah lawan dari kata 'organisasi' yang berarti susunan atau gabungan unsur-unsur yang tertata secara apik, sehingga membentuk sebuah konstruk dan format yang rapi. Masyarakat yang terorganisir, *organized society*, adalah masyarakat yang rapi, memiliki sendi-sendi komunikasi yang kokoh yang diindikasikan dengan, misalnya; terdapat stabilitas sosial, terjalin interaksi interpersonal yang intim, adanya relasi sosial yang berkesinambungan, terdapat sistem konsensus yang berkualitas tinggi di antara anggota-anggota masyarakat tersebut.⁴⁶ Masyarakat demikian disebut dengan masyarakat yang utuh, *social order*, karena memiliki model pergaulan hidup yang mampu memberi seperangkat nilai, norma, dan peraturan pada warga untuk membangun sistem pergaulan hidup yang harmonis, dinamis, dan penuh rasa aman, serta menentramkan anggota-anggotanya.

Dengan diketahuinya masyarakat yang terorganisasi, *organized society*, atau masyarakat utuh, maka dapatlah diketahui tentang konsep masyarakat yang tidak utuh yang dikenal dengan masyarakat yang disorganisasi, *disorganized society*. Lebih lanjut, Kartini Kartono menjelaskan, bahwa disorganisasi sosial adalah masyarakat yang memiliki ciri-ciri; adanya perubahan yang serba cepat; tidak ada stabilitas; tidak ada sosialisasi yang baik, yakni tidak ada kesinambungan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman dari satu kelompok dengan kelompok-kelompok yang lainnya; tidak terdapat intimitas organik dalam relasi sosialnya; serta tidak ada *adjustment* di antara anggota-anggotanya.⁴⁷

Secara terminologis, disorganisasi sosial adalah; (1) suatu proses sosial kontinyu yang memanifestasikan aspek tekanan batin, ketegangan dan bencana

⁴⁶Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, hal. 4.

⁴⁷Ibid

batin dari suatu sistem sosial.⁴⁸ (2) masyarakat yang oleh karena satu dan lain sebab, banyak dari anggota-anggotanya yang gagal dalam melaksanakan peran yang diharapkan oleh masyarakat. Tegasnya, bahwa perilaku dari kebanyakan warga masyarakat itu tidak ideal, dalam arti, tidak dapat saling memenuhi kebutuhan pada yang lain. Sebagai contoh adalah ibu-ibu yang secara sosial bertugas mendidik dan merawat anak, kemudian dalam kondisi berbeda, ia mentradisikan diri keluar rumah untuk memenuhi peran lain seperti memenuhi ekonomi, politik, dan lain-lain karier, sehingga anak-anak di dalam keluarga mengalami masalah yang berakibat pada pelanggaran-pelanggaran sosial, kenakalan-kenakalan, dan sejenisnya. Dengan situasi tradisi demikian itu, masyarakat secara luas mengeluhkan kondisi tersebut. Kasus demikian berarti bahwa ibu-ibu telah melakukan dan menyebabkab disorganisasi sosial.⁴⁹ (3) Disorganisasi sosial yaitu *conceived of a failure of rule*, yakni sebuah kondisi pudarnya tatanan norma masyarakat sehingga mengakibatkan konflik kultural dan runtuhnya sebuah struktur sosial.

Dalam kondisi demikian, seseorang berperilaku semau gue dan mungkin juga merugikan serta mencederai orang lain tanpa adanya kontrol yang mampu mengendalikan semuanya.⁵⁰

Definisi-definisi disorganisasi sosial di atas, walau berbeda redaksinya, tetapi memiliki pengertian pokok yang sama; Artinya, bahwa disorganisasi sosial itu dapat dilihat sebagai sebuah proses sosial, namun demikian, dapat juga dilihat sebagai sebuah kondisi sosial tertentu. Sebagai sebuah proses, maka berarti, bahwa disorganisasi sosial merupakan fungsi dan sebuah sistem dan juga struktur sosial yang sedang mengalami instabilitas dan dinamika yang timpang.⁵¹ Sedangkan sebagai sebuah kondisi sosial, maka disorganisasi sosial merupakan akibat dari disfungsi struktural dan sistem sosial itu sendiri, sehingga institusi-institusi sosial yang ada berjalan tidak serasi, sementara

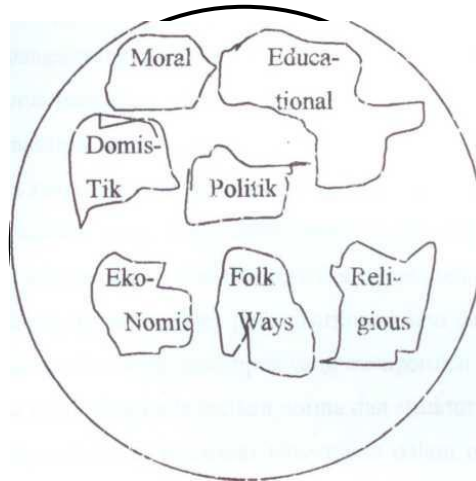
⁴⁸ A.L Bertran, *Basic Sociology: An Introduction in Theory and Method*, dalam Vembiarto, *Patologi Sosial*, hal. 19.

⁴⁹ Sapari Imam Asy'ari, *Patologi Sosial*, hal. 31.

⁵⁰ Earl Rubington, *Studi of Social Problem*, hal. 59

⁵¹ Ingat! Bahwa Disorganisasi Social muncul sebagai sebuah perspektif dari studi tentang masalah social, *social Problems*, sebagaimana sub diatas

individu-individu (person-person) masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan penyesuaian diri, *adjustment*, sebagaimana terilustrasi dalam gambar berikut:



NB.: Gambar di atas menunjukkan, bahwa lembaga-lembaga sosial yang ada tidak saling terkait secara fungsional, sehingga ikatan sosial menjadi hancur. Padahal, mestinya, antar kelembagaan sosial yang ada harus terjalin intimitas, dan harmonisme yang nyata untuk mewujudkan cita-cita sosial bersama sebagai sebuah *social order*.

Faktor-Faktor Penyebab Disorganisasi Sosial.

Disorganisasi sosial terkadang juga disebut dengan **disintegrasi sosial**. Konsep pertama dan kedua itu memang memiliki prinsip konseptual yang sama, yaitu sebuah keretakan organik dari tubuh masyarakat. Namun yang kedua tampaknya lebih terfokus pada sebuah akibat dari yang pertama dan lebih mengarah pada kondisi sosial yang telah retak itu.

Disorganisasi sosial, sebetulnya, merupakan satu bagian dari masalah sosial, yaitu akibat dari perubahan sosial, *social changes*. Bahkan dalam kondisi tertentu, ia sangat diperlukan oleh suatu kelompok sosial untuk memenuhi tuntutan kebutuhan. Misalnya, kondisi disintegrasi pada ketika masyarakat bangsa Indonesia ingin melepaskan diri dari keterkungkungan politik dan kebijakan orde baru yang hegemonik. Dalam kondisi itu terjadilah gerak reformasi, dimana, masing-masing bagian dari masyarakat bangsa

menginginkan untuk melepaskan diri dari kungkungan bangsa/pemerintah. Bahkan banyak elemen bangsa yang menginginkan melepaskan diri dari ikatan NKRI. Akibat negatif dari itu adalah terjadinya perpecahan masyarakat bangsa ini, sampai ada yang terlanjur menjadikan dirinya sebagai sebuah masyarakat bangsa yang merdeka seperti kasus Timor Timur. Selanjutnya dari pengalaman kasuistik ini muncul kembali gerakan jiwa sosial untuk membangun soliditas masyarakat, dan akhirnya muncul intimitas baru yang lebih segar lagi.

Menurut Borgadus, faktor penyebab dari disorganisasi sosial adalah; 1) adanya masalah sosial, *social problems*, yang tidak teratasi. Kelompok yang memicu kearah kondisi itu biasanya adalah mereka yang menginginkan perubahan, atau juga mereka yang tidak memperoleh kepuasan dalam lingkungan sosialnya; 2) adanya norma sosial yang tidak dapat menjalin relasi harmonis karena cenderung memberi akses pada distribusi kuasa dan power yang tidak seimbang. Namun demikian, kelompok yang memperoleh akses dan terpenuhi kebutuhannya secara cukup cenderung melestarikan norma dan struktur sosial yang ada; 3) karena kesalahan-kesalahan struktural masyarakat dalam menangani masalah- masalah kemasyarakatan, terutama sekali, kondisi yang mengarah pada ketidakselarasan struktur itu sendiri. Sebagai misal adalah adanya proses perubahan yang cepat, namun struktur masyarakat tidak mengimbangi taraf kecepatannya, sehingga lemahlah koordinasinya dan tidak dapat mengatasi masalah yang terus bertambah.

Di samping itu, disorganisasi sosial juga diakibatkan oleh perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, industrialisasi dan urbanisasi yang mengarah pada pergeseran dan perubahan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, Dengan demikian, elemen-elemen sosial tidak dapat diintegrasikan lagi, serta tidak dapat diorganisir secara seksama yang selanjutnya memudahkan intimitas organik masyarakat. Disintegrasi sosial selanjutnya ditandai dengan; munculnya pola hidup individualisme, ekstremisme dan sikap mementingkan diri sendiri/ egoisme; dan munculnya gejala relasi sosial yang atomis serta terbelah dan terpecah-pecah secara parsial.

Pola-pola Disorganisasi Sosial

Sebagai sebuah gejala, disorganisasi sosial memiliki dua bentuk; yaitu disorganisasi schismatik dan disorganisasi fungsional. Bentuk *pertama* adalah ditimbulkan oleh karena terpecahnya intimitas hubungan antar kelompok sosial yang berakibat pada munculnya konflik sosial. Dalam pola disorganisasi seperti ini, kekuatan perekat sosial terpecah dan melemah, peran kinship memudar, demikian juga ras, etnik, ikatan teritorial dan ikatan profesi menjadi berjauhan membentuk jarak sosial, *social distance*, yang merapuhkan struktur sosial.

Penyebab dan pola disorganisasi schismatik ini dapat bersifat internal, misalnya, kurangnya solidaritas, dan juga bersifat eksternal, misalnya, timbulnya perpecahan dan konflik. Adapun bentuk yang kedua (disorganisasi fungsional) yaitu fenomena perpecahan sosial yang disebabkan karena keretakan dalam hubungan fungsional antar individu, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi kelompok. Disorganisasi sosial fungsional ini mencerminkan sikap antipasti sosial dari para anggota masyarakat sehingga dapat berakibat pada permisifisme masyarakat karena kepedulian dan partisipasi sosial menjadi melemah. Kondisi seperti ini, ibarat perspektif biologis, menjadikan struktur sosial menjadi tidak imunis yang akan rentan munculnya penyakit-penyakit sosial.

Ciri simtomik dari disorganisasi sosial ini adalah; (1) adanya disintegrasi peranan, yakni, bahwa fungsi dari anggota kelompok masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik; (2) munculnya gejala ambiguitas, yakni terdapatnya peranan-peranan sosial yang tidak menentu. Dalam pengalaman bangsa Indonesia terbukti, bahwa disorganisasi sosial disebabkan oleh; (a) konflik internal antar sesama interest group, kelas sosial, ras, dan kelompok sosial; (b) merosotnya harmonisasi dalam masyarakat; (c) kegagalan dalam melaksakana fungsi sosial.⁵²

Sapari Imam Asy'ari menegaskan juga, bahwa ciri atau tanda munculnya disorganisasi sosial antara lain yaitu; (a) adanya disorganisasi

⁵² B. Simanjuntak, *Patologi Sosial*, hal. 82.

peranan, yakni fungsi dari anggota-anggota suatu kelompok tidak dilaksanakan dengan sukses; (b) adanya peranan-peranan yang tidak menentu atau tidak jelas, misalnya, seorang pejabat melakukan korupsi untuk partainya.⁵³

Gejala disorganisasi fungsional karena retaknya fungsi dan peranan yang dimainkan warga masyarakat menampak secara simptomatik dalam bentuk, antara lain, yaitu:

1. formalisme; yaitu gejala dipertahankannya norma-norma dan prosedur-prosedur yang telah kehilangan makna dan fungsinya dalam kehidupan sosial. Contohnya yaitu; dipertahankannya upacara-upacara seremonial keagamaan tertentu yang tanpa makna filosofik; dipertahankannya kurikulum yang klasik dalam dunia pembelajaran. Formalisme memicu disorganisasi dan selanjutnya mengarah pula pada reorganisasi.
2. merosotnya unsur-unsur nilai yang dianggap sakral dalam suatu masyarakat. Unsur-unsur itu dapat bersumber dari proses sekuler, misalnya, berasal dari tradisi undang-undang dasar, yang untuk kemudian dianggap sakral demi mempertahankan kontinuitas sebuah tradisi. Jika yang sakral itu merosot karena suatu alasan, maka terjadi disorganisasi sosial. Sebagai contoh kongkret yaitu merosotnya nilai-nilai perkawinan yang suci yang dilecehkan oleh beberapa praktik beberapa elemen dan warga sosial, seperti para seniman dan selebriti, sehingga keresahan sosial dan perpecahan masyarakat terjadi.
3. menggejalanya sikap individualisme dalam semua lapangan kehidupan.
4. menguatkan kecenderungan untuk mengutamakan hak-hak perorangan sehingga membahayakan kesatuan dan solidaritas, membudayanya hak privasi warga masyarakat, serta menggejalanya keinginan melepaskan diri dari kontrol sosial.
5. munculnya perilaku hedonistik, yakni perilaku yang mementingkan kepuasan dan kenikmatan diri sendiri.
6. adanya kesukaran-kesukaran semantik, yang untuk ini, penyimpangan-

⁵³ S. Imam Asy'ari, *Patologi Sosial*, hal. 32.

penyimpangan dalam pemakaian bahasa dapat menambah faktor konflik yang telah ada dikarenakan salah mengerti. Contoh, adanya kesalahpahaman antara generasi muda dan generasi tua.

7. saling tidak percaya antara unsur-unsur masyarakat akibat individualisasi, hedonisme, dan lain-lain. Dengan demikian, terjadi saling curiga dan berupaya mencari kambing hitam.
8. adanya kegelisahan yang terus menerus disebabkan kondisi sosial yang saling tidak percaya. Misalnya pemimpin tidak dikehendaki rakyat, dan sebaliknya pemimpin tidak menghargai masyarakatnya, dan apalagi tega memeras dan menjajah mereka sendiri.

Teori dan Pendekatan dalam Disorganisasi Sosial

Disorganisasi sosial bukanlah merupakan anteseden, tetapi lebih merupakan suatu konsekuensi atau akibat dan faktor-faktor yang kompleks seperti di atas. Oleh karena itu, yang perlu dipahami adalah tentang adanya relasi antara individu dan masyarakat secara kolektif dalam hal kemunculan disorganisasi sosial. Demikian juga pandangan individu dengan pandangan masyarakat yang berbeda tentang nilai dapat juga mengakibatkan disorganisasi sosial. Misalnya adalah adanya perilaku sosial yang tidak lagi identik dengan nilai yang berlaku. Seorang (individu) dapat menyebabkan disorganisasi sosial, dan sebaliknya, kondisi sosial, misalnya norma yang tidak efektif, struktur yang pecah, dan budaya yang tidak kondusif dapat mengakibatkan disorganisasi individu. Jadi, ada keterkaitan antara seseorang/person dengan masyarakat lingkungannya. Seseorang dibentuk oleh lingkungan, dan lingkungan sosialpun dapat diwarnai oleh ataupun mewarnai person-person anggota sosialnya.⁵⁴

Teori disorganisasi sosial sebenarnya merupakan kelanjutan perkembangan dari teori masalah sosial. Teori masalah sosial dipandang masih terlalu umum maknanya sehingga menyulitkan memahami hakekat patologi sosial itu sendiri, terutama dalam membangun metodologi pengkajiannya.

⁵⁴ Penggunaan kata *person* lebih tepat dari pada kata *individu* dalam konteks patologi sosial karena *person* adalah seseorang sebagai warga masyarakat, sedangkan *individu* adalah seseorang sebagai sebuah organisme yang terpisah dengan lingkungan sosialnya.

Disamping itu, teori masalah sosial terkesan masih menilai dan melihat masalah sosial sebagai sesuatu yang independen, padahal gejala sosial itu memiliki pertautan dengan gejala yang lain. Untuk itu, kemunculan teori disintegrasi sosial dalam memandang masalah sosial adalah sebuah upaya koreksi dan pengembangan metodologis.

Ada dua pendekatan dalam melihat gejala disorganisasi sosial, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologi sosial. Pendekatan yang pertama meninjau gejala problem sosial dari sudut sosiologi, sedangkan pendekatan kedua meninjaunya berdasarkan kodrat manusia. Dua pendekatan itu mampu mengkaji persoalan sosial secara mendasar dan menyeluruh karena disorganisasi sosial pada hakekatnya memiliki hubungan erat dengan disorganisasi personal/pribadi. Kedua gejala disorganisasi itu merupakan totalitas interaktif.

Ada empat faktor yang mendasari gejala disorganisasi pribadi, yaitu; warisan organik, warisan sosial, pengalaman yang unik seseorang, status kepribadian pada suatu fase perkembangan tertentu. Orang yang mengalami disorganisasi pribadi akan mengganggu sistem perilaku sosialnya, sehingga ia cenderung memproduksi tingkah laku yang menyimpang yang disebut *sociopathic behavior*.

Studi tentang tingkah laku sosial yang menyimpang itu dapat ditelaah melalui teori biologi dan psikologi. Menurut teori biologi, bahwa tingkah laku menyimpang atau patologis itu dapat menurun melalui gen, melalui pewarisan organik dan pewarisan dalam bentuk konstitusi kepribadian yang lemah sifatnya. Selanjutnya, teori psikologi mendasari pandangan bahwa intelegensi dan proses berpikir atau daya nalar seseorang menentukan produk perilakunya. Adapun teori sosiologi berpandangan, bahwa pengaruh masyarakat, tradisi, norma, dan nilai yang dipegangnya menentukan sekali dalam pembentukan perilaku seseorang.

Tingkah laku menyimpang memiliki pola-pola yang berbeda; ada yang bersifat *overt-verbal* seperti alkoholisme, mengisap narkoba, prostitusi, dan sejenisnya. Ada juga yang *non verbal* yang diekspresikan dalam bentuk luapan

emosi. Selain itu, ada yang bersifat *covert* yang biasa dimanifestasikan dalam pola-pola simbolik sebagai luapan emosi terdalam seseorang.

Dilihat dari segi entitasnya, terdapat tiga macam tingkahlaku sosiopatik; yaitu; tingkahlaku sosiopatik individual, tingkahlaku sosiopatik situasional, dan tingkahlaku sosiopatik sistematis. Penjelasan lebih rinci tentang tema ini akan diuraikan dalam sub pembicaraan tentang penyimpangan atau deviasi.

Latihan

1. Jelaskan pengertian disorganisasi sosial dan ciri-cirinya!
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan disorganisasi sosial?
3. Bagaimana pola-pola disorganisasi sosial?
4. Pendekatan apa saja yang digunakan untuk melihat disorganisasi sosial?

Paket 5
PENYIMPANGAN / DEVIASI

Pendahuluan

Dalam paket ini, perkuliahan difokuskan untuk mendalami tema penyimpangan atau deviasi. Termasuk dalam inti pembahasan deviasi ini adalah menyinggung konsep diferensiasi karena antara keduanya terjadi hubungan sinonim dan sekaligus sebab akibat, namun di dalam kasus kondisi yang lain dapat menjadi hal yang berbeda. Pendalaman tema materi ini penting bagi mahasiswa-wi menjadi bekal untuk lebih memahami kondisi-kondisi masyarakat yang sakit. Oleh sebab itu, materi paket ini menjadi semacam pengantar bagi materi paket berikutnya.

Dalam perkuliahan ini, mahasiswa-wi mendalami konsep-konsep deviasi, diferensiasi, unsur-unsur deviasi, faktor-faktor penyebab, serta bentuk-bentuk dan pola-pola deviasi. Mereka secara bersama-sama di kelas mendiskusikan konsep-konsep tersebut dengan mengamati realitas sosial yang mereka alami di lingkungannya lalu selanjutnya dicoba membangun definisi-definisi seputar konsep yang mereka bahas yang dimaksudkan agar wawasan mahasiswa tidak sekedar konseptual-teoritik. Oleh sebab itu, dosen memberikan stimulus kepada mereka dengan menayangkan slide seputar kondisi konkret deviasi yang selanjutnya menjadi bahan pembahasan di kelas.

Terkait dengan model perkuliahan seperti atas, maka penyediaan media pembelajaran seperti LCD, Laptop, papan tulis, kertas plano, spidol, dan juga solasi pelekat kertas ke tembok atau papan tidak dapat diabaikan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan konsep penyimpangan sosial

Indikator

Setelah perkuliahan berakhir diharapkan mahasiswa-wi dapat:

1. Menjelaskan konsep Penyimpangan/deviasi.
2. Membandingkan istilah Deviasi dan Diferensiasi.

3. Menerangkan faktor-faktor dan jenis-jenis penyimpangan

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian Penyimpangan
2. Deviasi dan Diferensiasi
3. Faktor-faktor dan Jenis-jenis Penyimpangan

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (15menit)

1. *Brainstorming*, tukar wawasan tentang konsep deviasi dan diferensiasi dan mengamati slide tentang realitas sosial yang terkait dengan deviasi.
2. Komentar dari mahasiswa-mahasiswi atas realitas sosial yang telah ditayangkan.

Kegiatan inti (70 menit)

1. Mengelompokkan mahasiswa-wi menjadi tiga (3) group.
2. Masing-masing group mendiskusikan tema dan sub tema tentang, yaitu:
Group ke 1 tentang konsep konsep diviasi, perbedaan dan persamaan deviasi dan diferensiasi.
Group ke 2 tentang faktor-faktor deviasi
Group ke 3 tentang jenis-jenis deviasi
3. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok ke depan kelas.
4. Setiap selesai presentasi satu kelompok diadakan dsikusi dan tanya-jawab.
5. Pemantapan dan penguatan hasil diskusi oleh dosen pengampu.
6. Pemberian kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk mengklarifikasi hasil diskusi atau menanyakan hal yang belum dibahas dalam diskusi.

Kegiatan Penutup (10menit)

1. Penyimpulan hasil perkuliahan
2. Memberikan semangat belajar lebih lanjut dan mendalami materi
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa/wi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5menit)

1. Memberikan tugas latihan

2. Mempersiapkan perkuliahan berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) tentang deviasi, faktor-faktor, dan jenis-jenis deviasi.

Tujuan

Agar mahasiswa-wi memiliki pemahaman yang sistematis tentang deviasi dan diferensiasi, faktor-faktor, dan jenis-jenis deviasi melalui kreatifitas pengungkapan ide, dan dari ide-ide yang parsial dari beberapa mahasiswa-wi tersebut terkonstruksi konsep yang utuh dan menjadi definisi yang adekuat tentang masalah sosial dalam suatu *mindmapping*.

Bahan dan Alat

Kertas plano, Spidol berwarna, dan Solasi penempel.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing lima (5) menit!
7. Berikan tanggapan dan klarifikasi terhadap presentasi yang selesai dilakukan!

Uraian Materi

PENYIMPANGAN / DEVIASI

Pengertian

Kata “penyimpangan” merupakan terjemahan dari istilah “deviasi” yang terambil dari kata bahasa Inggris, *deviance*. Deviasi atau penyimpangan merupakan sifat dari perilaku seseorang yang menyalahi norma dan kaidah sosial yang telah disepakati bersama. Oleh karena perilaku yang menyalahi sistem dan norma sosial tersebut mengakibatkan rasa tidak harmonis pada

warga masyarakat dan mengganggu proses interaksi, maka perilaku tersebut dinamai juga dengan perilaku patologis.⁵⁵

Para pakar patologi sosial berbeda-beda dalam menyusun redaksi tentang istilah penyimpangan. Menurut Kartini Kartono, penyimpangan (deviasi) adalah tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan/populasi.⁵⁶ Definisi ini menganggap faktor individu sebagai sumbernya, dan tidak melihat faktor eksternal berupa situasi sosial yang melingkungi seseorang/ person atau individu warga masyarakat.

Soerjono memegang dua pola perumusan definisi penyimpangan, yaitu secara statistik dan sosiologik. Secara statistik, penyimpangan adalah setiap hal yang terlalu jauh dari keadaan normal (rata-rata). Makna operasional definisi tersebut dapat dijelaskan, misalnya, pada penelitian seorang petani yang melihat secara statistik pada tanamannya. Dalam jangka waktu tertentu, ukuran pertumbuhan tanaman tidak seragam, artinya ada sebuah tanaman yang jauh melebihi ukuran rata-rata. Sebaliknya, terdapat pula satu tanaman yang jauh di bawah ukuran rata-rata. Dari fenomena tersebut dapat dikatakan, bahwa tanaman yang batangnya paling besar/panjang dan paling rendah dan kecil itu mengalami penyimpangan. Dari analisis ini, dapat dikatakan, bahwa setiap hal yang tidak sama dengan yang lazimnya adalah sebuah penyimpangan. Seorang yang kidal di suatu komunitas yang umumnya memberfungsikan tangan kanan pada kebanyakan perbuatan adalah dikategorikan sebagai *deviant*.

Pandangan pakar biologi memiliki orientasi lain, bahwa penyimpangan adalah suatu kondisi disfungsional dari seseorang atau kelompok yang tidak mampu menampilkan fungsi sosialnya, sehingga menyebabkan terganggunya sistem interaksi sosial yang wajar. Karena itu, muncullah rasa

⁵⁵ Dikatakan demikian karena penyimpangan menyimpan sebuah asumsi sosiologis bahwa pelaku atau *deviant* tersebut mengidap suatu kelainan. Perilaku itu juga dikenal dengan perilaku sosiopatik. Lihat, Soerjono Soekanto, *Sosiologi Penyimpangan*, seri pengenalan sosiologi 9, (Jakarta: Rajawali pers, 1988), hal. 5.

⁵⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1., hal. 9

tidak tenteram dan disharmoni dalam masyarakat, sehingga hal ini lazim disebut dengan perilaku patologis, artinya, penyimpangan tersebut dianggap sebagai suatu penyakit di dalam totalitas tubuh sosial. Pandangan ini cenderung terpengaruh ilmu kedokteran yang menganggap masyarakat, *society*, sebagai mirip sebuah sistem organisme biologis.

Baik pandangan statistik maupun medis di atas tampaknya mempergunakan penilaian-penilaian yang bersifat sederhana, karena terlalu dangkal di dalam melihat suatu gejala sebagai penyimpangan. Tampaknya, sosiolog sendiri banyak terpengaruh oleh pandangan seperti di atas. Sosiolog yang demikian menelaah masyarakat dan bagian-bagian tertentu dari strukturnya untuk melihat apakah ada gangguan-gangguan terhadap stabilitas yang menurunkan kualitas ketahanan sosial. Jika ada, maka dinilainya masyarakat itu sebagai masyarakat yang mengalami disorganisasi/ disintegrasi.

Menurut Robert Merton, bahwa pemahaman sosiolog tentang gejala demikian itu memungkinkan peneliti selanjutnya untuk dapat mengidentifikasi unsur- unsur yang mungkin menjadi penyebab terjadinya gangguan yang--mungkin tidak, atau bahkan--tidak disadari oleh warga masyarakat.⁵⁷ Namun untuk menentukan mana elemen sosial yang menjadi penyebab--karena menentukan organ yang disfungsi itu sangat sulit--maka agaknya masyarakat sendiri akhirnya cenderung untuk menentukan sendiri bahwa elemen tertentulah yang disfungsional. Dengan demikian, pandangan tersebut terkesan sangat subyektif dalam melihat suatu penyimpangan, terutama dari kalangan penganut mazhab fungsionalisme.

Definisi yang dirumuskan sosiolog lain yang lebih bersifat relativistik adalah bahwa perilaku penyimpangan/deviasi adalah kegagalan seseorang atau elemen masyarakat untuk dapat mematuhi aturan-aturan kelompok. Definisi ini cukup sederhana dan obyektif, namun kesulitannya terletak pada aturan mana yang menjadi tolok ukur untuk dapat menetapkan seorang warga sebagai

⁵⁷ Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*, (New York; the Free Press of Glencoe, 1957), 697

penyimpang dan melanggar aturan. Memang aturan itu sendiri dapat bersifat relatif, karena mungkin di tempat berbeda, pelanggarnya tidak dianggap menyimpang. Namun demikian, ada aturan yang bersifat homogen yang ditaati secara bersama-sama sehingga perilaku mana yang melanggarnya dianggap suatu penyimpangan yaitu tindakan melanggar aturan yang telah disepakati. Walaupun begitu, terdapat fakta penting di sini, bahwa penyimpangannya itu adalah diciptakan oleh masyarakat.⁵⁸ Penyimpangan muncul melibatkan sebuah proses tanggapan/respons sosial masyarakat terhadap perilaku seseorang. Artinya, tetap saja bahwa subyektifitas masyarakat memegang peranan penting dalam menentukan sebuah penyimpangan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dirangkum, bahwa penyimpangan merupakan perilaku seseorang, baik yang berupa sikap mental maupun praktik perbuatan, yang melanggar tatanan dan norma sosial dengan ukuran menimbulkan disharmonis sosial. Untuk mencermati lebih lanjut tentang penyimpangan, maka dapat dipertanyakan, siapa yang melanggar norma itu? Mengapa ia melanggarnya? Bagaimana kondisi pribadi Si penyimpang itu? Latar sosial seperti apakah yang mendorong terjadinya penyimpangan itu?

Deviasi dan Diferensiasi

Kalau deviasi diartikan dengan penyimpangan sebagaimana diuraikan di atas, maka diferensiasi diartikan dengan 'tingkahlaku yang berbeda' dari tingkahlaku umumnya masyarakat.⁵⁹ Dari segi semantik, maksud dua istilah itu adalah sama, tetapi dari sisi interaksional berbeda; Keduanya dapat diibaratkan sebagai sebuah koin mata uang yang berbeda dalam salah satu wajahnya, karena dapat terjadi bahwa diferensiasi menjadi akibat dari deviasi, dan juga dalam realitas berbeda, menjadi sebab timbulnya praktik deviasi itu sendiri, maka seakan terkesan bahwa keduanya berdekatan maksudnya.

⁵ Soerjono, *Sosiologi Penyimpangan*, hal. 9

⁵⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1. hal. 9

Namun, jika ditelaah secara mendetail, terdapat perbedaan mendasar yaitu, bahwa deviasi merupakan perilaku subyektif yang mengandung kesengajaan untuk melawan norma dan hukum yang otomatis menjadi sebuah bentuk perilaku yang berbeda dari perilaku umum masyarakat. Sementara, diferensiasi tidak mengandung makna dan maksud untuk melanggar norma dan hukum, walaupun dia/pelaku juga memungkinkan untuk memunculkan ketimpangan dan disharmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, deviasi dianggap sebagai sebuah penyakit yang membahayakan sistem dan stabilitas sosial, sementara, diferensiasi dapat dianggap sebagai sebuah normalitas. Deviasi berkonotasi terhadap bentuk perilaku kejahatan/kriminal, sementara, diferensiasi tidak demikian. Hanya saja suatu kejahatan mengandung sebuah konsep diferensiasi, karena kecenderungannya melawan normalitas.

Diferensiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu diferensiasi biologis dan diferensiasi demografis. Diferensiasi biologis merupakan penyimpangan perilaku yang ditimbulkan oleh faktor bentuk atau karakter tubuh biologis, misalnya, bentuk badan, perut, kepala, telinga dan lain-lain atau disfungsi dari organ tubuh, baik berupa cacat bawaan, maupun cacat pertumbuhan alami yang dapat menimbulkan suatu stigma (cap, label negatif, cemooh, dan lain-lain). Dalam kadar yang esktrm, diferensiasi tersebut dapat mengganggu aktivitas seseorang, sehingga perannya menjadi terhambat, misalnya, penderita *aphosia* dan *aphonia*.⁶⁰ Dengan demikian, penderita tersebut tidak jarang mendapatkan hukuman sosial, misalnya, dialienasi dan dimarginalkan dari konteks pergaulan sosialnya. Adapun Diferensiasi demografis adalah kelainan perilaku yang dimunculkan karena perbedaan struktur penduduk, misalnya, adanya kelas-kelas sosial yang berbeda, ras dan bangsa-bangsa yang berbeda, religi dan kultur budaya berbeda yang kesemuanya memiliki tradisi dan perilaku yang berbeda

⁶⁰ *Aphosia* adalah kasus hilangnya kemampun oral seseorang untuk menyalurkan ide-ide dalam pikiran seseorang dengan bentuk simbol kata-kata yang fasih dikarenakan adanya kerusakan pada cortex, yaitu kulit otak manusia. Sedangkan *aphonia* adalah hilangnya kemampuan untuk melafalkan huruf-huruf secara jelas dan fasih.

pula. Termasuk di sini adalah perbedaan seks dan umur, nasionalitas, dan sebagainya.

Dalam kondisi perbedaan tersebut tentunya sulit ditegakkan norma yang seragam, dan ini tentu berbeda dengan masyarakat tradisional yang homogen. Oleh karena itu, muncullah kelainan-kelainan perilaku yang ditampilkan oleh berbagai kelompok kelas, kelompok seks, kelompok umum yang berbeda dengan yang lainnya. Dalam kondisi demikian penting diketahui dan dikenali berbagai tradisi masyarakat yang ada untuk membangun sebuah ikatan organisasi hidup yang kompleks, seperti, pada masyarakat urban dan masyarakat modern sebagaimana sekarang.

Faktor-faktor dan Jenis Penyimpangan

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa deviasi dapat terjadi karena; (1) faktor fisiologis atau juga berupa cacat biologis, baik bersifat genetik, pembawaan lahir, maupun akibat kecelakaan yang mengakibatkan pola tingkahlaku yang berbeda, menyimpang, dari yang lainnya: (2) faktor sosial, yakni berupa tradisi perilaku, norma dan sistem interaksi sosial yang melingkupi seseorang, sehingga terdapat asumsi, bahwa seseorang dibentuk oleh lingkungannya. Oleh karenanya, sistem sosial yang tidak ketat dan longgar kontrol sosialnya menstimuli munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku anggotanya.

Dalam konteks sosio-kultural terdapat tiga sifat deviasi/penyimpangan; yaitu deviasi individual, deviasi situasional, dan deviasi sistematis. (1) Deviasi individual adalah suatu penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh faktor fisik, pribadi, dan personalitas seseorang. Faktor-faktor ini bersifat hereditis dan atau berupa cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan. Pola deviasi ini seringkali bersifat simptomik, karena dimotori oleh konflik-konflik intra psikis yang kronis dan mendalam. Juga karena kecenderungan-kecenderungan simptomik karena impuls-impuls yang kacau sehingga mengakibatkan keterbelahan pribadi, *split of mental*. Seseorang yang demikian bersifat *chaotic*, tidak

memiliki integritas keperibadian yang utuh yang lazim disebut dengan disintegrasi individu/pribadi.

Yang tergolong dalam pola deviasi ini adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak idiot, anak-anak genius idiot, penemu-penemu, dan orang-orang ekstrem atau fanatis, dan individu-individu psikotis. Individu-individu di atas cenderung berperilaku yang aneh-aneh dan menyimpang. (2) Deviasi situasional adalah penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal seseorang berupa situasi dan kondisi tertentu sehingga memaksa seseorang melakukan penyimpangan. Sebagai contoh, adalah gadis-gadis belia yang memasuki dunia prostitusi dikarenakan faktor situasi ekonomi yang memaksanya, kelompok-kelompok keyakinan agama tertentu yang melakukan teror dalam bentuk pengeboman karena situasi yang menjadikannya tertekan dan frustrasi akibat ketidakadilan sistem kehidupan, sistem dispotik penguasa yang sedang berlangsung, dan lain-lain.

Ukuran jenis deviasi ini adalah situasi yang melingkupi seseorang deviant, sehingga jika situasi itu berubah, maka lenyaplah dorongan melakukan penyimpangan itu. Kasus bom-bom di Indonesia (terutama di Bali pada 11 September 2001) merupakan contoh kongkrit dari jenis deviasi ini. Termasuk dalam kategori situasi di sini adalah aspek sosio-kultural, budaya bebas dan renggangnya kontrol sosial juga memancing adanya penyimpangan. Ketidaksambungan kultural, misalnya, antara budaya tradisional dan budaya modern, antara budaya rural dan urban tidak terkomunikasikan dengan baik akan juga memunculkan sifat ambivalensi yang pandemis sehingga berakibat pada kondisi tidak tertata atau anomie-anomie yang menjadi benih dari penyimpangan.

Demikian juga kelambanan budaya, dimana, dalam arus perubahan situasi peradaban yang modern dan revolusif ini entitas budaya pun berkembang sehingga unsur-unsur yang ada tidak mungkin beriringan dan seragam. Kondisi demikian disebut dengan *cultural lag*. Kondisi ini juga memicu ambivalensi

sikap seseorang yang mendorong berbuat penyimpangan: (3) Deviasi sistematis adalah suatu penyimpangan yang terorganisir dan melembaga di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, deviasi jenis ini menjadi sebuah sub-kultur tersendiri. Deviasi ini memiliki wadah, tradisi khusus, dan norma-norma, bahkan simbol-simbol yang diciptakan tersendiri. Deviasi ini terjadi ketika sebuah penyimpangan tidak mengalami hambatan karena kontrol sosial yang lemah, sehingga perilaku menyimpang mendapatkan penguatan dengan pola rasionalisasi tertentu, dan akhirnya menjadi tradisi tersendiri. Deviasi ini tidak jarang memiliki struktur yang formal sehingga memiliki pimpinan dan norma yang ditaati oleh anggota-anggotanya, dan kaum deviant (pelakunya) tersebut dapat membangun konformitas internal yang solid, terdapat sanksi-sanksi tertentu dalam melestarikan penyimpangan di antara anggotanya.

Deviasi ini juga dapat muncul dari deviasi situasional kumulatif yang membentuk simpul-simpul penguatannya dalam bentuk sistem perilaku seragam diantara orang-orang yang sejenis. Dalam jenis deviasi ini, kaum deviant mengembangkan interest-interest-nya, membangun organisasi untuk melindungi diri. Contoh dari kasus ini adalah kelompok bandct yang berhadapan dengan penegak hukum, mafia-mafia dan para koruptor, juga para penggerak dan penemu ide-ide baru yang mencari pendukung untuk secara bersama melawan tradisi lama yang menghadangnya. Dari setting keagamaan, tampak seperti kelompok-kelompok ekstremis, fundamentalis, radikal penganut ajaran-ajaran tertentu yang berbeda dengan kelompok aliran yang sudah menjadi konvensional (*mainstream group*) di tengah masyarakat, munculnya orang yang mengaku menjadi wali, dan lain-lain kasus. Jadi, kemunculan deviasi ini dapat berasal dari berbagai *setting* kehidupan, seperti sosial, budaya, politik, dan keagamaan.

Deviasi ini ada yang bersifat simbiotik aktif dan ada yang pasif, karena memiliki organisasi yang rapi, sehingga mereka memiliki harga diri dan norma-norma tersendiri pula. Selanjutnya, ada upaya untuk menarik anggota lain agar menjadi penganut kelompok menyimpang ini, terutama dari kalangan politik,

yang sengaja memperjuangkan ide dan interest-nya. Tidak jarang juga terjadi koneksi antara kelompok deviant dengan pihak: pemerintah untuk dibangun suatu norma yang mengatur keberlangsungannya, misalnya, sindikat narkoba yang memiliki *backing* tersembunyi dari atau bahkan dengan penegak hukum. Dalam deviasi jenis ini, yang cenderung pasif adalah deviasi kelompok idiot, kelompok tuna wicara, dan cacat tubuh tertentu yang tidak berkeinginan untuk membangun organisasi yang lebih besar setaraf nasional dan trans-nasional, karena faktor tidak adanya kemampuan secara fisik dan mental untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak lain.

Latihan

1. Apa yang Saudara ketahui tentang deviasi?
2. Jelaskan persamaan dan perbedaan antara deviasi dan diferensiasi?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya deviasi? Jelaskan!
4. Jelaskan jenis-jenis deviasi!

Paket 6

TEORI-TEORI PENYIMPANGAN DAN PATOLOGI SOSIAL

Pendahuluan

Perkuliahan untuk paket 6 ini difokuskan pada pembahasan mendalam mengenai teori-teori yang berkembang seputar penyimpangan dan patologi sosial. Ini dimaksudkan agar mahasiswa-wi mampu menganalisa gejala-gejala patologi atau penyakit sosial-kemasyarakat dengan pendekatan ilmiah tanpa mengedepankan asumsi-asumsi subyektif. Materi dalam paket ini, walaupun merupakan inti dari pembahasan materi problema sosial dan patologi sosial, namun tetap menjadi dasar bagi mahasiswa dalam melakukan tugas-tugas praktis-profesional untuk melakukan *treatment*/penanganan patologi sosial, yaitu dalam dunia konseling sosial.

Oleh sebab itu, di sini, mahasiswa-wi melakukan diskusi mendalam dan *sharing* ide mengenai teori-teori patologi sosial sehingga dapat lebih lanjut mengembangkan teori yang ada atau bahkan dapat membangun teori-teori baru yang relatif original melalui eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan menghadapi gejala penyimpangan dan patologi sosial di sekitarnya. Oleh sebab itu, agar perkuliahan bersifat sosiologis-empiris, maka dalam perkuliahan ditayangkan slide seputar gambar-gambar realistik terkait penyimpangan di masyarakat untuk selanjutnya didiskusikan lebih lanjut, disamping ditampilkan beberapa konsepsi dasar seputar teori-teori patologi sosial yang sudah ada. Teori-teori yang *breakdown* seputar gejala patologi sosial di sini adalah teori partisipasi sosial, teori interaksi sosial, dan teori perilaku sosial menyimpang, *sociopathic behavior*. Setelah dikuasai teori-teori patologi sosial tersebut, maka mahasiswa-wi diharuskan untuk menerapkan dalam pengkajian realitas patologi sosial yang ada sehingga dapat ditawarkan berbagai metode dan model *treatment* yang relevan, efektif-efisien.

Atas dasar itu, maka media perkuliahan amat membutuhkan beberapa hal seperti LCD, Laptop, dan layar untuk menampilkan slide di atas, dan juga perlu disediakan kertas plano, spidol, dan solasi penempel untuk menampilkan secara tertulis hasil diskusi ataupun brainstorming tentang tema-tema seputar teori-teori patologi sosial.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan teori-teori penyimpangan

Indikator

Setelah perkuliahan berakhir diharapkan mahasiswa-wi dapat:

1. Menjelaskan teori partisipasi sosial.
2. Menjelaskan teori interaksi sosial.
3. Menjelaskan teori tingkah laku sosial menyimpang

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Teori Partisipasi Sosial
2. Teori Interaksi Sosial
3. Teori Tingkah Laku Sosial Menyimpang

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (15menit)

1. *Brainstorming*, tukar wawasan tentang teori-teori penyimpangan dan mengamati slide tentang realitas sosial yang menyimpang.
2. Komentar dari mahasiswa-mahasiswi atas realitas sosial yang telah ditayangkan.

Kegiatan inti (70 menit)

1. Mengelompokkan mahasiswa-wi menjadi tiga (3) group.

2. Masing-masing group mendiskusikan tema dan sub tema tentang, yaitu:
 - Group ke 1 tentang teori partisipasi sosial.
 - Group ke 2 tentang teori tentang interaksi sosial
 - Group ke 3 tentang teori tentang tingkah laku sosial menyimpang
3. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok ke depan kelas.
4. Setiap selesai presentasi satu kelompok diadakan diskusi dan tanya-jawab.
5. Pemantapan dan penguatan hasil diskusi oleh dosen pengampu.
6. Pemberian kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk mengklarifikasi hasil diskusi atau menanyakan hal yang belum dibahas dalam diskusi.

Kegiatan Penutup (10menit)

1. Kesimpulan hasil perkuliahan
2. Memberikan semangat belajar lebih lanjut dan mendalami materi
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa/wi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5menit)

1. Memberikan tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) tentang teori-teori penyimpangan.

Tujuan

Agar mahasiswa-wi memiliki pemahaman yang utuh tentang teori-teori penyimpangan melalui kreatifitas pengungkapan ide, dan dari ide-ide yang parsial dari beberapa mahasiswa-wi tersebut terkonstruksi konsep yang utuh dan menjadi definisi yang adekuat tentang masalah sosial dalam suatu *mindmapping*.

Bahan dan Alat

Kertas plano, Spidol berwarna, dan Solasi penempel.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!

6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing lima (5) menit!
7. Berikan tanggapan dan klarifikasi terhadap presentasi yang selesai dilakukan!

Uraian Materi

TEORI-TEORI PENYIMPANGAN DAN PATOLOGI SOSIAL

Agar dapat mengerti hakekat penyimpangan sosial dan perilaku sosio-patologis, perlu ditetapkan indeks yang baku untuk dapat diketahui langkah-langkah pasti dalam melakukan *treatment*/penanganan sosial. Diketahui, bahwa sejak disiplin patologi sosial telah mencapai fase perkembangan yang sempurna, maka muncul beberapa teori dalam melihat dan menganalisis gejala penyimpangan sosial atau perilaku sosiopatologis. Di antaranya adalah terdapat tiga teori utama, yaitu teori partisipasi sosial, teori interaksi sosial, dan teori tingkahlaku sosiopatik:

1) Teori Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial adalah suatu pengalaman keanggotaan, keikutsertaan, peran serta seseorang atau kelompok dalam kesatuan sistem pergaulan hidup masyarakat, serta aktivitas-aktivitas sosiokultural dalam unit kehidupan sosial.⁶¹ Adapun metode yang dapat dipergunakan dalam menelaah partisipasi sosial seseorang atau kelompok tersebut meliputi:

- a. menentukan norma pokok tentang partisipasi sosial dengan teknik *random sampling* yang luas.
- b. membandingkan dua kelompok sample yang mewakili kelompok yang aktif dalam partisipasi sosial dan yang pasif partisipasi sosialnya untuk dapat menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial tersebut.
- c. memperbandingkan kelompok yang memiliki gangguan-gangguan fisik,

⁶¹ Partisipasi sosial merupakan sebuah situasi sosial dimana terjadi disebabkan adanya identifikasi antar individu yang melahirkan simpati sehingga berkembang menjadi suatu kondisi kebersamaan sosial. Periksa, Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 74.

mental, ekonomi, dan sejenisnya dengan kelompok yang normal dari gangguan-gangguan tersebut.

- d. membandingkan partisipasi sosial individu-individu antara sebelum mengalami gangguan dengan situasi setelah mengalaminya.
- e. membandingkan antar orang-orang yang memiliki gangguan tertentu, antara yang aktif dan pasif, dalam partisipasi sosialnya.⁶²

Namun demikian, tetap terdapat kesulitan metodologis dalam melakukan studi mengenai tingkah laku menyimpang. Hal itu dikarenakan; **Pertama**, belum terdapat skala partisipasi sosial yang baku dan bersifat umum; **Kedua**, skala-skala yang telah ada belum pernah dicoba untuk meneliti sample-sampel yang luas dan bervariasi untuk memperoleh norma dari pengertian partisipasi sosial rata-rata; **Ketiga**, skala tersebut juga belum dicobakan untuk menyelidiki kelompok yang mengalami gangguan- gangguan khusus.

Untuk melengkapi akurasi skala tersebut, maka tugas yang penting selanjutnya adalah menelaah hal-hal dan kondisi yang mengganggu pada partisipasi sosial untuk dapat diketahui hakekat dari perilaku penyimpangan tersebut.

2) Teori Interaksi Sosial

Dalam teori ini, hal yang menjadi tema pokok dalam telaahnya adalah tentang konsep normal dan tidak normal/abnormal. Sebetulnya, baik perilaku normal maupun abnormal adalah hasil dari sebuah interaksi sosial.⁶³ Karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan. Seseorang pun tidak dapat dikatakan sebagai normal murni; sementara orang lain dikatakan sebagai abnormal secara murni. Jadi, tidak dapat dikatakan, bahwa masyarakat itu terdiri dari kelompok normal dan kelompok abnormal secara terpisah. Tetapi, sebenarnya sebuah masyarakat itu dikatakan normal dari satu sisi dan abnormal dari sisi yang lainnya.

⁶² Vembriarto, *Pathologi Sosial*, (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita, 1984), hal. 24.

⁶³ Yang dimaksud dengan interaksi sosial di sini adalah interaksi sosial individu, dalam arti, bagaimana individu itu membentuk dirinya untuk dapat menjadi warga masyarakatnya secara normal. Jadi, bukannya hubungan timbal-balik antar individu dalam konteks memenuhi kebutuhan masing-masing sebagaimana dibahas dalam sosiologi. Periksa, Dwi Narwoko- Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 16.

Berbeda dengan konsepsi lama yang mengatakan, bahwa normalitas dan abnormalitas itu dilihat dengan standar nilai tertentu, sehingga segala upaya menelaah penyimpangan selalu diukur dengan nilai tertentu yang subyektif. Untuk menyempurnakan kelernahan subyektifitas teori itu maka diperlukan adanya *frame of reference* yang sama sebagai standar umum memahami penyimpangan secara obyektif. Disamping itu juga diperlukan adanya standardisasi terminologi dalam melihat masalah sosial.

Berangkat dari pokok pikiran di atas maka teori interaksi sosial berpandangan, bahwa individu normal maupun abnormal itu pada dasarnya merupakan kesatuan sosial organik-psikis, *unity of socio-psychis organic*. Dengan demikian, dapat disepakati sebuah patokan yang seragam bahwa (1) pribadi, baik yang normal maupun yang abnormal, itu dapat dipelajari dan diterangkan sebagai sebuah atau suatu kesatuan. (2) disorganisasi pribadi itu merupakan hasil dari interaksi dari empat faktor; yaitu warisan organik (*organic heritage*), warisan sosial (*social heritage*), pengalaman unik (*unique experience*), dan status keperidabian seseorang dalam suatu fase perkembangan tertentu (*human nature*).⁶⁴

Warisan organik adalah unsur-unsur biologis-psikologis yang membentuk daya hidup manusia berupa keinginan-keinginan, perasaan dan dorongan- dorongan impulsif. Dorongan ini diturunkan oleh pendahulu melalui plasma pembawa sifat dari generasi yang mendahuluinya. Warisan ini bermanifes sejak periode manusia dilahirkan dari orang tuanya yang selanjutnya bersentuhan dengan aturan dan nilai-nilai sosialnya. Dalam konteks ini, tugas orang tua adalah mengelola dan mengatur (mendidik) perkembangan diri sang anak.

Warisan sosial adalah segala sesuatu yang diketahui dan dilaksanakan serta diterima seseorang dalam proses sosialnya, dan juga apa saja yang dipergunakan dari lingkungan alam dan sosialnya dalam bentuk proses

⁶⁴ Vembriarto, *Pathologi.....*, hal. 32.

interaktif sebelum adanya interaksi individu dan lingkungannya, maka dengan ini, warisan sosial pun masih dalam keadaan potensi sebagaimana warisan organik. Oleh sebab itu, sifat warisan sosial adalah belum menentu/definitive. Ketika warisan sosial dan warisan organik berinteraksi maka muncullah apa yang disebut pengalaman unik atau *unique experience*.

Unique experience adalah seperangkat pengalaman seseorang individu yang dibawa sejak kecil hingga dewasa berupa paduan potensi hereditis-biologis dengan lingkungan eksternalnya yaitu kondisi sosialnya yang menjadi pembentuk sikap, karakter, dan perangai seseorang. Walaupun *unique experience* itu merupakan hasil paduan potensi diri dan warisan seseorang, namun karena sifat kedua warisan tersebut adalah potensial, dimana, masih tergantung dari pengolahan dan sintesanya oleh individu, maka hasil *insight*, pengetahuan, dan kesadaran diri individu, itu pasti berbeda satu sama lain. Tidak ada kesamaan secara persis antara individu satu dengan yang lainnya dalam pengalaman unik tersebut, sehingga seseorang dengan yang lainnya memiliki perbedaan sendiri-sendiri yang unik, tidak ada manusia yang sama persis perilakunya dengan pola perilaku orang lain.

Prinsip *adanya* pengalaman unik individu menimbulkan pemahaman bahwa masing-masing orang itu memiliki dunianya sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami, bahwa seseorang itu normal atau tidak normal sangat perlu dipahami *private world* seseorang sebagai hasil interaksi antara *organic heritage* dan *social heritage*.

Human nature adalah sifat, tabi'at, dan watak yang menunjukkan status kepribadian seseorang pada suatu fase perkembangan kepribadian tertentu. Status kepribadian tersebut merupakan hasil interaksi dari warisan organik, warisan sosial, dan pengalaman unik individu. Kepribadian tersebut untuk

selanjutnya bermanifes ke dalam perilaku yang mencerminkan perangai dan moralitasnya.⁶⁵

Sejak awal perkembangan ilmu jiwa modern, psikologi, terutama terkait dengan dunia pendidikan, terdapat pandangan yang berbeda tentang watak seseorang. Pertama berpandangan bahwa sikap dan kepribadian seseorang itu ditentukan oleh sifat dasar pembawaan, hereditas, dan warisan biologis inilah yang menentukan pembentukan sifatnya. Kedua, berpendapat bahwa sifat dan watak seseorang itu ditentukan oleh interaksi seseorang dengan lingkungannya melalui proses pendidikan. Kedua pandangan tersebut tampaknya sama-sama menampakkan ekstremitasnya, sehingga dalam kenyataannya, menunjukkan hal yang berbeda. Dengan demikian muncul aliran ketiga, yaitu aliran konvergensi yang menyatakan, bahwa watak dan perangai seseorang itu ditentukan oleh hasil interaksi antara pembawaan (hereditas) dengan hasil pendidikan sebagai faktor eksternal manusia (warisan sosial).

Berdasarkan sifat dari *human nature* yang merupakan hasil konvergensi dari tiga faktor itu, maka dapatlah diketahui, bahwa kepribadian seseorang itu pasti dapat berubah, tidak rigid dan statis. Status kepribadian seseorang mengalami dinamika seiring dengan pola-pola interaksi faktor-faktornya. Seseorang yang berstatus kepribadian normal dapat bergeser menjadi abnormal pada perkembangan berikutnya, dan begitu juga sebaliknya. Yang jelas, kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh situasi sosio-kultural yang melingkupinya. Seseorang yang memiliki warisan hereditas yang positif dapat menjadi tidak normal ketika hidup di tengah pola dan sistem sosial-budaya yang tidak normal. Begitu juga seseorang yang hidup di tengah kondiasi sosiokultural yang normal, namun memiliki cacat organik, juga berpotensi menjadikan seseorang dengan pola pribadi yang cenderung melakukan penyimpangan

⁶⁵ Dalam perkembangannya, individu tidak lepas dari normalitas atau Abnormalitas itu. Individu normal adalah yang menampilkan tingkah-laku adekwat (serasi dan tepat) yang bias diterima oleh masyarakatnya; sedang yang abnormal adalah pribadi yang tak integrative yang menampilkan perilaku yang mengancam ketentraman masyarakat. Periksa, Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal&Pathologi Seks*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 2 -4.

perilaku. Untuk yang terakhir ini, jelas kiranya, terlihat adanya faktor X yang memang negatif, sehingga seseorang yang demikian disebut sebagai pengidap psikosis dan sejenisnya.⁶⁶

Dalam upaya memudahkan mengatasi gejala abnormalitas dan penyimpangan maka perlu dibuat standar tentang konsep normal dan abnormal. Kedua konsep tersebut harus dilihat sebagai gejala yang sama, yakni sebagai sebuah manifestasi dari status kepribadian seseorang, sehingga untuk melakukan *treatment* terhadap deviasi/penyimpangan individu ataupun kelompok, maka teknik yang tepat adalah dengan melihat serta meneropong terhadap pengalaman unik seseorang, karena ia merupakan simpul kepribadian seseorang yang didasari oleh *organic heritage* dan *social heritage* nya, dan pengalaman unik itu menjadi sarana prosedural bagi terbentuknya status kepribadian seseorang.

Memang mengukur dan memprediksi kepribadian itu sangat sulit, apakah individu akan berkembang menjadi normal atau sebaliknya. Di sinilah pentingnya memahami *unique experience* seseorang serta melacak latar biografinya secara utuh, sebab *treatment* kepribadian memerlukan usaha cermat, bertahap, dan gradual, tidak boleh tergesah-gesah. Dan *treatment*, pada dasarnya, adalah sebuah proses pendidikan, sehingga seorang yang dididikpun tidak berarti orang yang abnormal saja. Orang yang normalpun harus dididik dengan cara memperhatikan dan menguatkan pengalaman-pengalaman positif, agar berkembang terus secara dinamis. Adapun orang yang abnormal dilakukan *treatment* dengan mengganti pengalaman-pengalaman yang salah serta keliru dengan mengisi pengalaman-pengalaman yang baik dan benar.

3) Teori Tingkah laku sosiopathik

Teori ini melihat gejala penyimpangan dari sudut medan individu dan sosial yang melingkupinya. Medan individu mencakup situasi kepribadian, sehingga penyelidikan yang dilakukan adalah menelaah sifat-sifat kepribadian.

⁶⁶ Ibid, hal. 118.

Sedangkan medan sosial adalah berisi tentang situasi norma dan sosiokultur yang melingkungi individu tersebut. Dalam tataran kehidupan sosial, seorang individu bereaksi terhadap kondisi sosiokulturalnya, sehingga dalam suatu *setting* sosiokultural dimaksud dapat muncul berbagai gejala individu seperti kenakalan remaja, *juvenile delinquency*, atau sebalainya menjadi tokoh moralis seperti pemimpin pramuka, dan lain-lain sejenisnya.

Teori tingkahlaku sosiopatik berusaha menghilangkan kekaburan dalam mencermati persoalan karakter dan kepribadian seseorang dan menetapkan tema-tema kunci seperti konsep diferensiasi, deviasi, dan individuasi. Dalam konteks ini, ada ketentuan tentang enam kriteria dalam penyelidikan tingkah laku sosiopatik, yaitu;

- a. Harus ada bidang penyelidikan yang jelas dan tegas tentang batas-batasnya.
- b. Konsep-konsep yang dirumuskan harus berangkat dari postulat yang spesifik dan terbatas agar tidak mengalami bias dalam penerapannya.
- c. Konsep-konsep dimaksud harus menyatakan keserasian dalam sistem agar dapat membangun teoritisasi yang bersifat umum tentang tingkahlaku.
- d. Konsep tersebut harus efektif dalam arti universal-eksklusif, hanya mencakup persoalan tingkahlaku sosiopatik, namun mencukupi tingkahlaku sosiopatik tersebut.
- e. Hipotesa-hipotesa harus serasi secara logis dengan postulat-postulat yang digunakan.
- f. Konsep-konsep yang digunakan harus mengandung pengertian logis dan definitif, tidak mengandung pengertian yang analogis.

Untuk meneliti tingkahlaku sosiopatik ini dapat digunakan beberapa pendekatan, antara lain yaitu pendekatan biologi, pendekatan psikologi-psikiatri, dan pendekatan sosiologis.⁶⁷

⁶⁷ Soerjono Soekanto, Ratih Lestarini (ter.) *Sosiologi Penyimpangan*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 9-10.

Pendekatan biologi biasanya mengarah pada persoalan genetika, yaitu ilmu tentang penurunan atau pewarisan sifat-sifat melalui gen. Dalam hal ini, perilaku sosiopatik/penyimpangan sosial itu bersifat pewarisan, penurunan gen, atau kombinasi gen, dan pewarisan sifat itu berkonstitusi ke dalam suatu tendensi atau kecenderungan ke arah penyimpangan, atau bahwa pewarisan itu bersifat umum dan dalam bentuk konstitusi yang masih lemah, dalam bentuk potensi yang dapat berkembang ke arah tingkahlaku sosiopatik tersebut

Namun demikian, terdapat kelemahan dalam teori ini, yaitu (1) bidang penyelidikannya tidak dibatasi dengan tegas sebagaimana ketentuan pertama. (2) tidak dapat mencakup semua kategori tingkahlaku sosiopatik, bertentangan dengan kriteria keempat di atas. (3) tidak mampu menjelaskan secara detail seluruh proses terjadinya gejala tingkahlaku patologis, bertentangan dengan kriteria keenam.

Pendekatan psikologi menfokuskan telaah pada persoalan inteligensi, sifat-sifat kepribadian, pola dan gaya berfikir, motivasi dan sebagainya. Lebih spesifik lagi, pendekatan psikiatri menelaah tentang konflik kepribadian, misalnya, konflik emosi, kecemasan, apatisme, dan lain-lain. Adapun kelemahan pendekatan ini adalah; (1) tidak dapat menjelaskan tingkahlaku sosiopatik yang bersifat kumulatif-kompleks, bertolakbelakang dengan kriteria ke empat. (2) gejala kultural yang mempengaruhi individu hanya dapat diterangkan sekedar sebagai penjumlahan dari faktor-faktor kejiwaan individu, bertentangan dengan kriteria keenam.

Adapun pendekatan sosiologi, maka berupaya membuat generalisasi-generalisasi dan konsep-konsep tentang perilaku sosiopatologis dari sisi variabel-variabel interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, dan interaksi ini ditilik dari bingkai akseptabilitas perilaku individu oleh lingkungannya. Individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan berperilaku yang diterima dan berstatus normal, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri tidak dapat diterima masyarakat dan berstatus menyimpang,

karena melakukan polanya sendiri dalam bentuk diferensiasi sosial. Individu ataupun kelompok akan dideferensiasikan masyarakatnya dengan beragam cara, seperti; penolakan dan pengasingan sebagai bentuk hukuman sosial. Hukuman ini bersifat dinamis, artinya, dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

Proses deviasi dan reaksi sosial beserta akibat-akibatnya, baik yang struktural maupun yang substansial, dapat diselidiki dari sudut kolektif ataupun distributif. Sudut kolektif mengacu pada diferensiasi sosiopatik, sedangkan distributif mengacu pada individual sosiopatik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibangun asumsi-asumsi tentang perilaku sosiopatik, yaitu bahwa;

- (1) Deviasi tingkahlaku itu merupakan fungsi dari konflik kebudayaan yang menampakkan diri melalui organisasi sosial.
- (2) Terdapat reaksi masyarakat terhadap deviasi yang bergerak dengan kualitas sangat setuju, acuh tak acuh, sampai pada sangar tidak setuju.
- (3) Tingkahlaku sosiopatik adalah deviasi yang menimbulkan reaksi sosial tidak setuju. Reaksi sosial itu sebetulnya merupakan fungsi murni dari sebuah interaksi antara deviasi dan norma kelompok yang dilanggar. Dan reaksi masyarakat itu tergantung pada taraf, jumlah, dan visibilitas dari sebuah deviasi. Reaksi dua kelompok masyarakat terhadap sebuah deviasi dapat berbeda yang hal itu tergantung dari arti signifikansi suatu norma yang dilanggar dari masing-masing masyarakat.
- (4) Pribadi yang deviant adalah pribadi yang peranan, status, fungsi, dan pengertiannya tentang diri sendiri dibentuk oleh seberapa jauh ia menyimpang, taraf visibilitas sosialnya, sikap menyatakan dirinya yang khusus terhadap reaksi masyarakat, dan oleh sifat dan kuatnya reaksi masyarakat tersebut.
- (5) Ada pola pembatasan dan kebebasan dalam partisipasi sosial deviant yang berhubungan secara langsung dengan status, peranan, dan pengertiannya tentang diri sendiri. Struktur biologik yang berpengaruh terhadap partisipasi

sosial deviant hanya sedikit yang mempunyai pengaruh langsung yang berarti.

- (6) Deviasi-deviasi itu diindividuasikan sesuai dengan sifat terbukanya terhadap reaksi masyarakat yang dikarenakan; *pertama*, pribadi itu bersifat dinamik, *kedua*, terdapatnya penstrukturan dalam tiap kepribadian yang merupakan batas-batas dimana reaksi masyarakat dapat berpengaruh.⁶⁸

Dari asumsi-asumsi di atas tampak bahwa disiplin patologi sosial, sebagaimana dalam teori tingkahlaku sosiopatik di atas, berupaya untuk tidak melakukan penilaian dalam melihat gejala penyimpangan. Sebaliknya, berupaya mengkaji secara deskriptif-obyektif tentang gejala-gejala patologis, sehingga memudahkan melakukan treatment yang tepat berdasarkan asumsi- asumsi yang ilmiah.

Latihan

1. Jelaskan teori partisipasi sosial, dan bagaimana menggunakannya dalam mengkaji penyimpangan dan gejala patologi sosial!
2. Apa yang Saudara ketahui tentang teori intraksi sosial?
3. Ahli Ilmu perkembangan jiwa tentang faktor yang mempengaruhi watak atau tabiat seseorang. Jelaskan dan bagaimana dengan sikap Saudara atas perbedaan tersebut?
4. Jelaskan teori tingkahlaku sosiopatik dan aplikasinya sebagai upaya menangani kasus-kasus patologi sosial!

⁶⁸ Dalam pembahasan sosiologi tertentu dijelaskan bahwa ada keterkaitansegitiga antara deviasi/penyimpangan dengan keterasingan serta anomie. Anomie menggambarkan kondisi dimana seseorang tidak dapat membentuk diri mencapai harapan-harapannya, dan ini menimbulkan keterasingan. Dalam kondisi demikian akhirnya ia menampilkan perilaku yang asing dari mendapat respon minus. Periksa David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 129.

Paket 7

GEJALA-GEJALA PENYIMPANGAN DAN PATOLOGI SOSIAL

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pemahaman mengenai konsep penyakit sosial yang secara ilmiah disebut patologi sosial. Isi tema ini adalah tentang kondisi sosial yang sedang terjangkit penyakit-penyakit yang mengancam keberlangsungannya. Oleh karena itu, pembahasan diarahkan memahami arti masyarakat yang sakit disebabkan oleh suatu jenis penyakit di antara penyakit-penyakit sosial yang ada. Dalam paket ini diperdalam wacana mengenai jenis penyakit sosial berupa kenakalan remaja, *juvenile delinquency*. Pendalaman jenis ini diharapkan dalam satu paket untuk selanjutnya dibahas secara mendetail jenis-jenis penyakit yang lain agar mahasiswa-wi mampu memahami akar penyebabnya hingga mampu merancang treatmentnya secara ilmiah.

Dalam pembahasan tentang kenakalan remaja, maka mahasiswa diarahkan mencermati pengertian kenakalan remaja, bentuk-bentuk kenakalan remaja, factor-faktor penyebabnya, lalu upaya-upaya sistematis menanggulangnya. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen memberikan semacam pengantar berupa pointer-pointer seputar pengertian kenakalan remaja, dan beragam bentuknya, dan juga ditayangkan gambar-gambar tentang fenomena kenakalan remaja yang berkembang agar mahasiswa terbawa ke dunia empiri, tidak sekedar memahami kenakalan remaja tersebut secara teoritik-konseptual. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya, mahasiswa-wi mendiskusikannya hingga mampu membangun konsepsi mengenai kenakalan remaja tersebut.

Dalam mendukung proses perkuliahan agar dapat berjalan dengan efektif-efisien, maka dipersiapkan beberapa media seperti LCD, Laptop, dan papan tulis untuk obyek proyeksi LCD tersebut. Selain itu, disediakan juga kertas plano, spidol, dan solasi perekat untuk menampilkan catatan hasil diskusi kelompok atau brainstorming ke depan kelas sebagai bahan diskusi kelas, sehingga diharapkan memudahkan mahasiswa-wi memahami tema paket ini

secara holistic.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan gejala-gejala penyimpangan atau penyakit sosial

Indikator

Setelah perkuliahan berakhir diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat:

1. Menjelaskan konsep patologi sosial dan gejalanya.
2. Menjelaskan makna kenakalan remaja.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kenakalan remaja.
4. Menganalisis faktor-faktor kenakalan remaja.
5. Menerapkan cara-cara penanggulangan kenakalan remaja.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian Patologi Sosial dan Fenomenanya
2. Pengertian Kenakalan Remaja, *Juvenile Delinquency*.
3. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja
4. Faktor-faktor Kenakalan Remaja
5. Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (15menit)

1. *Brainstorming*, tukar wawasan tentang gejala-gejala penyimpangan dan patologi sosial dan mengamati slide tentang realitas sosial yang menyimpang.
2. Komentar dari mahasiswa-mahasiswi atas realitas sosial yang ditayangkan.

Kegiatan inti (70 menit)

1. Mengelompokkan mahasiswa-wi menjadi tiga (3) group.
2. Masing-masing group mendiskusikan tema dan sub tema tentang, yaitu:
Group ke 1 tentang patologi sosial dan gejalanya.
Group ke 2 tentang kenakalan remaja dan bentuk-bentuknya

Group ke 3 tentang faktor kenakalan remaja dan cara-cara penanggulangannya.

3. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok ke depan kelas.
4. Setiap selesai presentasi satu kelompok diadakan diskusi dan tanya-jawab.
5. Pemantapan dan penguatan hasil diskusi oleh dosen pengampu.
6. Pemberian kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk mengklarifikasi hasil diskusi atau menanyakan hal yang belum terbahas dalam diskusi.

Kegiatan Penutup (10menit)

1. Penyimpulan hasil perkuliahan
2. Memberikan semangat belajar lebih lanjut dan mendalami materi
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa/wi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5menit)

1. Memberikan tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) tentang gejala-gejala penyimpangan.

Tujuan

Agar mahasiswa-wi memiliki pemahaman yang utuh tentang gejala-gejala penyimpangan dan patologi sosial melalui kreatifitas pengungkapan ide, dan dari ide-ide yang parsial dari beberapa mahasiswa-wi tersebut terkonstruksi konsep yang utuh dan menjadi definisi yang adekuat tentang masalah sosial dalam suatu *mindmapping*.

Bahan dan Alat

Kertas plano, Spidol berwarna, dan Solasi penempel.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-

masing lima (5) menit!

7. Berikan tanggapan dan klarifikasi terhadap presentasi yang selesai dilakukan!

Uraian Materi

GEJALA-GEJALA PENYIMPANGAN DAN PATOLOGI SOSIAL: KASUS KENAKALAN REMAJA

Definisi Patologi Sosial dan Fenomenanya

Patologi sosial sebagai sebuah fenomena lebih lanjut dan serius dari masalah sosial selalu berkembang adanya seiring dengan perkembangan zaman, sehingga bentuk yang tampak dalam realitas sosial dapat bervariasi. Menurut H. A. Phelp, masalah sosial itu beragam dan dapat dikategori berdasarkan; (a) kelompok usia, sehingga terdapat patologi sosial yang muncul dari anak-anak (penyimpangan anak-anak), penyimpangan remaja (*juvenile delinquency*), penyimpangan kaum lanjut usia (manula); (b) menurut kelas sosial dalam masyarakat; (c) menurut tempat terjadinya, sehingga ada patologi sosial yang bersumber dari masyarakat kota, masyarakat desa, kasus daerah perbatasan, dan lain-lain; (d) menurut jenis kelamin, agama, dan nasionalisme/kebangsaan, misalnya kasus bias jender, radikalisme agama, konflik antar madzhab, fundamentalisme, ekstremisme, terorisme, dan lain-lain; (e) menurut perkembangan zaman, seperti pornografi, pornoaksi, merebaknya narkoba dan narkotika, pencurian pulsa, dan lain-lain; (f) menurut jabatan dan status sosial, misalnya, korupsi, kolusi, nepotisme dan lain-lain; (g) menurut sistem perundangan-undangan dan fungsi institusi sosial, seperti tiranisme, militarisme, mafia hukum, dan lain-lain; (h) menurut sistem ekonomi, seperti monopoli dan feodalisme, globalisme, kapitalisme, dan lain-lainnya; (i) menurut kehidupan politik, seperti partaisme, sosialisme, fasisme dan lain-lain; (j) menurut kebudayaan dan perkembangan sosial.⁶⁹

Pembagian yang bersifat kategorik di atas tidak bersifat baku, tetapi

⁶⁹ H. A. Phelp dan D. Henderson, *Contemporary Social Problem*, (New York: Prentice-Hall, Inc., 19.53), hal. 8.

hanya sekedar untuk memetakan inti problemnya saja. Untuk lebih dapat mencermati bentuk-bentuk patologi Sosial memang harus mengikuti proses perkembangan situasi zaman itu sendiri. Sebagai misal, dunia seni--lebih spesifik lagi, dunia musik--berkemungkinan besar menjadi sumber masalah yang menjadi bentuk patologi sosial, seperti musik yang menjadi pengiring dansa, pengiring pesta seksual, pesta narkoba, dan lain-lain. Akhir-akhir ini di Indonesia juga dihebohkan dengan penyimpangan seni joget irama dangdut yang dikenal dengan 'joget ngebor Inul' yang sempat menjadi polemik dan meresahkan masyarakat. Kesemuanya menunjukkan adanya sifat perkembangan bentuk-bentuk patologi sosial yang dinamik.

Sapari Imam Asyari, dalam bukunya Patologi Sosial, mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk patologi sosial dalam skop lokal, Indonesia, terutama yang berkembang di Jawa yang melembaga dalam akronim *Molimo*. Akronim itu sangat populer sehingga semua orang mudah mengingatnya sebagai perhatian agar jangan melakukannya. Molimo adalah sekumpulan kata yang diawali dengan huruf M yang berjumlah lima, yaitu; maling (termasuk mencuri, merampok, korupsi dan lain-lain), madon (main perempuan, prostitusi, dan lain-lain), minum (narkotik, madat, narkoba, dan lain-lain), main duet (berjudi, totohan, main undian, dan sejenisnya).⁷⁰

B. Simanjuntak mencoba mengidentifikasi kasus-kasus patologi sosial yang begitu banyak yang diantaranya adalah; 1) Samen Leven, yaitu penyimpangan kelompok tak bernikah; 2) Inseminasi, yaitu penyimpangan dalam dunia penghamilan yang tidak dibenarkan menurut aturan agama, misalnya, dari sperma donor; 3) Pornografi, yaitu penyimpangan dengan bentuk menampakkan gambar dan foto-foto cabul dan bugil dengan tujuan merangsang dan memenuhi kebutuhan seks; 4) Radikalisme, yaitu kelompok yang menentang situasi mapan, menginginkan perubahan sistem sosial, ekonomi, politik, dan bahkan agama secara mendasar; 5) jual beli anak /trafficking, yaitu kejahatan dengan menjual belikan manusia, terutama anak-anak dan perempuan untuk dibekerjakan atau terkadang dijadikan obyek penyimpangan seksual; 6)

⁷⁰ Sapari Imam Asyari, Patologi Sosial (Surabaya: Usaha Nasional, tt), hal. 68.

Korupsi, yaitu kejahatan keuangan yang merupakan kekayaan suatu Negara atau lembaga yang akibatnya merugikan masyarakat dalam dunia ekonomi atau pemenuhan kebutuhan; 7) promiskuitas, homoseks, heteroseks, incest, prostitusi, dan pelacuran, yakni persetubuhan yang dilakukan di luar nikah dan cara-cara yang tidak sah; 8) histeria, yaitu gejala kelumpuhan fisik, misalnya, aponia yang diakibatkan oleh tidak adanya semangat dan cita hidup, takut hidup, shock, dan lain-lain; 9) sadisme, yaitu penyimpangan berupa kekerasan mulai dari penyiksaan sampai pembunuhan; 10) bunuh diri dan kebosanan hidup, termasuk juga di sini yaitu mogok makan, dan lain-lain ; 11) adopsi boneka/bayi untuk terapi; 12) generasi punk, yaitu kelompok generasi muda yang menolak peraturan-peraturan yang membatasi, mereka tampil dengan perilaku yang nihil dari nilai normatif, berambut semerawut, dan lain-lain; 13) klub malam dan pramuria, yakni kelompok wanita dengan pasangan-pasangannya yang melakukan percintaan yang menyimpang yang biasanya melembaga dalam tempat-tempat discotik dan dansa sampai pada persetubuhan; 14) SARA, yaitu konflik sosial yang mengarah pada disitegrasi sosial yang disebabkan oleh faktor sosial antargolongan, ras dan agama; 15) stress, yaitu penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh kekalutan psikologis, cemas, takut dan sebagainya; 16) Hooker for God,⁷¹ yaitu suatu penyimpangan berupa layanan seksual oleh kaum wanita untuk orang yang menginginkannya sebagai hadiah atas nama tuhan agar mereka masuk ke dalam iman pada Tuhan. Fenomena ini pernah berkembang di Amerika sebagai sempalan juga dari kelompok *children of God*. Penyimpangan ini tergolong dari sebuah penyimpangan keagamaan yang pada akhirnya mendapat tentangan keras dari kaum konservatif agama.

Dilihat dari segi pelaku penyimpangan, maka patologi sosial itu dapat dilabeli dengan sifat-sifat yang bervariasi pula. Sebagai contoh, misalnya, dalam kasus Goyang Ngebor Inul, jika ditilik dari sisi pelaku-pelaku goyang Ngebor itu beragama Islam, maka patologi sosial tersebut dapat dianggap sebagai

⁷¹ B. Simanjuntak, *Patologi Sosial*, (Bandung, Taisito, 1985), hal. 86.

patologi muslim, sebagai fenomena lain dari penyimpangan keagamaan Islam /patologi muslim. Termasuk hal itu juga adalah munculnya wanita-wanita muslimah yang lepas jilbab karena alasan emansipasi yang pada ujungnya melahirkan keresahan di tengah masyarakat muslim. Dengan demikian, patologi sosial itu sangat berkembang dinamik seiring dengan perkembangan teknologi juga.

Dari berbagai jenis dan bentuk patologi sosial seperti di atas, maka hanya beberapa saja yang akan dikaji secara analitis di sini, yaitu tentang kenakalan remaja/*juvenile delinquency* dan korupsi, pornoaksi, radikalisme Islam dan terrorisme. Masalah tersebut dipilih adalah karena sangat relevan, menarik, dan menghangat pada dekade 2001 hingga sekarang ini.

Kenakalan Remaja/ *Juvenil Delinquency*

A. Pengertian kenakalan remaja

Kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dipraktikkan anak-anak remaja, yaitu mereka yang menginjak dewasa namun belum dewasa, berupa pelanggaran nilai-nilai dan norma masyarakat banyak. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, melanggar norma susila, dan melawan hukum.

Paul Lappan menegaskan bahwa “*Juvenile delinquency is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction through he may be not different until the time of court contact and adjudication at any from masses of children who are not delinquency*” Artinya, kenakalan remaja adalah dapat digambarkan sebagai seorang yang telah melanggar ketentuan hukum dimana dia mungkin berbuat hal yang tak mencolok berbeda dari yang lainnya sampai akhirnya diketahui mengganggu kebaikan masyarakat dan merekapun menjadi baur dengan para remaja lain yang baik-baik, dan tidak menyimpang.

Menurut Benyamin Fine dinyatakan; “ *Juvenile delinquency is a pattern of behavior manifested by a youth below the age of eighteen that is contrary to the laws of the land, and the accepted mores, and that is antisocial*

in character”, and it is “ a serious type of deviation contrary to law”⁷² Artinya, kenakalan remaja adalah sebuah bentuk perilaku remaja seusia 18 tahunan yang menentang hukum yang berlaku di masyarakat serta menerjang pola perilaku yang sudah berkembang normal di masyarakat yang menampilkan sikap anti sosial dan mengancam undang-undang kebaikan yang berlaku.

Maud A. Merrill mengatakan: “ A Child is classified as a delinquency when his anti-sosial tendencies appear to someone to be so grave that he become or ought to become the subject of official action.”⁷³ Artinya, anak-anak dapat diklasifikasi sebagai pelaku nakal ketika perilaku anti-sosial cenderung tampak melawan hukum dan berakibat diharuskannya penegakan atau penindakan. Selanjutnya, William G. Kvaraceus berpendapat bahwa: “ Most Statutes point out that delinquent behavior constitutes a violation of the law or municipal ordinance by a young person under certain age.”⁷⁴ Artinya, banyak pelajar menegaskan bahwa perilaku penyimpangan atau kenakalan itu menampak pada kekerasan atau penentangan hukum atau kondisi yang berlangsung baik oleh pemuda di bawah usia stabil.

B. Simanjuntak menegaskan, bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan anak-anak yang melanggar norma-norma, baik norma sosial, norma hukum, norma kelompok maupun norma agama yang berakibat mengganggu ketenteraman masyarakat, sehingga mendorong pihak yang berwajib untuk melakukan tindakan hukum berupa pengasingan, penghukuman, dan sejenisnya.⁷⁵

Berdasarkan pendapat tentang pengertian kenakalan remaja di atas, dapatlah dipahami, bahwa terdapat dua kelompok utama tentang kenakalan

⁷²Bunyamin Fine, *One Million Delinquents*,(New York. The New American Library, 1975), hal. 22.

⁷³B. Simanjuntak;, *Latar Belakang Kenakalan Anak*,(Bandung. Alumni, 1975), hal. 74.

⁶ William C. Kvaraceus, *Dynamic of Delinquency*,(Ohio Charles E . Merrills Book, Inc. Columbus, 1966), hal. 31.

⁷⁵ B Simanjuntak, *Latar belakang Kenakalan Anak*, hal. Hal. 76.

remaja tersebut; *Pertama*, yaitu kenakalan yang bersifat a-moral dan anti-sosial. Karena kenakalan ini tidak diatur di dalam undang-undang, maka tidak dapat digolongkan ke dalam pelanggaran hukum; *Kedua*, adalah kenakalan yang bernuansa melanggar hukum.⁷⁶

B. Bentuk-Bentuk Kenakalan Remaja

Sebagaimana di atas tentang kategori kenakalan remaja, maka yang dibahas di sini adalah kategori yang kedua yaitu kenakalan remaja yang tidak dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hukum. Kenakalan ini disebut dengan *hidden delinquency*.

Bentuk-bentuk dari kenakalan ini adalah:

1. membohong, memutarbalikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutupi kesalahan.
2. membolos, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
3. kabur, pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tua, atau berupa menentang keinginan orang tua.
4. Keluyuran, baik sendirian maupun berkelompok, yaitu pergi tanpa tujuan yang tertentu, biasanya bersifat iseng, sehingga sering menimbulkan ekses kurang baik.
5. memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain seperti pisau, pistol, dan lain-lain.
6. menjalin pergaulan dengan teman yang berpengaruh buruk sehingga mudah terjerumus pada perbuatan-perbuatan kriminal.
7. begadang, berpestapora semalaman, tanpa pengawasan sehingga terdorong untuk melakukan tindakan melawan norma dan hukum.
8. membaca bacaan dan buku-buku cabul serta menggunakan bahasa-bahasa yang tidak senonoh dan tidak sopan.
9. mudah terjerumus dalam perbuatan melacur atau mendatangi pelacuran

⁷⁶D. Gunarsa Singgih, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978), hal. 31.

untuk tujuan menenangkan diri, suka berpakaian yang aneh dan tidak pantas, minum minuman keras, ganja dan narkoba, yang berakibat merusakkan fisik dan jiwanya.

Adapun kenakalan remaja yang tergolong dalam tindakan kriminal dan melawan hukum, antara lain adalah:

1. berjudi dengan menggunakan uang dan taruhan dengan menggunakan benda- benda yang lain.
2. mencuri, mencopet, menjambret, dan merampas dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan.
3. melakukan penggelapan barang dan lain-lain.
4. melakukan penipuan dan pemalsuan.
5. melanggar tata susila, memiliki, dan menjul gambar-gambar porno, film porno, pemerkosaan, dan lain-lain.
6. melakukan tindakan anti-sosial, berbuat yang merugikan orang lain, melakukan kekerasan, perkosaan, pembunuhan, dan lain-lain.
7. melakukan pengguguran kandungan akibat perbuatan seksual yang menyimpang dan lain-lain.

C. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Anak/Remaja

Agar dapat memahami lebih dekat tentang kenakalan remaja, terutama untuk dapat mengambil langkah treatment, sangat diperlukan untuk memahami akar penyebab yang melatar belakanginya. Secara garis besar diketahui bahwa penyebab kenakalan remaja tersebut dapat bersifat psikologis, dan juga dapat bersifat sosiologis.

1. Faktor Psikologis

Peninjauan aspek psikologis berupaya melacak akar penyebab kenakalan remaja dari sisi dalam/internal dan kepribadian seseorang. Dalam hal ini dapat menggunakan terori-teori psikologi, misalnya; a) teori kepribadian bio-fisis; b) teori psikoanalisa Freud; c) teori individual-Alfred Adler; dan d) teori psikologi kolektif- C.G. Jung.

(1) Menurut teori kepribadian bio-fisis, manusia adalah sebuah sistem pribadi yang sangat kompleks, tersusun dari aspek individualitas biologis dan individualitas psikologis. Kartini Kartono menyusun skema tentang unsure-unsur kepribadian manusia yang meliputi:

- a) Vitalitas fisis dan vitalitas psikis. Vitalitas merupakan daya hidup yang bersifat jasmani, seperti, ketahanan terhadap penyakit, awet muda atau cepat tua. Hal ini bersifat hereditis. Adapun vitalitas psikis yaitu daya kehidupan yang erat kaitannya dengan konstitusi jasmaniah dan berfungsi sebagai energi kehidupan. Aspek ini dapat berbeda dalam sisi kekuatan dan kontinuitasnya.
- b) Temperamen. Ia merupakan konstitusi *aku-psikis* dalam hubungannya dengan jasmaniah, bersifat hereditis, oleh karena itu ada sifat yang tidak dapat diubah.

Heyman dan Wiersman membagi tipe temperamen berdasarkan fungsinya yaitu: a) tipe aktif, dimana, seseorang dapat mudah bergerak, cepat dan memiliki kesiapsiagaan umum dalam bertindak; dan tipe non-aktif, dimana seseorang bersifat lemah, kurang aktif bergerak, dan lain-lain: b) tipe emosional, dimana, seseorang memiliki kepekaan tinggi, memperhatikan soal-soal kecil, mudah meneteskan air mata, mudah tersentuh, pun juga mudah bergembira: c) terdapat fungsi primer dan skunder. Fungsi primer mengakibatkan karakter seseorang yang mudah terarah langsung pada obyek dan stimulus yang ada. Sedangkan fungsi skunder menyebabkan seseorang berwatak senantiasa terpengaruh oleh stimulus walaupun sudah berlalu lama, dan sulit dihilangkan.

Galenus membagi empat tipe temperamen manusia, antara lain yaitu;

- a) Tipe sanguinicus. Sifat yang dominan di sini adalah darah sehingga seseorang cenderung bersifat gembira dan suka berubah.
- b) Tipe Flegmaticus. Sifat dominannya bersumber dari lendir, sehingga seseorang cenderung bersifat tenang, tidak suka banyak gerak.
- c) Tipe cholericus. Sifat yang dominan di dalam jasmaninya adalah

empedu kuning, sehingga seseorang di sini bersifat hebat, lekas marah dan mudah tersinggung.

- d) Tipe melancholis. Sifat dominannya bersumber dari empedu hitam, sehingga seseorang di sini bersifat pesimistis dan suka bersedih hati.

Disamping pembagian di atas masih terdapat pembagian kepribadian berdasarkan derajat konstansi, yakni kelekatan dan ketetapan karakternya, menjadi delapan cirri kepribadian, yaitu:

- a) amorf; tidak aktif, tidak emosional, primer (nAn Ep, n berarti non).
- b) Apathies; tidak aktif, tidak emosional, sekunder (nAn Es)
- c) Nerveus; tidak aktif, emosional, primer (nAEp)
- d) Sentimental; tidak aktif, emosional, sekunder (nAES)
- e) Sanguinus; aktif, tidak emosional, primer (AnEp).
- f) Flegmatic; aktif, tidak emosional, sekunder (AnEs).
- g) Choleric; aktif, emosional, primer (AEP)
- h) Gepassioneerd; aktif, emosional, sekunder (AES)

Selanjutnya adalah karakter, yaitu sebagai aku-psikis yang mengaktualkan diri dalam bentuk tingkah laku dan totalitas diri. Ia terbentuk dari sifat-sifat hereditis dan pengaruh interaktif dengan lingkungan sekitar. Jadi, karakter merupakan bentuk organisasi dari kehidupan perasaan dan kehendak yang diarahkan kepada sistem nilai. Elemen-elemen dari karakter adalah; a) dorongan/ drives; B) instinct; c) reflex, dan sifat-sifat karakter, yaitu kebiasaan dan kecenderungan; d) organisasi perasaan, emosi dan sentimen; e) minat atau interest, dan f) kemauan.

Bakat adalah totalitas diri yang mencakup faktor yang sudah ada sejak lahir, dimana, seseorang punya kecenderungan untuk mengembangkan dirinya dalam suatu keahlian dan kecakapan-kecakapan tertentu. Adapun inteligensi adalah kualitas kecerdasan dan kecerdasan individu. Prof. Cyril Burt pernah meneliti bahwa *juvenile delinquency* banyak dilakukan oleh anak-anak yang intelegensinya berada antara 85 s/d 90, termasuk dalam kategori *fleeble minded*. Namun demikian dapat dijumpai pula bahwa penjahat ada yang

memiliki IQ yang superior.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi kepribadian itu bersifat dinamis. Karenanya turut menentukan cara bertindak yang unik dalam penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, hal yang pokok adalah terdapatnya hubungan yang erat antara hereditas pribadi dengan dinamika lingkungan. Bila sejak awal lingkungan memberikan pengaruh yang baik maka memungkinkan pribadi seseorang untuk mengembangkan sifat dan karakter yang baik pula. Sebaliknya, lingkungan yang menekan, menyediakan hal-hal yang negatif, akan menyebabkan watak pribadi yang cenderung melakukan kejahatan belaka. Jadi potensi hereditas dan lingkungan sangat berperan dalam membentuk watak kepribadian seseorang.

- (2) Menurut teori psikoanalisa Sigmund Freud (tokoh Austria 1856 - 1939), bahwa gejala-gejala jiwa seseorang itu bukanlah merupakan aktivitas sadar, namun merupakan manifestasi dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar yang terdiri dari sembilan perseluluh (9/10) dari aktivitas kejiwaan manusia adalah merupakan sumber energi psikis manusia yang akan menimbulkan gejala neorosis jika tidak terdapat penyeimbangan yang harmonis.

Berdasarkan teori ini, gejala kejiwaan dan aktivitas manusia itu dipengaruhi oleh tiga sumber energi psikis, yaitu Id, Ego dan Super Ego. Id merupakan sumber energi dasar yang berupa instink-instink biologis, terutama instink seks dan agresivitas. Insting ini sangat primitif sifatnya, mewakili sisi bawah sadar manusia, yang sering menampak dalam proses mental kanak-kanak, tidak memiliki daya kendali di dalamnya. Sedangkan Ego merupakan proses mental yang logis dan berupaya menemukan realitas yang sesungguhnya. Ego berfungsi untuk mengendalikan impuls-impuls Id sehingga ia sering menampak dalam proses perencanaan aktivitas, mengorganisir teknik yang obyektif dan mengatur mekanisme tindakan yang tidak merugikan diri sendiri. Adapun Super Ego maka lebih merupakan fungsi mental yang berupa hati nurani, menerangi dan membantu Ego agar lebih

dapat mengarahkan Id pada realitas yang benar. Super Ego dibentuk dengan mengenalkan aturan-aturan norma dan moral sosial melalui orang tua dan atau pendidik yang memperkenalkan pada seseorang dengan teknik memberi sanksi kalau seseorang menyimpang, dan sebaliknya, memberi ganjaran dan penguatan jika seseorang dapat berbuat secara terpuji.

Antara Id dan Ego sering mengalami benturan yang mengarah pada konflik batin dan suasana jiwa yang tidak harmonis, terutama dorongan Id yang berbenturan dengan nilai-nilai moral dari Super Ego. Akibat dari ini adalah timbulnya rasa malu dan dosa. Dalam kondisi ini, bila Ego-nya lemah, maka timbul konflik internal/ batin yang terekspresikan dalam tindakan-tindakan yang patologis dan menyimpang. Tetapi, jika Super Ego terlalu kuat maka seseorang cenderung akan bersifat menyendiri, suka menyalahkan diri sendiri, tanpa ada kemampuan berkreasi. Kondisi demikian juga berakibat negatif dimana seseorang dapat terdorong untuk berperilaku anti-sosial, mudah tersinggung, dan lain sebagainya.

Tegasnya, menurut teori ini, faktor -faktor patologi sosial itu adalah adanya pertempuran batin antara komponen Id, Ego, dan Super Ego, sehingga menimbulkan konflik dan kegoncangan jiwa dan tidak ada kemampuan individu untuk mengelolanya secara harmonis.

(3) Teori Individual Alferd Alder

Teori ini berasumsi sebagaimana teori Freud yang membagi struktur kejiwaan menjadi tiga. Hanya saja, teori ini tidak sependapat dengan Freud yang mengatakan, bahwa energi pokok dan dasar individu adalah instink seks dan agresifitas. Teori individual Alder ini (1870-1937) menganggap Ego sebagai sumber energi pokok kejiwaan manusia. Ego atau rasa eksistensi aku merupakan dorongan prestasi, harga diri/ kehormatan, dan kekuasaan pada manusia. Yang dianggap merintang ke -aku-an ini adalah rasa moral dan keterbatasan rohani dan cacat fisik yang diterima.

Dalam diri manusia terdapat dua rasa fundamental, yaitu minder dan rasa sosial. Minder atau inferioritas dalam diri sering dicarikan kompensasinya. Terdapat tiga macam kompensasi; yaitu (a) kompensasi sejati

berapa upaya mengimbangi, melakukan prestasi kerja yang kongkrit yang berguna untuk orang lain; dan (b) kompensasi semu, misalnya berusaha mengimbangi kekurangan dengan melakukan aktivitas yang sesuai dengan inti kepribadian dan kebutuhan masyarakat. Sebagai misal, seseorang ingin menjadi orang terhormat dan kaya, yang karena kegagalannya, maka ia melakukan pencurian dan penipuan untuk mencapainya. Kompensasi semu ini ada dua macam; *pertama*, kompensasi aktif, misalnya; fanatisme, berlagak, agresif, berperilaku diktator, sadis, main kuasa, mengkritik pada bukan tempatnya, berkebut-kebutan dan lain-lain; *kedua* adalah kompensasi semu pasif, misalnya, menyendiri, berdiam diri, takut resiko, malas, menjilat, mentaati dengan rasa kalah, dan lain-lain.

Adapun rasa sosial, maka merupakan areal perluasan jiwa, dimana seseorang akan mengalami stagnasi dan regresi jika tidak mengembangkan rasa sosial ini. Seseorang akan menjadi egoisme, tidak mau tahu orang lain jika tidak mampu mengembangkan rasa sosialnya. Karena itu rasa ini harus dikembangkan tanpa berhenti, yaitu dengan melakukan adaptasi dan penyesuaian diri, serta dapat mengembangkan sikap terbuka. Namun sikap terbuka akan mengalami hambatan jika lingkungan sosio-kultural tidak kondusif seperti intoleran, diskriminatif, dan lain-lain.

(4) Teori psikologi kolektif - C. G Jung.

Menurut teori ini, manusia sudah memiliki instink-instink primitif (*primitive instincts*) sejak lahir, bahkan sejak zaman nenek moyang dahulu ikut mempengaruhi corak kejiwaan manusia yang berada dalam ranah bawah sadar generasinya. Jung (1875- 1961) juga menciptakan struktur kejiwaan sendiri yang prinsipnya sama dengan Freud yaitu adanya kombinasi antara ranah sadar dan bawah sadar kejiwaan. Hanya saja, ia berbeda dengan Freud dan memisahkan diri darinya karena tidak sependapat dengan konsep Oedipus Complex Freud yang menganggap bahwa kualitas diri individu bersumber dari rasa dosa dalam image Oedipus Complex tersebut.

Menurut Jung, sejak lahir, manusia sudah membawa instinks agama dimana terdapat dorongan dalam jiwanya untuk selalu berhubungan dengan

dimensi *trancendent* untuk menciptakan kesucian jiwanya. Jadi, teori ini melihat manusia adalah sebagai makhluk potensial sejak lahir, tidak kosong jiwanya. Tugas manusia dalam hidupnya adalah mencari jati diri dan makna hidupnya. Kalau tidak, maka ia akan kembali pada perilaku primitif yang egois, minder, dan sebagainya. Dan penyimpangan itu terjadi jika dalam usaha menciptakan dinamika hidupnya terhalang tanpa ditemukan penyelesaiannya.

2. Faktor Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis, penyimpangan dan kenakalan remaja itu terjadi karena tidak adanya integrasi lembaga-lembaga sosial, tidak adanya norma yang jelas, dan goyahnya sistem sosial yang tidak mampu memberikan pedoman nyata bagi warga, terutama remaja, untuk berperilaku yang wajar dan diterima oleh komponen masyarakat. Dalam kondisi demikian, remaja akan sulit melakukan *adjustment* dengan lingkungan sekitar.

Diantara faktor sosial yang menyebabkan retaknya kehidupan sosial dan menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang para remaja adalah; faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat.

(1) Keluarga

Kedudukan keluarga sangat vital dalam proses pendidikan anak-anak dan remaja. Jika pendidikan keluarga itu gagal maka anak-anak cenderung melakukan tindakan yang menyimpang di tengah masyarakatnya. Kenakalan remaja yang disebabkan oleh gagalnya keluarga biasanya karena disfungsi keluarga, misalnya, terjadinya disharmoni/ *broken home*, pendidikan yang salah, terjepitnya remaja antara norma-norma lama dengan norma-norma yang baru, dan karena tertolakannya seorang anak/remaja.

Keluarga yang disharmoni menyebabkan anak-anak tidak mampu mencari identifikasi diri sehingga akan mengalami bias dan bingung dalam perkembangan jiwanya. Faktor disharmoni dan *broken home* keluarga itu diantaranya adalah karena; 1) perceraian yang mengakibatkan kebimbangan anak dalam memilih figure dan proses identifikasi diri; 2) adanya unit keluarga yang tidak lengkap karena terciptanya keluarga di luar nikah resmi, misalnya; 3) tidak adanya komunikasi yang sehat antara unsur-unsur

keluarga;4) kematian salah satu orang tua sehingga sumber kasih sayang dalam keluarga menjadi hilang; 5) konflik keluarga karena perbedaan pendirian masing-masing orangtua.

Kesalahan pendidikan dalam keluarga juga memainkan peran penting terhadap perilaku remaja yang menyimpang. Di antara disfungsi pendidikan keluarga tersebut adalah sifat over reaktif dalam pendidikan. Misalnya, karena kegagalan orangtua dimasa lalu, dan jangan sampai sang anak itu mengulangi kesalahan orangtua, maka anak ditekan untuk melakukan target sesuatu, atau sebaliknya, anak terlalu dimanja untuk memenuhi tujuan pendidikan tertentu. Dalam kondisi demikian, anak akan mengalami depresi dan gangguan kejiwaan yang diekspresikan dalam perilaku sosialnya yang nakal/menyimpang.

Disfungsi pendidikan keluarga juga terjadi dalam bentuk lemahnya peranan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, norma-norma sosial dan religius, pada anak sehingga cenderung dicarinya nilai di luar keluarga yang relatif tidak terkontrol.

Adanya konflik nilai antara yang lama dan yang baru dalam keluarga juga menyebabkan terkendalanya komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak, terutama, jika orang tua acuh terhadap nilai-nilai itu. Dalam kondisi demikian, anak cenderung mengambil sikap tertutup, dan mengambil sikap menyendiri.

Tertolakannya anak secara emosional dalam keluarga juga berkontribusi terhadap munculnya sifat anti-sosial anak, kecemasan dan kegelisahan. Anak yang ditolak dalam keluarga biasanya mengembangkan rasa benci pada sesamanya. Dalam kondisi demikian, penyimpangan, kriminalitas, agresifitas yang dilakukan anak-anak merupakan sebuah kompensasi. Karena itu, penolakan terhadap anak sangat berakibat buruk padanya. Penolakan terhadap anak dapat terjadi karena cacat yang dialami anak baik bersifat psikis maupun fisik.

(2) Sekolah

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal sebagai tempat anak-

anak menempa keahlian dan potensinya agar dapat mencapai perkembangan pribadinya secara maksimal untuk dapat berperan dengan baik di tengah masyarakatnya. Pada prinsipnya, sekolah merupakan kelanjutan dari pendidikan keluarga. Dalam sekolah, pendidikan dikendalikan oleh kurikulum dan strategi pembelajaran yang dipraktikkan oleh komponen operasional pendidikan yaitu Guru dan murid.

Hubungan guru-murid sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Demikian juga, pola pendidikan dan tujuan pendidikan yang dirumuskan. Kesalahan pendidikan berakibat gagalnya anak untuk mencapai perkembangan yang sempurna.

Paulo Freire menggagas sebuah format pendidikan kritis,⁷⁷ dimana, siswa harus menjadi subyek belajar bersama dengan guru, bukannya guru sebagai penentu pendidikan/subyek, sementara siswa menjadi obyek yang pasif. Pendidikan yang selama ini adalah bersifat *narrative education* dimana guru menentukan arah pendidikan, maka pola pembelajarannya bersifat monologis, murid sebagai pihak yang diajar, dan guru sebagai pengajar. Pola seperti ini melahirkan bentuk pendidikan yang disebut *banking concept*.⁷⁸

Pendidikan di sekolah dengan paradigma seperti itu menimbulkan kekecewaan pada siswa. Mereka cenderung bosan karena tidak berkesempatan untuk dialog mengembangkan potensi kepribadiannya sendiri. Akibat dari itu adalah kompensasi untuk membolos dan melakukan kenakalan-kenakalan sebagai pelampiasan nafsu tidak puas di sekolah tersebut.

(3) Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor eksternal proses perkembangan pribadi

⁷⁷ Pendidikan Kritis adalah sebuah paradigma pendidikan yang menekankan siswa atau peserta didik sebagai subyek pendidikan yang harus diberi porsi seluas-luasnya untuk mengembangkan diri dengan cara berdialog secara harmonis dengan seluruh komponen pendidikan, terutama guru

⁷⁸ *Banking Concept* adalah sebuah bentuk pendidikan dimana guru menjadi subyek yang bercerita, tidak dinamik, tidak hidup, beku, terkotak-kotak, dan dapat diramalkan akibatnya. Sementara, murid menjadi sebuah container atau wadah besar yang menerima wejangan guru tanpa harus punya aspirasi dan konsep diri, yang mirip dengan deposito tempat menyimpan perbendaharaan pengetahuan pasif. Lihat Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, (New York: the Scabury Press, 1986), hal. 59.

anak/remaja. Dalam perkembangannya, masyarakat selalu berubah seiring dengan adanya inovasi, temuan-temuan baru, dan sebagainya. Disamping itu, arus globalisasi telah jelas membawa arus perubahan masyarakat yang sangat kuat, sehingga muncullah berbagai problem sosial. Dalam era glabalisasi seperti sekarang, persinggungan antar budaya dan tradisi tidak dapat dihindari, apalagi, dalam wilayah urban sehingga cara berfikir manusia dapat bergeser dari yang sakralistik menjadi profan/ desakralistik.

Kondisi sosial seperti ini menimbulkan gejaia-gejala seperti disorganisasi sosial, *cultural lag*, patologi sosial, dan *mental disorder*. Disorganisasi Sosial adalah proses melemahnya norma-norma sosial akibat dari perubahan sosial, corak norma yang diwariskan tidak lagi mampu mengikat dan mengendalikan individu. Akibatnya adalah muncul konflik dan pertentangan norma yang berakibat pada sikap ambivalens dalam menentukan norma perilaku.

Cultural lag adalah peristiwa pertumbuhan budaya yang tidak serasi, terdapat unsur-unsur budaya yang mengalami kelambanan sehingga menyebabkan ketimpangan dalam masyarakat. Gejala ini muncul ketika ada unsur budaya materiil yang lebih cepat berkembang tidak sebanding dengan unsur budaya non materiilnya. Dalam keadaan ini seseorang lebih cenderung untuk memilih hidup bebas yang berakibat pada perilaku patologis.

Perilaku *patologis* biasanya ditandai dengan adanya konflik-konflik batin antar individu dan kelompok yang berakibat pada disharmoni dan kekecewaan masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan gejala neurosis dan kecemasan sehingga seseorang cenderung melakukan pertahanan diri ataupun kompensasi dengan menempuh mekanisme negatif dan berakibat pada kondisi *mental disorder*.

Mental disorder adalah sebuah kondisi dimana seseorang tidak dapat melakukan *adjustment* dengan lingkungannya karena terbelahnya pribadi. Biasanya kondisi pribadi seperti ini cenderung melakukan kompensasi dengan melakukan tindak kriminal dan penyimpangan, anak remaja jika mengalami kondisi demikian mudah sekali berkiblat pada budaya luar yang dapat

memberikan pemuasan, misalnya, budaya mabuk-mabukan, mencopet, dan lain-lain.

D. Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja

Upaya menanggulangi kenakalan remaja memang memerlukan berbagai perspektif karena faktor penyebabnya juga sangat kompleks sebagaimana di atas. Disamping itu, alasan lain adalah, bahwa masa remaja merupakan masa yang cukup labil karena ia berada dalam masa pancaroba dan taraf perkembangan serta pertumbuhannya yang pesat. Pembinaan remaja *delinquent* dapat dilakukan secara terencana dan terpadu dengan melibatkan unsur lembaga pendidikan baik formal dan non-formal. Pendidikan hendaknya diarahkan untuk menumbuhkan bakat dan minat anak didik menuju kepribadiannya yang khas agar dapat berperan secara wajar di tengah masyarakatnya.

Pembinaan remaja dapat ditempuh dengan memperhatikan perkembangan psikis dan lingkungan sosialnya yang berperan besar dalam mengantar remaja dalam meniti karir, minat, dan bakatnya. Anak dan remaja yang melakukan perilaku menyimpang haruslah tetap dianggap sebagai warga masyarakat yang dalam perspektif ilmu hukum harus dilihat sebagai individu dalam status tertentu. Untuk menanganinya harus melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, orangtua, dan pelaku itu sendiri.

Aspek psikis dan mental memerlukan analisis yang tajam, sebab dalam proses perkembangan itu remaja butuh perhatian dan kasih sayang serius dari semua pihak, terutama keluarga. Di sini, peran orangtua sangat dominan.

Untuk menanggulangi kenakalan remaja tersebut analisis sosial harus menjadi landasan utama dalam melakukan rehabilitasi, terutama anak-anak yang terjepit oleh norma-norma lama dan baru. Disamping kondisi keluarga harus diperbaiki, juga kondisi sosialnya harus kondusif. Norma-norma sosial harus serasi, *equilibrium*, dan seimbang. Karena itu, pendidikan sosial harus mampu menjembatani kebutuhan keluarga, misalnya, disediakan aktivitas mengisi waktu senggang. Jadi komunikasi antara kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus ditingkatkan untuk dapat bekerjasama dalam

membina anak-anak/remaja.

Keluarga harus berfungsi sebagai pusat studi dan kebudayaan dasar bagi anak. Untuk itu harus ada pembagian tugas yang baik antara elemennya. Ayah dapat berperan sebagai dasar identifikasi, bertanggungjawab, dan mencukupi kehidupan keluarga, pelindung dari ancaman dari luar, penghubung dengan dunia luar. Ibu dapat berperan sebagai pemberi rasa aman, tempat mencurahkan isi hati, manager kehidupan keluarga, pembimbing kehidupan rumah tangga, pendidik segi emosional, dan penyimpan tradisi.⁷⁹

Disamping itu, secara umum, keluarga harus mampu menemukan masalah, menganalisis, dan memecahkan problem yang dihadapi anak dalam hidupnya. Hal yang dapat dilakukan adalah; (a) memahami pribadi anak/remaja; (b) memupuk kesanggupan anak untuk dapat menolong diri sendiri; (c) mendorong agar mau mengembangkan bakat dan minatnya; (d) mengarahkannya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya; (e) membimbing untuk mampu menaati nilai-nilai dan norma yang berlaku.

Sekolah harus berfungsi membantu kebutuhan keluarga dalam mendidik anak dan remaja. Sekolah harus menjadi lembaga yang menerima mandat pendidikan keluarga. Untuk itu tugas sekolah adalah; (a) menciptakan suasana yang baik, membangun kondisi belajar yang kondusif bagi siswa agar dapat berkreasi. Karena itu sekolah dapat menempuh pendidikan ekstrakurikuler seperti; membentuk pramuka, membentuk lembaga kesenian, membentuk klub-klub olahraga, mendirikan badan keamanan lalulintas (BKL) dan patroli keamanan sekolah, dan mengadakan *studi tour* untuk mengembangkan wawasan kepemudaan; (b) membangun kerjasama antara orangtua dan wali siswa secara teratur, dan secara berkala membahas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak/ remaja.

Masyarakat sebagai unsur sosial yang lebih luas harus mampu mendukung gagasan-gagasan baik yang telah dibangun antara pihak keluarga dan sekolah. Untuk itu peran masyarakat dalam konteks menanggulangi

⁷⁹ B. Simanjutak, *Latar Belakang Kenakalan Anak*, hal. 183

kenakalan remaja ini dapat berupa; (a) mengontrol kondisi kepemudaan agar tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan, terutama diarahkan pada organisasi-organisasi kepemudaan. Kontrol ini bukan berarti melakukan penekanan-penekanan, tapi justru merupakan motivasi-motivasi untuk berbuat positif; (b) mengadakan pengawasan ketat terhadap peredaran buku-buku dan majalah yang menjadi sumber bacaan pemuda. Hal ini dapat dijalin kerjasama dengan pihak kepolisian ; (c) mengadakan penelitian dari perspektif psikologis, sosiologis, ekonomis, dan budaya untuk menemukan pemasalahan yang dihadapi remaja dan memecahkannya; (d) menjalin penguatan norma-norma dengan menggalakkan seminar, simposium, dan ceramah-ceramah umum agar terbangun budaya dan tradisi yang positif; (s) mengembangkan klub-klub belajar untuk menampung bakat dan minat, serta membangun lembaga- lembaga belajar remaja yang lain.

Latihan

1. Para tokoh sosiologi berbeda dalam mengkategorisasi patologi sosial. Jelaskan perbedaan kategorisasi tersebut!
2. Apa yang dimaksud dengan kenakalan remaja?
3. Bagaimana bentuk-bentuk kenakalan remaja?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenakalan remaja? Jelaskan!
5. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk menangani kenakalan remaja?

Paket 8

GEJALA PATOLOGI SOSIAL: KASUS KORUPSI

Pendahuluan

Dalam paket ini, perkuliahan difokuskan pada pemahaman mengenai korupsi sebagai sebuah penyakit sosial-kemasyarakatan. Hal-hal yang terkait dengan ini adalah mengenai konsep penyakit sosial dari sebuah tindakan korupsi serta bagaimana logika korupsi itu masuk dalam kategori penyakit sosial, selanjutnya, bagaimana cara-cara ilmiah ilmu patologi sosial menangani korupsi. Tampaknya, tema paket ini sangat menarik, mengingat bahwa bangsa yang besar seperti Indonesia terancam kelestariannya sebagai bangsa yang memenuhi cita-cita undang-undang dasar '45 jika penyakit korupsi ini merajalela. Oleh sebab itu, tema ini menjadi penting dipahami mahasiswa, apalagi oleh mahasiswa-wi BKI yang akan mengambil kompetensi profesional di bidang konseling sosial-kemasyarakatan.

Dalam paket ini, mahasiswa-wi akan mendalami tentang pengertian korupsi, factor-faktor penyebabnya, bentuk-bentuk korupsi serta efeknya, dan akhirnya tawaran ilmiah untuk menanggulangnya. Sebelum perkuliahan dimulai, dosen menayangkan slide seputar materi tentang korupsi dan cara-cara menanggulangnya, terutama menampilkan tayangan gambar bagaimana praktik penegakan korupsi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, agar member gambaran konkret mengenai dinamika kehidupan sosial-kemasyarakatan ini dalam geliat memberantas penyakit korupsi. Uraian tersebut diharapkan menjadi startingpoint bagi mahasiswa-wi untuk bersemangat mengkaji tentang tema korupsi ini sebagai sebuah penyakit sosial yang harus dilawan, serta merangsang mereka untuk serius menemukan metodik khusus yang lebih ilmiah dalam memberantasnya.

Oleh sebab itu, penyediaan media perkuliahan di sini menjadi sangat penting, seperti, LCD, Laptop, dan layar tayang semisal papan tulis. Selain itu, penting juga adanya kertas plano, spido, dan juga solasi penempel untuk memberi layanan bagi mahasiswa-wi agar dapat mempresentasikan hasil diskusi atau *brainstorming* tentang konsep korupsi ini di depan kelas untuk didiskusikan bersama.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan (RPP)

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan gejala-gejala penyimpangan atau penyakit sosial khususnya masalah korupsi.

Indikator

Setelah perkuliahan berakhir diharapkan mahasiswa-wi dapat:

1. Menjelaskan konsep korupsi.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor korupsi.
3. Menganalisis bentuk-bentuk korupsi.
4. Menerapkan cara-cara penanggulangan korupsi.

Waktu

2x50 menit

Materi pokok

1. Pengertian korupsi
2. Faktor-faktor penyebab korupsi
3. Bentuk-bentuk korupsi dan efeknya
4. Upaya menanggulangi korupsi

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (15menit)

1. *Brainstorming*, tukar wawasan tentang gejala-gejala penyimpangan dan patologi sosial terkait korupsi dan mengamati slide tentang realitas sosial yang menyimpang.
2. Komentar dari mahasiswa-mahasiswi atas realitas sosial yang ditayangkan.

Kegiatan inti (70 menit)

1. Mengelompokkan mahasiswa-wi menjadi tiga (3) group.
2. Masing-masing group mendiskusikan tema dan sub tema tentang, yaitu:
 - Group ke 1 tentang makna korupsi.
 - Group ke 2 tentang faktor-faktor dan bentuk-bentuk korupsi.
 - Group ke 3 tentang cara-cara penaggulangannya.
3. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok ke depan kelas.
4. Setiap selesai presentasi satu kelompok diadakan dsikusi dan tanya-jawab.
5. Pemantapan dan penguatan hasil diskusi oleh dosen pengampu.
6. Pemberian kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk mengklarifikasi hasil diskusi atau menanyakan hal yang belum dibahas dalam diskusi.

Kegiatan Penutup (10menit)

1. Penyimpulan hasil perkuliahan
2. Memberikan semangat belajar lebih lanjut dan mendalami materi
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa/wi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5menit)

1. Memberikan tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) tentang gejala-gejala penyimpangan khususnya kasus korupsi.

Tujuan

Agar mahasiswa-wi memiliki pemahaman yang utuh tentang gejala-gejala penyimpangan dan patologi sosial khususnya masalah korupsi melalui kreatifitas pengungkapan ide, dan dari ide-ide yang parsial dari beberapa mahasiswa-wi tersebut terkonstruk konsep yang utuh dan menjadi definisi yang adekuat tentang masalah sosial dalam suatu *mindmapping*.

Bahan dan Alat

Kertas plano, Spidol berwarna, dan Solasi penempel.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!

2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing lima (5) menit!
7. Berikan tanggapan dan klarifikasi terhadap presentasi yang selesai dilakukan!

Uraian Materi

GEJALA PATOLOGI SOSIAL: KASUS KORUPSI

Pengertian Korupsi

Secara harfiah, korupsi berasal dari kata bahasa latin, *corruptus*, yang berarti segala perilaku yang merusak keutuhan. Kesan dari makna kata tersebut adalah terdapatnya pelanggaran norma dan moral serta menggambarkan perilaku penyimpangan seksual yang kesemuanya memberi kesan sebuah kejahatan.

Terdapat banyak definisi terminologis tentang korupsi. Diantaranya yaitu terdapat dalam kamus *Webster's Third New International Dictionary*, bahwa korupsi adalah “ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (seperti suap) untuk melakukan pelanggaran tugas”. Definisi ini tampaknya bersifat operasional dan bermakna cukup luas.

Secara konseptual, korupsi dapat dipahami sebagai “tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.⁸⁰

Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang

⁸⁰ Robert Klitgard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1998), 31

menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Korupsi dalam hal ini merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus dari sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuasaan, dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri.⁸¹

Dari beberapa definisi tersebut tampak bahwa korupsi merupakan sebuah bentuk penyimpangan kekuasaan yang berkembang dan dinamis seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, definisi korupsi sebetulnya tidak statis, dan masyarakat pun memahaminya secara dinamis. Sepanjang waktu, lambat laun, masyarakat mampu membuat perbedaan secara lebih tajam antara “suap” dan “tindakan timbal balik atau transaksi. Namun demikian, inti dari korupsi itu sendiri adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Dengan prinsip makna ini, Robert C. Brooks memahami korupsi sebagai suatu perilaku yang secara sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.⁸²

Syed Kessein Alatas mendefinisikan korupsi dengan memberikan unsur-unsur pokoknya, yaitu; (a) suatu pengkhianatan terhadap kekuasaan dan kepercayaan; (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya; (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; (d) dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; (e) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; (f) adanya suatu kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau

⁸¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid 1, hal. 80.

⁸² Robert C. Brooks, *Corruption in American Politics and Life*, (New York: Dood, Mead and Company, 1910), hal. 46.

yang lain; (g) terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya; (h) adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum, dan (i) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.⁸³

Definisi tersebut tampaknya dibangun secara induktif, dimana, mewakili kasus demi kasus yang pernah terjadi dalam konteks korupsi di dunia ini. Untuk konteks Indonesia, korupsi sudah bukan merupakan hal yang asing sehingga menyentuh pada ranah perundang-undangan. Dalam KUHP pasal 419 dijelaskan pada ayat 1; bahwa pegawai yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu, bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya ia menjalankan atau mengalpakan sesuatu dalam jabatannya, berlawanan dengan kewajibannya; Dan ayat 2 berbunyi, bahwa pegawai yang menerima hadiah, sedang ia tahu, bahwa hadiah itu diberikan kepadanya berhubung ia telah menjalankan atau mengalpakan suatu perbuatan dalam jabatannya berlawanan dengan kewajibannya, adalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

Begitu juga KUHP 420 yang menyoroti perilaku hakim yang melakukan korupsi dengan ancaman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dan seterusnya adalah merupakan bukti bahwa korupsi menurut kitab undang-undang hukum pidana/KUHP merupakan penyimpangan dan kejahatan ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai tindakan dan sanksi hukum.

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi, disamping merupakan bentuk penyimpangan moralitas, juga tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial-budaya, sistem ekonomi, dan politik. Sebab, ia bukan sebuah penyakit yang bersifat individual. Oleh karenanya, banyak faktor yang mendorong praktik penyimpangan tersebut yang harus dikaji dalam rangka mengantisipasi dan mencegahnya serta

⁸³ Syed Hussein Alatas, *Sociology of Corruption*, (Singapore : Time Internasional, 1980), hal. 13-14

mentreatment-nya.

Nicaragua Fransisco mencoba mencermati adanya dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah, seperti, penggunaan alkohol terlalu banyak, adanya skandal di luar nikah, kerugian-kerugian spekulasi, terlampau banyak berjudi, watak kesombongan, rasa sebal terhadap situasi yang dihadapinya, frustrasi terhadap pekerjaan, hasrat akan kekayaan yang tidak halal. Faktor-faktor ini tampaknya berasal dari lingkungan luar diri seseorang, namun lebih lanjut seseorang menginternalisasikannya ke dalam jiwa, sehingga mempengaruhi emosi dan karakternya, dan akhirnya, menjadilah sebagai suatu bentuk moralitas seseorang yang menyimpang sebagai koruptor. Adapun faktor eksternalnya adalah dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, sikap-sikap terhadap pekerjaan, perusahaan, bangsa dan situasi internasional.⁸⁴ Faktor eksternal tersebut tampaknya lebih merupakan sistem sosial-budaya yang melembaga dalam unit-unit sosial. Sebagai misal adalah kalau situasi politik dan pemerintahan negara sudah tertradisikan dengan suap, memberi sesuatu sebagai imbalan pekerjaan yang sudah semestinya dilakukan, maka tradisi itu akan mempengaruhi individu lain untuk melakukan penyuapan dan menerima secara biasa. Jadi, korupsi yang dipraktikkan di sini adalah inheren dengan sistem birokrasi yang ada.

Faktor-faktor korupsi memang sangat kompleks, dan masing-masingnya tidak berdiri sendiri. Yang jelas adalah bahwa berjangkitnya korupsi tidak dapat dipisahkan dari faktor ruang, waktu, dan keadaan/situasi yang mengelilingi seseorang, misalnya, pranata sosial yang ada, sistem ekonomi dan politik, moralitas umum masyarakat, terutama orang-orang yang memegang jabatan-jabatan tertentu dari pegawai-pegawai pemerintah maupun swasta.

Secara induktif, Syed Hussein Alatas merumuskan adanya beberapa faktor penyebab berjangkitnya korupsi di suatu tempat, yaitu; 1) adanya

⁸⁴ Thomas C. Schelling, *Command and Control*, dalam "*Social Responsibility and the Business Predicament*, (Washington: The Brookings Institution, 1974), hal. 83-84.

kelemahan-kelemahan dalam posisi kunci yang mampu memberikan imbalan dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi; 2) lemahnya pengajaran moral dan agama; 3) pengaruh kolonialisme, dimana suatu pemerintahan asing tidak dapat menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi; 4) kurangnya pendidikan; 5) adanya kemiskinan; 6) tidak adanya sanksi yang memadai; 7) kurangnya kontrol sosial; 8) struktur pemerintahan yang rapuh; 9) adanya perubahan radikal dalam sistem sosial sehingga korupsi muncul sebagai bentuk penyimpangan transisional; dan 10) situasi sosial yang tidak normal sehingga korupsi dapat menjadi indikator kerapuhannya tersebut.⁸⁵

Bentuk-bentuk Korupsi dan Efeknya

Korupsi memang merupakan konsep umum yang mencakup beberapa praktik perilaku yang dapat masuk di dalamnya. Sebagaimana pengertian korupsi di atas yang menyatakan bahwa korupsi mempunyai kedekatan identik dengan kolusi dan nepotisme yang kesemuanya adalah saling berkaitan, maka kemudian, dari sisi tipologis, terdapat tujuh kategori korupsi, yaitu:

- 1) Korupsi transaktif, *transactive corruption*. Korupsi jenis ini menunjuk pada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Korupsi jenis ini biasanya melibatkan pemerintah dan dunia usaha, atau pemerintah dan masyarakat.
- 2) Korupsi yang memeras, *extortif corruption*. Di sini, pihak yang memeras adalah melakukan korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya.
- 3) Korupsi Investif, *investive corruption*, yaitu bentuk korupsi dengan memberikan barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selama keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
- 4) Korupsi perkerabatan, *nepotistic corruption*, yaitu korupsi dengan jalan

⁸⁵ Syed Hussein Alatas, *Sociology of Corruption*, hal 47.

menunjukkan arah yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau lain-lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

- 5) Korupsi otogenic, *otogenic corruption*, merupakan korupsi yang umum dilakukan demi keuntungan bersama antara pemberi dan penerima/pelaku korupsi. Korupsi jenis ini biasanya lebih dikarenakan oleh faktor lingkungan.
- 6) Korupsi dukungan, *supportive corruption*, yaitu jenis korupsi yang tidak langsung berkenaan dengan uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Sementara tindakan yang dilakukan diperuntukkan melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.
- 7) Korupsi devensif, *devensive corruption*, yaitu bentuk korupsi yang tidak bersifat memeras, tetapi dilakukan dalam rangka mempertahankan hak diri. Dengan melakukan korupsi, lantaran memberikan sesuatu, maka seseorang dapat mendapatkan apa yang menjadi haknya.⁸⁶

Dari segi tujuannya, terdapat dua bentuk korupsi; *Pertama*, yaitu melakukan korupsi agar dapat memperoleh haknya sendiri, sehingga dapat dikatakan, bahwa seseorang itu membeli haknya sendiri. Contoh bentuk ini adalah seorang pengusaha yang menyogok pejabat untuk memperoleh hak-haknya untuk berinvestasi di suatu tempat dengan izin yang mudah, yang berbeda jika tidak melakukan penyogokan tersebut; *Kedua*, adalah korupsi dengan tujuan untuk menghalangi orang lain memperoleh haknya. Contoh bentuk ini adalah jika seseorang yang menyogok pejabat untuk membeli pekerjaan yang disediakan untuk orang-orang yang memenuhi kualifikasi tertentu. Orang tersebut sebenarnya tidak memenuhi criteria, namun karena memberi sesuatu pada petugas, maka ia menjadi diterima, sementara orang lain yang lebih berhak tidak mendapatkannya.

⁸⁶ Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies* (New Haven: Yale University Press, 1973), hal. 39

Pada bentuk yang pertama, tidak tergambar adanya kerendahan moral pada seseorang, karena ia berupaya mempertahankan haknya, sementara pada bentuk kedua tampak bahwa moralitas seseorang tersebut mengalami masalah, yang berakibat pada sebuah perilaku penyimpangan, yakni melakukan tindak korupsi.

Korupsi sebagai suatu praktik yang menelikung badan, dan proses pemerintahan memang menyita perhatian para pemerhati untuk menelaahnya karena efek negatif yang akan ditimbulkannya. Selain sifat yang devensif di atas, korupsi dianggap sebagai suatu penyakit yang menggerogoti masyarakat dan mempunyai sifat menular serta menyebar pada yang lain. Memang tidak semua bentuk korupsi bersifat patologis. Oleh karenanya, agar dapat memahami bahaya korupsi, diperlukan pengetahuan analitis tentang jenis dan macam-macam korupsi sebagaimana di atas.

Pada era modern, korupsi telah tampil sebagai sebuah ideologi yang tentu saja memiliki sifat dinamis, progresif, dan terstruktur dengan rapi. Oleh karena itu, perspektif fenomenologi, sebagai sebuah metode memahami esensi yang ada pada gejala,⁸⁷ dapat dipergunakan untuk dapat lebih tepat menangkan esensi/inti korupsi yang hakiki. Tanpa adanya metode yang memadai maka pemberantasan korupsi akan mengalami kerancuan dan kegagalan metodologis.

Korupsi memang berjalan secara licin. Terkadang tampak dengan fungsinya yang positif. Bahkan, sebagian pakar menilai, bahwa korupsi terkadang bermanfaat bagi masyarakat di bidang ekonomi. Profesor Matnamei menyatakan; “korupsi dapat memasukkan unsur kompetisi ke dalam apa yang merupakan industri monopolistic, sekaligus kecenderungan untuk investasi dan pembaharuan ekonomi dapat menjadi lebih tinggi di luar pemerintah daripada di dalamnya karena pembayaran suap tertinggi merupakan salah satu kriteria terpenting bagi alokasi, maka kemampuan untuk menghimpun penghasilan, entah dari tabungan dan cadangan atau dari operasi yang ada

⁸⁷ Fenomenologi pada awalnya merupakan pandangan filsafat yang diperkenalkan oleh Edmund Husserl, kemudian berkembang menjadi sebuah metode penelitian.

sekarang dijadikan seoptimal mungkin. Dalam jangka pendek, kedua sumber ini sangat bergantung pada efisiensi dalam produksi. Oleh karena itu, suatu kecenderungan ke arah persaingan dan efisiensi diperkenalkan ke dalam sistem tersebut.⁸⁸

Sebenarnya, tidak hanya dalam ranah ekonomi, dalam politik dan manajemenpun korupsi memiliki sisi fungsionalnya. Fungsi nyatanya adalah menumbuhkan persaingan atau kompetisi. Kompetisi menjadi bermanfaat jika infrastruktur mampu mengantisipasi, tetapi kalau tidak, maka justru terjadi kezaliman dan ketimpangan di berbagai sektor kehidupan sosial. Jadi, jika dibandingkan antara manfaat dan bahaya korupsi maka lebih besarlah bahayanya.

Adapun di antara temuan mengenai akses dan keburukan korupsi adalah bahwa korupsi dapat mempengaruhi insentif-insentif dengan cara lain ia dapat memperhebat rasa ketidakpastian masyarakat tentang kemungkinan manfaat kegiatan produktif mereka, dan pada gilirannya, dapat menciptakan perangsang-perangsang bagi tingkahlaku tidak efisien. Dalam dunia pasar, korupsi dapat menyebabkan orang keluar dari usaha tersebut sama sekali.⁸⁹

Ketika korupsi menjadi sesuatu yang pasti, maka insentif-insentif, baik bagi pejabat maupun warga negara dibelokkan ke arah kegiatan-kegiatan yang secara sosial tidak produktif, walaupun hal itu mungkin, maka secara pribadi, menguntungkan. Dalam kondisi ini, para pejabat menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari cara-cara memperoleh suap dan uang paksa, bukannya melaksanakan tugas melayani masyarakat.⁹⁰

Jadi, bagaimanapun, korupsi banyak memberikan bahaya bagi keberlangsungan masyarakat. Sapari Imam Asyari mengilustrasikan bahaya korupsi dalam point- point sebagai berikut:

a. Dengan berjangkitnya korupsi, masyarakat akan menanggung biaya sogok,

⁸⁸ Robert Klitgarrd, *Membasmi Korupsi*, hal. 41.

⁸⁹ David J. Gould dan Amaro Reyes, *Bureaucratic Corruption and Underdevelopment in the Third World*, : the Case of Zaire (New York: Pergamon Press, 1980), 23.

⁹⁰ Ibid.

suap dan lain-lain, sehingga akibatnya adalah mahalnnya harga-harga barang di pasar dengan dalih karena terkena pajak yang memang uang suap itu pada intinya adalah pajak yang illegal,

- b. Meski pada kasus-kasus tertentu uang sogok/suap membantu meningkatkan efisiensi kepegawaian, tetapi secara psikologis akan memperlemah mentalitas pegawai.
- c. Dalam realitas, korupsi akan menjalar cepat yang membawa efek keteledoran dalam bertugas dan ketidakefisiensian.
- d. Korupsi dapat merongrong respek bagi kewenangan yang ada, cenderung menggerogoti suatu pemerintahan yang didukung oleh publik, sementara mengasingkan kepatuhan publik pada tujuan-tujuan pemerintah.

Karena efek negatif korupsi sangat real, sementara jenis dan kategorinya sangat beragam, maka perlu dicermati langkah-langkah efektif dalam mengobati korupsi agar efektif, tidak memakan biaya yang mahal.

Upaya Menanggulangi Korupsi

Korupsi tidak hanya mempengaruhi manusia dalam kehidupan ekonomi dan politiknya belaka, melainkan juga dalam pertumbuhan rohaniah dan filsafat hidupnya. Filosofi yang bias dapat menimbulkan sinisme dan nihilisme yang juga secara kausalistik menyuburkan mental korup itu sendiri. Pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang bermental korup menciptakan ketidakefisienan administratif, serta dapat menyuburkan ketidakadilan. Oleh karena itu menanggulangi korupsi harus mampu mencabut akar-akarnya.

Cara terbaik yang dapat ditempuh dalam hal ini adalah dengan mengatasi dua kategori akar korupsi, yaitu: *Pertama*, kategori kultural, sosial, dan histori; *Kedua*, kategori birokratik-pemerintahan. Untuk kategori kedua dapat ditempuh dengan; (a) membuang pejabat yang korup secara sistematis dan berkelanjutan; (b) mengadakan pembaharuan administrasi sehingga tidak memungkinkan terbentuknya pusat-pusat korupsi (karena korupsi lebih mudah menjelma sebagai deviasi sistematis); (c) menjalankan kebijaksanaan ekonomi

yang memungkinkan orang mencapai taraf hidup yang memadai.⁹¹ Untuk kategori pertama, pada intinya, terletak pada niat baik semua pihak untuk menciptakan kultur yang baik, meningkatkan budaya jujur dan hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan. Pemimpin dan pemegang jabatan harus mampu meneladani masyarakat, sebab dengan demikian terbangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.⁹² Kondisi demikian, praktis dapat menumbuhkan daya kontrol masyarakat yang tinggi terhadap berjangkitnya korupsi.

Disamping cara di atas, pemberantasan korupsi dapat ditempuh dengan:

- a) mengintensifkan pendidikan dan percontohan. Yang menjadi sasarannya di sini dapat berupa pegawai ataupun anggota masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran moral akan bahaya korupsi.
- b) membina dan menciptakan kode etik. Kode ini secara rinci menjelaskan pedoman tingkah laku organisasi dan etika menjalankan tugas.
- c) membina budaya organisasi, *organization culture*. Tujuannya adalah menciptakan kondisi manajemen integritas, dimana, para pegawai dan karyawan diikutsertakan dalam keputusan-keputusan manajemen. Hasil dari upaya ini adalah menjadikan mereka terangsang untuk jujur sehingga lebih suka terhadap prestasi kerja. Langkah ini cenderung dapat melawan gejala korupsi internal yang mengancam semangat kerja pegawai.⁹³

Untuk konteks Indonesia, pemberantasan korupsi sudah menunjukkan tanda-tanda seriusnya sebagaimana sudah dimasukkan dalam perundang undangan negara. Korupsi di sini didudukkan sebagai tindak

⁹¹ Lebih rinci dapat dilihat pada Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, hal. 44-47.

⁹² Woodrow Wilson, *The New Democracy* (New York: Harper and Brothers, 1926), 190.

⁹³ Bob Curtis, *How to Keep Your Employees Honest*, (New York: Lebbar-Friedman Books, 1979),70. Lihat pula, Terrence E. Deal and Man Kennedy, *Corporate Culture: the rites and ritual of Corporate life*, (Reading Mass: Edison - Wesley, 1982), capter 2.

⁸⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, hal. 117.

kriminai yang harus mendapatkan sanksi, misainya, pada KUHP pasal 420, 423 dan 425. Sejak tahun 60-an terbentuk tim-tim pemberantasan korupsi, undang-undang korupsi, komisi empat dan OPSTIB (operasi tertib) di pusat dan daerah.⁹⁴ Namun demikian, gejala korupsi tetap mewarnai kehidupan bangsa ini, dan pada era Kabinet Indonesia Bersatu, tahun 2004, presiden Susilo Bambang Yudoyono menetapkan untuk membentul badan independent di bawah presiden yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Selama dua tahun sejak pembentukannya. Badan ini melakukan gebrakan yang lebih kongkrit dalam melacak dan mengejar dan pada akhirnya menghukum para koruptor.

Pemberantasan korupsi harus berjalan simultan, terpadu dan sistematis, melibatkan semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, mengingat korupsi juga berkembang menjadi sebuah penyimpangan sistematis. Untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi dengan baik, Kartini Kartono, merumuskan beberapa point sebagai suatu resep dan saran, yaitu:

- 1) Harus ada kesadaran rakyat untuk berpartisipasi dalam memikul tanggung jawab menciptakan kondisi bangsa yang bersih. Harus ada kontrol sosial yang tinggi, tidak boleh apatis.
- 2) Mementingkan kepentingan nasional dan bangsa, mengutamakan kejujuran, menggalakkan pendidikan moral bangsa.
- 3) Para pemimpin dan pejabat mampu memberikan keteladanan, mengutamakan kewajiban daripada menuntut haknya.
- 4) Mendirikan lembaga pemberantasan korupsi dan menegakkan sanksi hukum yang adil dan tegas.
- 5) Efisiensi birokrasi dan administrasi pemerintahan dan membangun komunikasi lintas lembaga secara solid untuk menegakkan disiplin.
- 6) Adanya penerimaan pegawai dengan mekanisme yang efektif berdasarkan prinsip *achievement* atau keterampilan teknis, bukan berdasarkan norma *ascription* yang menyuburkan nepotisme.

- 7) Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, dan berdisiplin kerja yang tinggi.
- 8) Memilih pegawai-pegawai non-politik untuk menciptakan kelancaran pemerintahan dengan ditunjang gaji yang memadai beserta tunjangan hari tua agar dapat menenangkan mereka dalam menjalankan tugas. Sistem budget dipikulkan pada pejabat yang memiliki tanggung jawab yang tinggi dibarengi dengan sistem kontrol yang ketat.
- 9) Dilakukan herregistrasi terhadap kekayaan perorangan yang menyolok dengan mengenakan pajak yang tinggi. Kekayaan yang diduga sebagai hasil korupsi diperiksa dan disita oleh negara.⁹⁵

Dari paparan teoretik dan teknik penanggulangan bahaya korupsi di atas, pada prinsipnya yang terpenting adalah, harus ada pembatasan progresif kekuasaan pejabat dan pemimpin dalam konteks pengelolaan penyelenggaraan ekonomi pemerintahan; Harus dimulai dari pejabat dan pemimpin negara, dan selanjutnya, dibarengi dengan mengarusutamakan kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari pihak pejabat pemerintah, maupun rakyat. Upaya demikian, haruslah kontinyu, dan dijalankan secara simultan oleh semua lapisan masyarakat bangsa. Apa yang telah dicapai oleh KPK, sebagai lembaga spesifik yang menangani penyakit korupsi di Indonesia, tentu ada perlawanan-perlawanannya, terutama dari mereka yang akan terancam penegakan hukum. Oleh sebab itu, dukungan moral dari masyarakat harus terus disuarakan, terutama melalui, dan atau dari kalangan, LSM dan organisasi-organisasi massa non-pemerintah yang sangat aspiratif terhadap suara rakyat agar benar-benar menutup celah sepakterjang para koruptor dan calon-calon koruptor.

Latihan

1. Apa yang Saudara ketahui tentang korupsi?
2. Mengapa korupsi itu terjadi?
3. Bagaimana bentuk-bentuk korupsi?
4. Jelaskan upaya-upaya penanggulangan korupsi!

⁹⁵ Ibid, hal. 119

Paket 9

DAKWAH ISLAM DAN PATOLOGI SOSIAL

Pendahuluan

Dalam paket ini, perkuliahan difokuskan pada pembahasan mengenai konsep dakwah Islam sebagai sarana konseling terhadap gejala-gejala patologi sosial. Di dalamnya, juga diketengahkan konsep masyarakat Islam, dimana, hal ini tidak jauh berbeda dengan masyarakat secara umum, karena ternyata secara psikologis, masyarakat muslim juga terdiri dari manusia-manusia yang memiliki kebutuhan hidup, sehingga tidak lepas dari dorongan-dorongan keinginannya yang jika tidak terkendali akan aktus sebagai aktifitas penyimpangan. Perkuliahan ini diharapkan memberi wawasan bagi mahasiswa-wi agar memosisikan dakwah sebagai katakunci pengobatan sosial kemasyarakatan yang terkena gejala penyakit sosial-kemasyarakatan seperti kenakalan remaja, korupsi, dan lain-lain yang belum tertulis di buku ini. Namun, mahasiswa-wi diharapkan mampu mengembangkannya melalui pembahasan mendalam dalam diskusi-diskusi kelas. Dengan demikian, paket ini menjadi entripoint bagi upaya motivasi mahasiswa untuk menjadi da'I yang berwawasan treatment, terlebih sebagai konselor, sebagaimana disiplin yang digelutinya.

Atas dasar ini, maka materi yang didalami dalam paket ini adalah seputar pengertian konseptual tentang masyarakat Islam, konsep penyimpangan muslim, dan juga patologi muslim, dan akhirnya diperdalam tentang peran dakwah dalam mengatasi patologi sosial. Sebelum perkuliahan, dosen menyajikan konsep-konsep dasar tentang masyarakat, dan masyarakat Islam/muslim, dan juga menayangkan slide yang menunjukkan beberapa bukti konkret bahwa orang muslimpun tidak terhindar dari perilaku penyimpangan agar menjadi pembuka wawasan bahwa untuk dapat memahami muslim sebagai manusia perlu memahami disiplin ilmu yang membantunya memahami

tema terkait dengan kepribadian muslim dan juga manusia secara umum. Dengan demikian, mahasiswa-wi selanjutnya mengembangkan diskusi seputar tema yang disajikan dalam slide agar dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kerangka memahami realitas sosial muslim yang mana secara real memerlukan aktivitas pembimbingan dan juga treatment dalam kerangka dakwah Islamiyah.

Atas dasar pemikiran seperti di atas, maka penyediaan media perkuliahan tidak dapat dihindarkan. Media pokok yang harus ada yaitu LCD, Lapto, dan layar proyeksi slide seperti berupa papan tulis. Di samping itu juga diperlukan kertas plano, spidol, dan solasi untuk menempelkan hasil diskusi dan juga brainstorming yang sudah dituliskan di kertas untuk didiskusikan di depan kelas.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa-mahasiswi mampu menjelaskan konsep Dakwah Islam dan Upaya penanganan penyakit sosial

Indikator

Setelah perkuliahan berakhir diharapkan mahasiswa-wi dapat:

1. Menjelaskan konsep tentang masyarakat dan masyarakat muslim.
2. Mengemukakan konsep penyimpangan muslim.
3. Menjelaskan konsep dakwah Islam dan tujuannya.
4. Menerapkan dakwah dalam mengatasi patologi sosial

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Wawasan konseptual tentang masyarakat dan masyarakat muslim
2. Konsep penyimpangan muslim.
3. Konsep dakwah Islamiah dan tujuannya.
4. Dakwah dalam mengatasi patologi sosial

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan awal (15menit)

1. *Brainstorming*, tukar wawasan tentang masyarakat muslim dan patologi sosial serta dakwah Islamiyah dan mengamati slide tentang realitas sosial masyarakat muslim yang menyimpang.
2. Komentar dari mahasiswa-mahasiswi atas realitas sosial yang ditayangkan.

Kegiatan inti (70 menit)

1. Mengelompokkan mahasiswa-wi menjadi tiga (3) group.
2. Masing-masing group mendiskusikan tema dan sub tema tentang, yaitu:
Group ke 1 tentang konsep masyarakat dan masyarakat muslim.
Group ke 2 tentang penyimpangan muslim.
Group ke 3 tentang dakwah Islamiyah dan upaya penanganan patologi sosial.
3. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok ke depan kelas.
4. Setiap selesai presentasi satu kelompok diadakan dsikusi dan tanya-jawab.
5. Pemantapan dan penguatan hasil diskusi oleh dosen pengampu.
6. Pemberian kesempatan kepada seluruh peserta kelas untuk mengklarifikasi hasil diskusi atau menanyakan hal yang belum dibahas dalam diskusi.

Kegiatan Penutup (10menit)

1. Penyimpulan hasil perkuliahan
2. Memberikan semangat belajar lebih lanjut dan mendalami materi
3. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa/wi.

Kegiatan Tindak Lanjut (5menit)

1. Memberikan tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat peta konsep (*mind map*) tentang masyarakat dan patologi muslim dikaitkan dengan dakwah Islam.

Tujuan

Agar mahasiswa-wi memiliki pemahaman yang utuh tentang masyarakat muslim yang patologis dan dakwah Islamiyah sebagai upaya penanganan patologi sosial melalui kreatifitas pengungkapan ide, dan dari ide-ide yang parsial dari beberapa

mahasiswa-wi tersebut terkonstruksi konsep yang utuh dan menjadi definisi yang adekuat tentang masalah sosial dalam suatu *mindmapping*.

Bahan dan Alat

Kertas plano, Spidol berwarna, dan Solasi penempel.

Langkah Kegiatan

1. Pilihlah seorang pemandu kerja kelompok dan penulis konsep hasil kerja!
2. Diskusikan materi yang telah ditentukan dengan anggota kelompok!
3. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk peta konsep!
4. Tempelkan hasil kerja kelompok di papan tulis/dinding kelas!
5. Pilihlah satu anggota kelompok untuk presentasi!
6. Presentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran dengan waktu masing-masing lima (5) menit!
7. Berikan tanggapan dan klarifikasi terhadap presentasi yang selesai dilakukan!

Uraian Materi

DAKWAH ISLAM DAN PATOLOGI SOSIAL

Konsep Masyarakat Islam

Sebagaimana penjelasan terdahulu, bahwa masyarakat adalah kumpulan orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama dalam konteks hidup bersama.⁹⁶ Jadi, walaupun terdiri dari beragam jatidiri pribadi sebagai sebuah kesatuan, maka dalam masyarakat harus ada norma dan peraturan yang ditaati bersama serta harus ada sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.⁹⁷

Selanjutnya, yang disebut dengan masyarakat Islam adalah sekelompok manusia yang menjalin kesatuan hidup di bawah sistem budaya yang didasari oleh

⁹⁶ Terma “masyarakat” dapat ditelusuri secara etimologis, dimana, ia berasal dari kata bahasa Arab “musyarokah” yang berarti persekutuan hidup dan atau pergaulan hidup. Secara terminologis, ia merupakan terjemahan dari kata *al mujtama'* dan atau *al ijtima'* yang memiliki makna sinonim, yaitu perkumpulan manusia yang mengikat persekutuan hidup bersama.

⁹⁷ Jadi, dalam masyarakat harus ada sistem berupa tatanan nilai yang mengikat mereka dalam kesatuan hidup. Terkadang pengikat kesatuan itu berbeda-beda; dapat berupa teritori, kebangsaan, prinsip-prinsip filosofik, dan akidah. Kualitas masyarakat ditentukan dari pengikatnya (*rawabith*) tersebut. Periksa! Muhammad Mubarak, *al Mujtama' al Islamiy al Mu'asir*, (Beirut: Dar al Fikr, 1971), 7.

nilai-nilai dasar Islam.⁹⁸ Sebagai sebuah agama, Islam meskipun bukan merupakan seperangkat teori politik, pemerintahan dan sosial, namun memiliki ajaran tentang cara manusia hidup bersama di tengah masyarakat, dan nilai-nilai dasar Islam yang dipraktikkan manusia dalam konteks kehidupan sosial yang pada gilirannya membuahkan hasil budaya yang dapat disebut dengan budaya islam atau budaya Islami. Atas dasar itu, masyarakat Islam dapat disebut dengan masyarakat Islami, walaupun ada yang membedakannya. Menurut pendapat yang membedakan antara keduanya, bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang terdiri dari orang-orang muslim. Oleh karena itu, ia disebut juga dengan masyarakat muslim. Sedangkan masyarakat Islami adalah masyarakat yang dalam menjalin kesatuan hidup bersamanya didasari dengan/oleh nilai-nilai budaya Islam, yakni budaya yang disinari oleh nilai-nilai dasar Islam.⁹⁹

Dalam tulisan ini, penulis tidak mengikuti pandangan yang membedakan antara masyarakat Islam dan masyarakat Islami, tetapi mengakui perbedaan masyarakat Islam dengan masyarakat muslim. Menurut hemat penulis, masyarakat muslim belum tentu menjadi masyarakat Islami/ Islam ketika praktik hidup bermasyarakatnya tidak disinari oleh nilai dan budaya Islam, misalnya, masyarakat tersebut hanya menjalin relasi dengan Tuhan saja, tidak menjadikan ajaran dan syari'at Islam sebagai acuan dalam praktik sosial mereka. Sebaliknya, kalau masyarakat Islam, maka secara inheren adalah berbasis masyarakat muslim juga. Masyarakat Islam dicirikan dengan suatu asas pengikat yang mendasari sistem solidaritasnya yang berupa akidah Islamiyah yang membuahkan konsep equalitas, solidaritas, dan persaudaraan.¹⁰⁰

Secara historis, masyarakat Islam sudah terbentuk sejak periode Madinah pasca perang Ahzab, dimana, ikatan perjanjian dengan orang-orang Yahudi sudah diputuskan. Sejak itu, Nabi kaum muslimin, Muhammad Saw. telah berhasil membangun masyarakat Islam dengan Madinah sebagai wilayah geografisnya.¹⁰¹ Nama Madinah, yang berarti kota yang berperadaban yang menjadi pengganti dari nama Yatsrib sebelumnya, adalah mengandung nilai politis dan sosiologis, dimana

⁹⁸ Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 102.

⁹⁹ Periksa lebih jauh pada Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga : dari keluarga sakinah hingga keluarga bangsa*, (Jakarta: Bin Arena Pariwisata, 2005), 210-212.

¹⁰⁰ Muhammad Mubarak, *al Mujtama'*, hal. 14

¹⁰¹ Hendro dan Munhanif, *Islam dan Civil Society..*, hal 173.

masyarakat Islam ketika itu dibangun di atas prinsip keadaban, ketertiban, dan saling menghormati antar sesama manusia di bawah naungan hukum syari'ah yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Karena sifatnya yang berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi tersebut maka layaklah ia disifati dengan al munawwarah. Artinya, masyarakat dipayungi—laksana disinari--dan dibimbing oleh petunjuk hukum Islam agar norma dan peraturan agama Islam membimbingnya ke jalan kesejahteraan dan keharmonisannya.

Dalam terminologi kontemporer, masyarakat Islam--oleh karena berupaya mengindentikkan dengan masyarakat Madinah klasik tersebut--dikenal dengan **masyarakat madani** yang walaupun konsep tersebut diposisikan sebagai terjemahan dari konsep *civil society*, atau masyarakat sipil dari Barat.¹⁰² Prinsip masyarakat madani sebagaimana pernah dicontohkan Nabi Muhammad Saw. dalam menyelenggarakan pemerintahan dan negara Madinah antara lain adalah; prinsip kesamaan hak antara warganegara (egalita); prinsip keadilan hukum (*justice*), dan prinsip *participate* sebagaimana tertera dalam Mitsaq Madinah, *Madinah chapter*.¹⁰³

Dalam perkembangannya, Masyarakat Madinah yang sudah menjadi citra masyarakat Islam dalam praktik penyelenggaraan kehidupan sosial mengembangkan prinsip-prinsip musyawarah (*al shura*), adil (*al 'adl*), kesamaan kedudukan di depan hukum (*al musawat*), dan mengembangkan sistem kontrol sosial dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nilai-nilai edukasi dalam masyarakat Islam selalu diutamakan baik untuk individu maupun masyarakat. Hal itu sebagai bukti bahwa pilar masyarakat Islam tersebut adalah ilmu, dan tanpa ilmu itu masyarakat akan hancur dari dalam dan menjadi masyarakat yang bodoh yang dikenal dengan masyarakat *jahiliah*.¹⁰⁴

Masyarakat jahiliah yang merupakan antonim dari masyarakat Islam, terjadi *karena* kegagalannya memiliki falsafah dan akidah yang benar, *tidak* memiliki nilai-nilai kebenaran ilahi yang mutlak dalam berbagai bidang kehidupan

¹⁰² Masykur Hakim, Model Masyarakat Madani, ed. Salahuddin Hamid, (Jakarta: Intermedia, 2003), 14.

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Abd. Al Karim Zaydan, *Usul al Da'wah*, hal. 97

sosial maupun individu, sehingga rentan terhadap praktik diskriminasi, penjajahan sesama manusia, pemujaan dan kultus terjadi dengan mudah dan **tidak** memiliki power untuk melakukan kontrol sosial karena tidak adanya norma dan hukum yang tegak dan dipatuhi bersama. Kondisi masyarakat jahiliah adalah disintegratif dan rapuh dari munculnya perilaku sosial yang patologis.

Masyarakat Islam memiliki anteseden dari masyarakat jahiliah di atas sehingga secara teologis masyarakat Islam adalah masyarakat yang tercerahkan, masyarakat yang terlahir dari kegelapan jahiliah diarahkan menuju pencerahan Islam, dan menjadi masyarakat yang ideal/terbaik (*kuntum khaira ummah ukhrijat li al nas min al zulumat ila al nur*)¹⁰⁵ Ketercerahan masyarakat Islam tersebut adalah karena adanya ideologi yang benar yang menghasilkan nilai dan norma yang berkeadilan dan ditaati bersama. Selain itu, bahwa masyarakat Islam berkarakter dinamis karena ditopang oleh kekuatan atau motif **amar ma'ruf dan nahi munkar**.

Unsur-Unsur Masyarakat Islam

Masyarakat Islam terdiri dari individu-individu, laki dan perempuan, dan dari kedua jenis itulah tercipla generasi yang akan mewarisinya. Individu tidak dibedakan dalam konteks fungsi dan peran sosialnya berdasarkan jenis kelamin, warna kulit dan suku bangsanya. Sebaliknya, mereka memiliki hak yang sama di bawah peraturan kemasyarakatan. Secara teologis mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kebajikan dan surga Allah, bahkan yang membedakannya hanyalah ketaqwaannya kepada Allah Swt. Masyarakat Islam mewajibkan masing-masing individu untuk mencintai ilmu dan giat belajar agar dapat menjadi warga masyarakat yang baik (Q.S [49]: 13).

Keluarga merupakan unsur dan unit terkecil masyarakat yang memiliki signifikansi dalam terwujudnya masyarakat yang ideal. Oleh karena itu, persoalan

¹⁰⁵ Dalam Konteks ini, tampak bahwa dalam masyarakat Islam selalu timbul gerakan-gerakan control sosial yang mewarnai seluruh episode perjalanan masyarakat Islam sejak periode klasik hingga sekarang. Gerakan tersebut tidak lain adalah pencerahan terhadap Islam sebagai ruh masyarakat Islam baik berupa ajakan-ajakan/dakwah untuk mencapai kemajuan dan kualitas hidup yang lebih baik seperti gerakan modernisme dan sejenisnya maupun gerakan yang bersifat memurnikan Islam dari hambatan-hambatan yang menyelimuti sinar cerahnya seperti pemberantasan syirik dan gerakan sufisme-fatalistik yang menghambat karakter dinamis Islam yang lazimnya disebut dengan gerakan puritanisme.

keluarga mendapatkan perhatian utama.¹⁰⁶ Karena fungsinya sebagai produsen generasi, maka keluarga harus memiliki visibilitas sosial yang tinggi, harus mendapatkan pengakuan masyarakatnya, sehingga hidup dalam setting norma sosial yang melingkupinya.

Dalam pandangan Islam, keluarga halus dibentuk secara benar dan absah sesuai dengan norma-norma Islam yang mencakup norma ilahiah dan Sosial kemanusiaan. Kalau dalam proses transaksi pengabsahan untuk melakukan hubungan seks-biologis antara suami istri dalam ikatan rumahtangga itu diperlukan saksi yang bersifat transaksional, maka hal itu belum cukup ketika keluarga tersebut diarahkan ke dalam koridor kehidupan sosial kemasyarakatan dan didaftarkan sebagai anggota dan unsur sosial, sebelum mendapatkan persaksian sosial. Oleh karena itu, dalam pandangan fikih (ilmu hukum Islam), menghadiri **walimatul 'urs** adalah bernilai wajib (*ijabatu da 'wat walimat al 'urs wajib*). Pernikahan yang sudah disaksikan secara sosial itu berakibat pada terbentuknya keluarga yang visibel serta sah secara sosiologis Islami.

Atas dasar itu, maka keluarga yang dibentuk dengan proses transaksi pernikahan yang tidak mendapatkan saksi sosial sebagaimana yang menggejala dalam bentuk **nikah sirri** pada belakangan ini adalah tidak sah secara sosial karena disamping akan menimbulkan fitnah, juga akan menimbulkan **madharat**, terutama eksistensi generasi yang tidak transparan. Karena dipandang secara sosial tidak sah dan tidak baik, maka otomatis pernikahan tersebut tidak baik pula/ tidak sah dalam pandangan Allah Swt. Sebagaimana mafhum mukhalafah (arti kebalikan) dari kaidah fihiyyah "*ma ra'ahu al muslimun hasanan fahuwa 'inda Allah hasan*". Artinya, apasaja yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai hal bagus (tidak mengancam ketertiban dan visibilitas sosial dan tidak mengandung fitnah), maka di sisi Allah pun adalah bagus. Keluarga yang dihasilkan dari nikah sirri semacam itu dapat dikategorikan sebagai keluarga gelap atau keluarga yang rentang terjadi hal-hal menyimpang.

Dalam masyarakat Islam, disusun norma-norma yang melandasi perilaku dan relasi antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat serta individu dan pemerintah, selaku produsen peraturan-peraturan dan yang menjalankannya.

¹⁰⁶ Abd. Al Karim, *Usul al Da'wah*, hal. 104

Mentaati pemerintah dalam konteks menjalankan aturan adalah penting dan wajib sifatnya. Jadi, relasi yang harmonis antar unsur masyarakat yang membuahkan mekanisme kontrol yang efektif akan menentukan terhadap terbentuknya masyarakat Islam yang sehat dan harmonis.

Konsep Penyimpangan Sosial Muslim.

Walaupun sudah diantisipasi dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam agar terwujud kondisi masyarakat yang stabil dan normal, maka tampaknya gejala-gejala penyimpangan (baca: kemaksiatan) muslim di tengah masyarakat itu sulit dihindari. Tegasnya, penyimpangan muslim dapat menampak dalam berbagai variasi dan kualitas yang bertingkat-tingkat, ada yang berbahaya dan ada yang ringan.

Gejala variasi penyimpangan tersebut dapat bercorak ideologik, kriminal, genetikal, dan sosial ekonomik. Penyimpangan yang bercorak ideologik biasanya terkait dengan persoalan akidah keagamaan, misalnya, berupa kemurtaddan (keluar dari akidah Islam), sektarianisme keislaman seperti gerakan-gerakan ekstremisme, fundamentalisme, dan gerakan yang membahayakan ketentraman masyarakat Islam, khususnya, semisal gerakan jihad Islam dalam bentuk pengeboman di mana- mana yang berpotensi meresahkan masyarakat.

Disamping itu, terdapat juga gerakan-gerakan yang kontra dinamis yang mengajak hidup model fatalisme, romantisme salafi yang melarang kelompoknya mengikuti perkembangan teknologi dan produk-produk budaya Barat, misalnya, mengharamkan melihat TV, tidak boleh menggunakan sendok dan garpu ketika makan, dan sebagainya. Kelompok-kelompok seperti itu jelas akan memicu disintegrasi masyarakat jika tidak segera ditemukan norma dan treatment yang efektif dengan menemukan simpul etik yang dapat membangun solidaritas dan persaudaraan masyarakat.

Penyimpangan muslim yang bersifat kriminal adalah seperti pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan, minum minuman keras/narkoba dan sejenisnya. Penyimpangan tersebut membahayakan jiwa, raga dan akal pikiran manusia yang berakibat pada hilangnya martabat dan harga diri kemanusiaan yang juga membahayakan eksistensi masyarakat itu sendiri. Sedangkan penyimpangan yang bersifat merusak generasi dan keturunan adalah prostitusi. Termasuk dalam kategori

ini adalah homoseks, lesbian dan bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang lain, seperti sadisme seksual, perkosaan dan pelecehan seks, onani, masturbasi, dan coitus intrups atau 'azl. Efek negatif dari penyimpangan tersebut adalah merusak sistem perkembangan generasi masyarakat. Efek sosiologisnya adalah merusak norma-norma sosial dan tatanan keluarga yang hamionis. Keluarga dapat hancur karena salah satu dari suami atau istri yang melakukan prostitusi dan sejenisnya itu. Belum lagi bahaya penyakit seksual yang mengancam nyawa pelaku dan keluarganya, misalnya, sipillis dan AIDS yang sangat berbahaya itu.

Penyimpangan seksual tersebut terjadi karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internalnya adalah karena lemahnya iman dan taqwa seseorang kepada Tuhan, sedangkan faktor eksternalnya adalah budaya kebebasan berpakaian yang membuka aurat yang menampak pada perilaku pornoaksi maupun merebaknya pornografi sehingga membuahkan tradisi perilaku yang merangsang nafsu sahwat masyarakat.

Kemudian ada bentuk penyimpangan lagi yang bersifat merusak tatanan ekonomi dan kepemilikan/properti masyarakat, yaitu berupa pencurian, perampokan, pencopetan dan sejenisnya. Penyimpangan tersebut sangat meresahkan anggota masyarakat untuk dapat menikmati kekayaan yang dimilikinya secara pribadi. Termasuk jenis penyimpangan ini adalah korupsi yang biasanya merugikan masyarakat umum karena properti yang dicuri dan digelapkan adalah milik masyarakat / rakyat banyak.

Praktik suap menyuap yang biasa dilakukan di lingkungan birokrasi dan administrasi pada prinsipnya adalah termasuk dalam kategori penyimpangan ini. Dengan suap menyuap tersebut maka siklus kepindahan kepemilikan berlangsung secara illegal dan merusak sistem moneter yang normal. Demikian juga praktik perjudian adalah merupakan penyimpangan dalam perspektif kepemilikan seperti semua bentuk penyimpangan di atas dan memiliki bahaya individu dan sosial yang sama dahsyatnya.

Dari sisi psikologis dan watak dasar manusia, maka penyimpangan penyimpangan muslim di tengah masyarakat seperti itu adalah hal yang bukan mustahil, karena dalam pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi berkebutuhan. Dalam hidupnya, manusia memiliki seperangkat kebutuhan

untuk melangsungkan proses kehidupannya, misalnya makan, minum, sandang-papan, nafsu seksual untuk mengembangkan keturunan. Disamping itu, manusia memiliki watak dasar yang memungkinkannya untuk berkarakter jahat maupun mulia (Q.S. al Shams: 7)¹⁰⁷ Walhasil, dalam perspektif ini, manusia selain Nabi dan Rasul, adalah tidak ma'shum (tidak terlindungi) dari kesalahan dan penyimpangan. Pandangan ketidakmakshuman manusia tersebut berdasarkan sabda Rasulullah, bahwa masing-masing anak Adam itu berpotensi untuk dapat berbuat salah dan menyimpang. Namun sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang lurus dan normal.

Peran Dakwah dalam Mengatasi Patologi Sosial Secara Umum

Dari pemahaman psikologis penyimpangan muslim di atas dapatlah diketahui, bahwa sebab-sebab yang menimbulkan perilaku menyimpang dalam masyarakat Islam adalah; (a) faktor internal yang berupa lemahnya keimanan seseorang. Iman berfungsi sebagai kendali dalam kehidupan seseorang. Ketika iman itu kuat maka seseorang cenderung memiliki daya kontrol untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan sebaliknya, ketika iman melemah maka dorongan shahwat yang cenderung mengajak melakukan pelanggaran dan kemaksiatan akan menjadi dominan; (b) faktor eksternal berupa lingkungan sosial-budaya yang melingkupi seseorang atau kelompok masyarakat. Faktor ini dapat berupa kultur, tradisi, sistem perilaku, sistem nilai dan pola pikir, serta falsafah hidup masyarakat. Sebagai contoh, pola pergaulan bebas antara laki dan perempuan, budaya kumpul kebo, buka-bukaan, pornoaksi dan pornografi yang dapat mendorong munculnya penyimpangan-penyimpangan seksual; Sistem birokrasi dan manajemen yang longgar yang memberi kesempatan pada praktik korupsi; Lemahnya sistem kontrol sosial dan renggangnya nilai dan norma sosial yang menyuburkan perilaku yang amoral, perjudian, perampokan, pergaulan bebas dan mabuk-mabukan yang memicu disintegrasi sosial, kesemuanya adalah memicu terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang.

¹⁰⁷ Berkaitan dengan itu maka menurut ibn Abbas manusia dimotivasi oleh dua kekuatan jiwanya, Yang satu bersifat positif, yakni taat dan patuh pada norma-norma agama, dan yang satu lagi bersifat negatif yakni ingin melanggar norma-norma yang ditetapkan. Periksa Abd. Al Karim Zaydan, *Ushul al Da'wah*, (Iskandariah: Dar Umar ibn al Khattab, 1976), 391

Untuk dapat menegakkan kehidupan sosial yang sehat, tertib dan harmonis diperlukan komitmen dari semua pihak, terutama pemimpin masyarakat, baik formal maupun informal, serta para da'i sebagai penganjur kebenaran agama Islam.

Dakwah--sebagai sebuah profesi sosial keagamaan--memiliki peranan penting dalam menanggulangi pelanggaran dan penyimpangan masyarakat, terutama yang dilakukan oleh muslim. Dalam konteks patologi sosial muslim tersebut, dakwah tampil sebagai bentuk treatment sosial yang harus ditempuh dengan cara bijaksana (Q.S [16]: 125), sistematis, dan berkelanjutan, serta menggunakan seperangkat sarana-prasarana dan landasan falsafah keilmuan. Inti dakwah--dalam perspektif seperti di atas--adalah mengajak manusia untuk berjalan di atas norma yang benar dan bertujuan menciptakan kebahagiaan hidup manusia secara perorangan maupun kolektif, baik di dunia maupun akherat.

Dalam perspektif falsafah dakwah, manusia yang menyimpang dipandang sebagai; (a) seorang yang sedang bodoh, walaupun dia memiliki ilmu pengetahuan. Tugas dakwah ketika itu adalah menghilangkan kebodohnya, serta meluruskan perilakunya dengan langkah-langkah prognosis, diagnosis, pembimbingan/menasehati dan penyadaran, dan evaluasi; (b) sebagai orang yang harus dikasihsayangi. Jadi, dalam melihat manusia yang sedang berbuat bodoh/ jahil dan menyimpang, maka harus ditolong dan dibantu untuk mengatasi problemnya sampai dapat mengetahui kebenaran dan kembali ke jalan yang lurus.¹⁰⁸

Dakwah--dalam rangka menciptakan stabilitas dan ketertiban hidup masyarakat Islam--dapat ditempuh dengan simpul **amar ma'ruf** dan **nahi munkar**, yakni menegakkan yang baik dan meluruskan yang menyimpang. Amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut harus dijalankan secara benar. Untuk itu, maka orientasinya harus terarah pada tegaknya lima prinsip kemaslahatan masyarakat yang meliputi; prinsip *hifzu al nafs* (perlindungan jiwa manusia), prinsip *hifzu al din* (perlindungan agama, akidah dan ideologi keagamaan yang benar), *hifzu al 'aql* (perlindungan akal dan pikiran sehat), *hifzu al nasl* (perlindungan terhadap

¹⁰⁸ Mujahid, tokoh ulama' Makkah, mengatakan bahwa tugas manusia dalam kerangka persaudaraan Islam adalah menolong saudaranya yang sedang dzalim, melakukan kemaksiatan. Lihat Abd al Karim Zaydan, **Ushul al Da'wah**, hal. 392.

regenerasi dan nasab-keturunan yang benar), dan *hifzu al mal* (yakni perlindungan terhadap properti dan sistem kepemilikan harta benda).

Lima prinsip di atas menjadi pilar tegaknya kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Perlindungan agama mengharuskan ditegakkannya sanksi hukum terhadap penyimpangan keagamaan yang menyebabkan disintegrasi masyarakat Islam seperti hukuman atas perilaku *murtadd* dan pelecehan agama, perlindungan jiwa menuntut ditegakkannya sanksi hukuman atas perilaku penyimpangan pembunuhan, kekerasan dan lain- lain. Perlindungan akal sehat mengharuskan ditegakkannya hukuman atas kriminalitas yang terkait dengan minum-minuman keras, *khamr*, narkoba dan sejenisnya. Perlindungan terhadap nasab dan generasi-keturunan menuntut ditegakkan sanksi hukuman perzinahan, lesbian, homoseks, dan penyimpangan seksual yang lain. Sedangkan perlindungan terhadap harta benda mendorong ditetapkannya hukuman potong tangan atas pencuri, koruptor, pencopetan dan sejenisnya.

Dengan tegaknya lima prinsip kehidupan sosial-kemasyarakatan yang disebut *al darurat al khams*¹⁰⁹ tersebut maka dapat dijamin tegaknya kemaslahatan dan ketertiban dalam masyarakat. Dakwah dengan berbagai metode dan teknik yang ada diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan umum masyarakat sebagaimana tersimpul dalam lima prinsip diatas.

Praktik dakwah dalam konteks merealisasikan kehidupan sosial yang harmonis, tertib dan berkeadilan dapat ditempuh secara prosedural dengan; a). membina kepribadian individu sebagai warga masyarakat agar ia dapat menjadi sumber kebajikan di tengah masyarakatnya, bukan malah menjadi sumber kejahatan dan perilaku penyimpangan.

Dalam konteks syari'ah Islam, hal ini ditempuh dengan mengintensifkan pelaksanaan peribadatan dan kesadaran tentang pentingnya beribadah. Peribadatan yang disyariatkan agama berfungsi untuk mendidik dan membersihkan jiwa individu, memperkokoh ikatan sosial yang utama; b). menegakkan sistem sosial yang berkeadilan. Oleh karena itu, harus ditegakkan kekuatan kontrol sosial,

¹⁰⁹ Istilah ini memiliki redaksi yang bervariasi, misalnya, **al-umur al-khamsah**, dan **al-mashalih al-khamsah al-haqiqiyah**. Lima prinsip itu menjadi tujuan diundangkannya syariah Islamiyyah. Priksa, Muhammad Abu Zahroh, *Usul al Fiqh*, (Beirut: Dar al Fikr al 'Arabiy. 1985), 364-367.

misalnya, dengan amar ma ruf dan nahi munkar; c). Untuk menegakkan keadilan tersebut diperlukan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Pengawasan dan pendidikan kemanusiaan harus ditingkatkan agar tersedia manusia-manusia yang mulia dan berkualitas, serta sehat jasmani dan rohani.

Latihan

1. Ada yang membedakan antara masyarakat Islam dengan masyarakat Islami, jelaskan kedua hal tersebut! Dan bagaimana pendapat saudara?
2. Jelaskan variasi penyimpangan masyarakat muslim dan sebab-sebabnya!
3. Jelaskan konsep dakwah Islamiyah kaitannya dengan penanganan patologi sosial!
4. Bagaimana model-model dakwah Islamiyah yang sejalan dengan konseling terhadap kasus patologi sosial!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. Sosiologi Skematika: teori dan terapan. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.*
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul at Fiqh*. Beirut: Dar al Fikr al 'Arabiyy, 1985.
- Ahmad Mubarak. Psikologi Keluarga: Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2.005.*
- Alatas, Syed Hussein. *Sociology of Corruption*. Singapore: Time Institutional, 1980.
- Brooks, Robert C. *Corruption in American Politics and Itfcs*. New York: Dood Mead and Company, 1960.
- A. Simanjuntak. *Pengantar Kriminolog: dan Patologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.
- _____. *Patologi Sosial*. Bandung; Tarsito, 1985
- _____. *Latar Belakang Kenakalan Anak. Bandung: Alumni, 1975.*
- Coser, Lewis A. *The Function of Sosial Conflict* New York: 'l he Free Press, 1956.
- Chandra, Robby I. *Konflik dalam Hidup Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Fine, Bunyamin. *One Million Delinquents*. New York: The New American Library, 1975.
- Freire, Paulo. *Paedagogyof The Opressed*. New York: The Scabury Press, 1986.
- Gazalba, Sidi. Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.*
- Gould, David J and Reyes Aamaro. Bureaucratic Corruption and Underdevelopment in The Tird World: The Case of Zaire. New York: Pergamon Press, 1980.*
- H.A. Phelp and D. Henderson. *Contemporary Sosial Problems*. New York: Pretince-Hall Inc.,. 1953.
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. New York: Yale University Press, 1972.
- ullian, Joshep and Kambium, Willian. *Social Problems*. New Jersey Prentice Hali, Inc., 1986.

- Kvaracens, Wiiiium C. *Dynamic of Delinquency*. Ohio: Charles E. Mcrrils Books, Inc., 1966.
- Kanono, Kartini, *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, **2001**.
- Koenig Samuel. *Man and Society: The Basic Teaching of Sociology*. New York: Barnes and Noble Inc., 1975.
- Muhammad Basrowi dan Soenyono. *Memahami Sosiologi* Surabaya: Lutfansah Media lama, 2004.
- Mastembroke. W.F.G. *Penanganan Konflik dan Pertumbuhan Organisasi*. Terj. Pandan Guritno. Jakarta: UI Press, 1986.
- Merton, Robert K. *Sosial Theory and Sosial Structure*. New York: The Free Press of Glencoe, 1957.
- Mubarak, Muhammad. *Al Mujiama' al Islamiy al Mu 'asir*. Beirut: Dar al Fikr, 1971.
- Masykur Hakim. *Model Masyarakat Madam*. Ed. Salahuddin Hamid. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Poespoprodjo. *Logika Scientifika: Pengantar Dialektika Ilmu*. Bandung: Pustaka Grafika, 1999.
- Robert M. Mclver and Charles Page. *Society: An Introductory Analysis*. New York: Rinehart and Company, 1975.
- Rubungton, Earl and Weinberg, Martin S. *The Study of Sosial Problems*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. New York: The McGraw-Hill Company, Inc., 1996.
- Sapari Imam Asy'ari. *Patologi Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 1984.
- Shadilly, Hassan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Soekanto, Soerjono. *Sosioiog: Penyimpangan. Seri Sosiologi 9*. Jakarta: Rajawali, 1988.
- Soetomo. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Jaya, 1995.

- Suseno, Franz Magnis. Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik: Dalam Konflik Komunal di Indonesia saat Ini. *Jakarta: INIS dan Pusat Bahasa dan Budaya, 2003.*
- Singgih, D Gunarsa. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978.
- Scelling, Thomas C. *Command and Cotrol* dalam “Sosial Responsibility and Bussiness Predicament. wosihington. The Booking Institution, 1974.
- Totok Sumantoro, *Psikologi Dakwah: Dengan Aspek-Aspek Kejiwaan yang Qur’ani*. Jakarta: Penerbit Amzan, 2001.
- Turner, Jonathan H. *The structure of Sociological Theory*. Chicago The Dorsey Press, 1996.
- Vembriarto, St. *Pathologi Sosial*. Jakarta: Yayasan Pendidikan PARAMITA Yogyakarta, 1984.
- Wilson, Wooddrow. *The New Democracy*. New York: Harper and Bralhcis, 1926.
- Zaydan abd al Karim. *Usul al-Da’wah*. Baghdad: Dar ‘Umar ibn al-Khattab li al-i iba ‘ah wa al-Nashr, 1970

Curriculum Vitae Penulis



Penulis buku dasar ini adalah Abd. Syukur, kelahiran Jombang, Jawa Timur, tahun 1966. Ia merupakan salah seorang dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Sa Sunan Ampel Surabaya yang membidangi matakuliah Problema sosial, Patologi Sosial, dan Patologi Muslim. Pendidikan dasarnya diperoleh dari MI Tarbiyatul Aulad Gebangmalang-Bandung, dan tamat pada tahun 1976; Pendidikan menengahnya (SLTP) diperoleh dari MTs MASS Seblak-Kuwaron, Diwek, dan tamat pada tahun 1979; Selanjutnya, ia menempuh pendidikan atas (SLTA) pada MA MASS Tebuireng yang tamat pada tahun 1984. Setelah berhenti selama dua tahun karena mengabdikan ilmunya di MI Islamiyyah Bapuh Baru, Glagah, Lamongan, maka selanjutnya, pada tahun 1986, ia menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi di IAIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah/ PAI, dan tamat pada tahun 1991. Setelah itu, ia kembali mengabdikan dengan mengajar di tempat kelahirannya, termasuk juga aktif mengajar di MTs dan MAN Denanyar, Jombang. Pada tahun 1999, ia kembali melanjutkan studi pada Institut yang sama dengan mengambil jurusan ilmu Hukum Islam dengan spesifikasi ilmu hukum Islam, yang tamat pada tahun 2001. Tidak seperti sebelumnya, berhenti 2 tahun setelah SLTA dan 7 tahun pasca S-1 untuk mengabdikan ilmu, maka untuk kali ini, pasca S-2, ia langsung melanjutkan studi jenjang S-3 di UIN Sunan Kalijaga dengan konsentrasi *Islamic Studies* dan berhasil menyelesaikannya dengan mempertahankan Disertasi Doktor dengan tema “Gerakan Kebangsaan Kaum Tarekat: studi kasus Tarekat Shiddiqiyah pusat Losari, Ploso, Jombang. Di bidang penelitian dan pengembangan ilmu, penulis telah meneliti beberapa gerakan tarekat, seperti Shiddiqiyah dalam konteks pemberdayaan ekonomi Masyarakat; Qadiriyyah dan Naqsyabandiyyah di Cukir dan Rejoso dalam kaitannya dengan pendidikan politik warga masyarakat; terakhir meneliti tentang aktifitas Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyyah Suryalaya Korwil Indonesia Timur di Surabaya dalam bidang penanganan kasus mental para pecandu Narkoba dan orang-orang yang mengalami keterasingan sosial. Adapun dalam bidang upgrading keilmuan, ia pernah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan ilmu. Di antaranya; pernah mengikuti shortcourse bidang manajemen penelitian (*research management*) di Melbourne University pada tahun 2010; pernah mengikuti shortcourse di bidang pengembangan metodologi studi Islam di Marmara University, Istanbul, Turkey pada tahun 2013.